

# **SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)  
BERDASARKAN LAPORAN BERKELANJUTAN  
(Studi Kasus Pada PT. Kaltim Prima Coal, Tbk.)**



**OLEH:**

**JULIANA DAMNUR**  
**10973006997**

**JURUSAN AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1434 H / 2013 M**

# SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)  
BERDASARKAN LAPORAN BERKELANJUTAN  
(Studi Kasus Pada PT. Kaltim Prima Coal, Tbk.)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Komprehensif  
Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru*



**OLEH:**

**JULIANA DAMNUR**  
**10973006997**

**JURUSAN AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAUP-PEKANBARU  
1434 H / 2013 M**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) BERDASARKAN LAPORAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Pada PT. Kaltim Prima Coal, Tbk.)**

*Oleh : Juliana Damnur*

*Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Kaltim Prima Coal, Tbk. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Kaltim Prima Coal, Tbk apabila dilihat dari Sustainability Report tahun 2011 dan kesesuaiannya terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam Global Reporting Initiative (GRI). Indikator-indikator tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Ekonomi (Economic Performance Indicators (EC), Indikator Kinerja Lingkungan Hidup (Environmental Performance Indicators (EN), Indikator Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak (Performance Indicators Labor Practices and Decent Work (LA), Indikator Kinerja Masyarakat (Performance Indicators Society (SO), Indikator Hak Asasi Manusia (Performance Indicators for Human Rights (HR), dan Indikator Kinerja Tanggung jawab Produk (Indicators Performance Product Responsibility (PR).*

*Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan menggunakan data sekunder. Peneliti menganalisis Sustainability Report berdasarkan indikator-indikator GRI dan membagi kedalam tiga kriteria yaitu standar terpenuhi sepenuhnya (Standar Fully Fulfilled), standar setengah terpenuhi (Standar Partially Fulfilled), dan standar tidak terpenuhi (Standar Not Fulfilled)*

*Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa laporan berkelanjutan PT. Kaltim Prima Coal, Tbk. tahun 2011 untuk kriteria terpenuhi sepenuhnya dari indikator inti 88% dan indikator tambahan 83%, sedangkan untuk kriteria sebagian terpenuhi untuk indikator utama 12% dan indikator tambahan 8%. Dengan demikian, PT. Kaltim Prima Coal, Tbk. masuk dalam kategori “B+” karena telah memenuhi lebih dari 20 indikator yang merupakan standar minimum yang ditetapkan oleh GRI.*

*Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR,) Laporan berkelanjutan, PT. Kaltim Prima Coal, Tbk, GRI*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan sedalam syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang begitu besar, baik berupa kesehatan, kesempatan maupun kemampuan berpikir, serta banyak lagi nikmat yang lain yang telah Dia berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) BERDASARKAN LAPORAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Pada PT. Kaltim Prima Coal, Tbk.)”** guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Oral Komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam tentunya selalu tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah berjuang untuk menerangi kehidupan ini dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam segi materi maupun dalam teknis penulisannya. Hal itu tentunya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, demi terbentuknya sebuah tulisan ilmiah yang sempurna.

Penulis sangat merasakan banyaknya bantuan, bimbingan dan arahan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan

terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang tersebut dibawah ini :

1. Bapak Prof. Dr.H.M Nazir selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP.Me.EC selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dony Martias, SE.MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Ibu Desrir Miftah, SE.MM.Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
5. Ibu Ade Ria Nirmala, SE.MM selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama mengikuti perkuliahan.
6. Ibu Susnaningsih Mu'at. SE.MM selaku Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan koreksi yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen dan staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu dan memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
8. Dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua ku ayahanda Daman Huri dan Ibunda Nur'aini yang tercinta, atas segala dukungan, pengorbanan, dorongan semangat, dan do'a yang senantiasa diberikan kepada ananda sehingga bisa menyelesaikan studi di perguruan tinggi UIN SUSKA RIAU, karena ayah dan ibu tercintalah yang menjadi

motivasi penulis dalam menghadapi masalah dan tantangan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

9. Untuk abang-abang ku tersayang uwo ku Asrizal Damnur dan istri Elpianis, anga ku Muhajir Damnur, A.Md dan istri Mariza Ulfa, ST dan Udo ku Hayatul Fikri dan istri Yeni, yang selalu memberikan kasih dan sayang, motivasi, dan do'a, kepada penulis sebagai kakak yang bijak.
10. Untuk kakak ku tersayang Atri Muliani Damnur, SE dan abang iparku Armen, serta keponakan-keponakan ku Adla, Syakila, Rafa, Rafif, dan Ainul Anaki, yang memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Untuk yang terkhusus, kembaran ku tercinta Juliani Damnur, S.Pd.I yang sama-sama menyelesaikan perkuliahan di Universitas UIN SUSKA RIAU.
12. Untuk Ibu ku Yurbaiti dan Bapak ku Hasan Basri, S.Pd, yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.
13. Untuk Nenek ku Hj. Syamsiar serta Mamak-mamak, Amai-amai, adek-adek ku semuanya dan keluarga besar ku yang selalu mendo'akan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Amak ku Siti Aisyah, Bapak ku Ahmad, ibu ku Mesra Yulia, SE, Bapak ku Adrison, SE, Ibu Jumiati, S.Pd.I dan Bapak Mahyudin Syukri, M.Pd, Bunda Epi dan suami yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada teman-teman seperjuangan, Wijayanti, Siti, Syahroini, Ilfi, Hadi, Hendra, Eka, Aizam, Rorizky, Saddam, Asep Arpand, Zulfadli, Wahid, dan anak-anak lokal Akuntansi C '09 dan untuk teman-teman konsentrasi Akuntansi Manajemen, Novi, Eindah, Isbi dan lainnya yang telah bersama-sama belajar mendalami materi akuntansi dan khususnya akuntansi manajemen.
16. Untuk orang-orang terdekat ku, Anggi Adi Kasmi, Muhammad Yunus S.Si, Jeldi Pantri, S.Si, Rudi, Refli Apriliandri, Muhammad Alam Fitrah, Khairul Fitrah, S.Si, Mursida, SE, Afrilla, Resti, dan kakak ku Yulia yang selalu memberikan motivasi untuk selalu maju dan berani. Serta abang-abang ku Henri, K. SH, M.Si, Faisal, Anto, Rezki, Charles, Chandra, Acen, Ridwan, Mizan, Dahrizul, Azri, Syukri, dan abang-abang ku yang tak tersebut namanya, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
17. Untuk teman-teman ku yang arif, Fitri Herlinda Yanti, SE, Liati, S.Ap, Riska, Intan, Nurul, Wirdatul Jannah Amnur, S.Pd.I, Indra, Afrizal, S.Pd, M. Nur, S.Pd.I, Yasri, S.Psi, Abdul, Reni, S.Pd.I, Nuzul, Regi Ade Putri, S.Pd, Hamdi, Akmal, Hendri, Junaidi Agus, Isyaf, Sari dan teman seperjuangan selama menjalani masa perkuliahan.
18. Untuk Teman-teman TRY OUT, Hendrik, serta adik-adik ku Raybul, Fitri Sulastri, Fitri Farida, Rezki, Bakri, Wati Anita, Ivo, Nurhasanah, Rita Mursi, Siti Umayyah, dan teman-teman ku lainnya.

19. Untuk teman-teman KKN ku di Pulau tengah, Delvi, Fitri, Lisa, Iam, Ardham, Ridho, dan Mukhlis.

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan penulis mendo'akan semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang berlipat ganda.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pekanbaru,      Oktober 2013

Penulis

Juliana Damnur



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Mamfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
II.1 Teori-teori tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	9
II.1.1 <i>Agency Theory</i> .....	9
II.1.2 <i>Legitimacy Theory</i> .....	10
II.1.3 <i>Stakeholders Theory</i> .....	12
II.2 Akuntansi Pertanggung Jawaban Sosial .....	13
II.3 Akuntansi Lingkungan .....	14
II.4 <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) .....	16
II.4.1 Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> ..	17
II.4.2 Bentuk-bentuk <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	22
II.4.3 Mamfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	23
II.4.4 Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	25
II.4.5 Penilaian terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR Assessment ) .....	26
II.5 <i>Sustainability Reporting</i> .....	27
II.5.1 Pengertian <i>Sustainability Reporting</i> .....	27
II.5.2 Mamfaat <i>Sustainability Report</i> .....	28
II.5.3 Prinsip-prinsip dalam Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .....	28
II.5.4 Isi <i>Sustainability Report</i> .....	30
II.6 <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI) .....	30
II.6.1 Profil <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI) .....	30
II.6.2 Orientasi Pelaporan GRI .....	32
II.6.3 Orientasi GRI <i>Guidelines</i> .....	33
II.6.4 Penerapan Tingkat GRI .....	34

II.6.5	Indikator GRI .....	36
II.7	Peraturan tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di Indonesia .....	45
II.7.1	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .....	46
II.7.2	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .....	47
II.7.3	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	48
II.8	Penelitian Sebelumnya .....	49
 <b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>		
III.1	Jenis Penelitian .....	51
III.2	Jenis dan Sumber Data .....	51
III.3	Metode Pengumpulan Data .....	52
III.3.1	Dokumentasi .....	53
III.3.2	Riset Pustaka ( <i>Library Research</i> ) .....	53
III.4	Objek Penelitian .....	53
III.5	Metode Analisis Data .....	54
 <b>BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>		
IV.1	Sejarah Singkat Perusahaan .....	57
IV.2	Visi dan Misi Perusahaan .....	59
IV.2.1	Visi Dari PT. KPC, Tbk. ....	59
IV.2.2	Misi Perusahaan .....	59
IV.2.3	Nilai .....	61
IV.3	Struktur Organisasi .....	62
IV.4	Kegiatan Usaha PT. Kaltim Prima Coal, Tbk. ....	64
 <b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
V.I	Informasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang Diungkapkan PT. Kaltim Prima Coal dalam Laporan Berkelanjutan PT. Kaltim Prima Coal .....	69
V.1.1	Menghormati Masyarakat Tetangga .....	70
V.1.2	Membina Hubungan yang Berkelanjutan dengan para Penerima Manfaat .....	73
V.1.3	<i>Forum Multi Stakeholder For Corporate Social Responsibility</i> (FMSH For CSR) .....	74
V.1.4	Wujud Kepedulian KPC Dalam Mencapai Pengembangan Masyarakat Yang Berkelanjutan .....	75
V.1.4.1	Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi (SO1) .....	75

V.1.4.2	Pengembangan Ekonomi Lokal dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) .....	76
V.1.4.3	Pengembangan Agribisnis .....	77
V.1.4.4	Program Pelestarian Alam dan Budaya .....	78
V.1.4.5	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan .....	79
V.1.4.6	Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Masyarakat .....	80
V.1.4.7	Penguatan Kapasitas Pemerintahan & Kelembagaan Masyarakat Desa Mandiri .....	82
V.1.5	Penanganan Keluhan Masyarakat dan Komunikasi Eksternal .....	84
V.1.6	Menuju Hari Esok dengan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik .....	85
V.1.6.1	Kebijakan Publik .....	85
V.1.6.2	Pemukiman Kembali Yang Lebih Baik .....	87
V.2	Analisis laporan Berkelanjutan PT. Kaltim Prima Coal Berdasarkan Indikator-indikator GRI .....	89
V.2.1	Indikator Kinerja Ekonomi .....	90
V.2.2	Indikator Kinerja Lingkungan Hidup .....	96
V.2.3	Indikator Kinerja Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak .....	115
V.2.4	Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia .....	125
V.2.5	Indikator Kinerja Masyarakat .....	132
V.2.6	Indikator Tanggung Jawab Produk .....	138

## **BAB VI : PENUTUP**

VI.1	Kesimpulan .....	146
VI.2	Saran .....	147
VI.3	Keterbatasan Penelitian .....	148

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BIOGRAFI PENULIS**

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel II.4 <i>Global Reporting Initiative Indicators</i> .....	38
Tabel V.1 Pemenuhan Indikator Kinerja Ekonomi .....	91
Tabel V.2 Perbandingan Nilai Ekonomi.....	92
Tabel V.3 Nilai Pembelian Barang dan Jasa .....	93
Tabel V.4 Sistem Pemilihan Peserta Program Pelatihan dan Rekrutmen.....	94
Tabel V.5 Pemenuhan Indikator-indikator Kinerja Lingkungan Hidup	97
Tabel V.6 Konsumsi Material untuk Operasi Penambangan 2011 ....	97
Tabel V.7 Konsumsi Energi dan Bahan Bakar 2010-2011 .....	99
Tabel V.8 Sumber dan Jumlah Volume air yang dikonsumsi .....	101
Tabel V.9 Emisi CO2 dari konsumsi Energi dari Pembukaan Lahan	106
Tabel V.10 Hasil Pengukuran Emisi Cerobong Insinerator 2011 .....	107
Tabel V.11 Daftar Lokasi dan Badan Air Penerima .....	108
Tabel V.12 Jumlah B3 yang Dikelola di tahun 2011 .....	110
Tabel V.13 Volume Produksi dan Overburden .....	112
Tabel V.14 Anggaran dan Realisasi Biaya Pemeliharaan Lingkungan 2011 .....	114
Tabel V.15 Pemenuhan Indikator-indikator Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak .....	116
Tabel V.16 Distribusi Karyawan .....	116
Tabel V.17 Rincian Data Tingkat Perputaran Karyawan Selama Tahun 2011 .....	117
Tabel V.18 Tren Kekerapan Kejadian Kecelakaan .....	120
Tabel V.19 Rata-rata Durasi Pelatihan Per Karyawan Per Tahun Berdasarkan <i>Grade</i> .....	122
Tabel V.20 Pemenuhan Indikator-indikator Hak Asasi Manusia .....	126
Tabel V.21 Jumlah Keluhan dan Umpan Balik Masyarakat .....	130
Tabel V.22 Perbandingan Keluhan Berdasarkan Kriteria .....	131
Tabel V.23 Pemenuhan Indikator-indikator Kinerja Masyarakat .....	134
Tabel V.24 Pemenuhan Indikator-indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk .....	139
Tabel V.25 Ringkasan Rata-rata Pemenuhan Laporan Berkelanjutan PT. KPC 2011 Berdasarkan Indikator GRI .....	143

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar II.1 Konsep Susanto ‘ <i>Leit</i> ’ Star.....	20
Gambar II.2 Bentuk-bentuk <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	23
Gambar II.3 <i>GRI Application Level</i> .....	36
Gambar IV.1 <i>Oranization Structure</i> .....	54
Gambar IV.2 Bagan Alur Operasi PT. Kaltim Prima Coal .....	65
Gambar V.1 Sistem Pemilihan Peserta Program Pelatihan dan Rekrutmen .....	80

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1        Latar Belakang**

Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki peranan yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya, serta kehidupan perekonomian pada khususnya. Pentingnya peranan perusahaan ini tentu saja tidak luput dari keterkaitan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai faktor penggerak perusahaan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peranan masyarakat serta lingkungan baik itu internal maupun eksternal perusahaan memiliki pengaruh dalam pertumbuhan perusahaan, sehingga semakin besar perusahaan maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Masih banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang cenderung fokus terhadap pencarian keuntungan sebesar-besarnya, dimana fokus perusahaan lebih kepada para *stockholder* dan kreditur, sedangkan para *stakeholder* seperti masyarakat dan lingkungan kurang diperhatikan karena peranan mereka dirasa tidak dapat meningkatkan laba perusahaan secara langsung. Kepentingan para *stakeholder* hanya dinilai dari sejauh mana mereka dapat berperan dalam membantu meningkatkan laba perusahaan secara langsung.

Penggunaan prinsip yang demikian ternyata dapat mempengaruhi hubungan antar pelaku perusahaan, lingkungan dan masyarakat. Hal seperti ini

akan mengakibatkan salah satu pihak *stakeholder* merasa peran dan haknya diabaikan, yang kemudian dapat timbul perselisihan, ataupun berujung pada tindakan protes dari pihak yang merasa dirugikan sehingga kinerja para pelaku perusahaan tidak produktif.

Banyak kasus ketidakpuasan publik yang muncul sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang dirasa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Keadaan seperti ini akhirnya memaksa perusahaan untuk memperbaiki hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Masyarakat tidak hanya menuntut penyediaan barang dan jasa saja terhadap perusahaan, melainkan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau biasa disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan ternyata berpengaruh terhadap pencitraan perusahaan di mata masyarakat, khususnya para investor dan pengguna laporan keuangan. Menurut Sutojo (2004:3) dalam Ulva (2012), mengemukakan bahwa terbentuknya citra positif sebagai akibat pelaksanaan program CSR oleh suatu perusahaan akan membawa dampak pada keberhasilan kegiatan bisnis dan pemasaran perusahaan. Dalam jangka panjang, pencitraan positif ini akan membawa banyak manfaat bagi perusahaan pelaku CSR, baik pada saat perusahaan sedang mengalami masa kejayaan maupun pada saat menghadapi masa krisis.

*Stockholders* memandang bahwa perusahaan yang baik bukan hanya perusahaan yang dapat mencapai target dan keuntungan yang maksimal, tetapi

juga melihat bagaimana perusahaan menerapkan bentuk pertanggungjawaban sosialnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan.

Perubahan paradigma diatas kemudian memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan CSR. CSR bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, melainkan sebuah entitas yang wajib memperhatikan lingkungan sosialnya. Sehingga fokus perusahaan kini tidak hanya perolehan laba perusahaan demi kelangsungan usaha, melainkan juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan usaha.

CSR mungkin masih kurang populer dikalangan pelaku usaha nasional. Namun, tidak berlaku bagi pelaku usaha asing. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan secara sukarela itu, sudah biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ratusan tahun lalu. Berbeda dengan kondisi di Indonesia, disini kegiatan CSR baru dimulai beberapa tahun belakangan. Tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

CSR sendiri telah tercantum pada tahun 2007 masuk dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Pasal 74 yang mengungkap berbagai ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang berkaitan atau memanfaatkan sumber daya alam.



Bukti bahwa perusahaan telah menerapkan CSR dapat dilihat melalui pengungkapan informasi CSR mengenai aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan tersebut dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Perusahaan menggunakan *Annual Report* sebagai media laporan lingkungan menyeluruh yang dipublikasikan secara luas, yang biasa disebut sebagai Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Laporan ini biasa disebut laporan berkelanjutan manakala kinerja yang dilaporkannya dalam kurun waktu tertentu sudah berkelanjutan atau menunjukkan kecenderungan membaik menuju dampak bersih positif. Konsekuensinya adalah laporan berkelanjutan ini akan terus dipantau secara periodik.

Dalam proses pelaporan, ada beberapa standar yang sudah dikenal untuk menunjukkan kinerja dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Salah satunya adalah *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI merupakan lembaga yang mempromosikan standar yang diciptakan untuk memberikan arahan bagi perusahaan-perusahaan dalam menerbitkan *sustainability report* atau tanggung jawab sosialnya. GRI mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus terdapat dalam *sustainability report* yaitu, seimbang, dapat dibandingkan, teliti, tepat waktu, jelas, dan dapat dipercaya.

Dalam menilai implementasi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam *sustainability report* terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan GRI, yaitu : (1) strategi dan profil, (2) pendekatan manajemen, dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar memiliki acuan dalam

mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam *sustainability report*.

PT. Kaltim Prima Coal, Tbk. merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tambang, yang merupakan perusahaan pertambangan batubara terbesar di Indonesia, yang menerapkan *corporate social responsibility* secara berkelanjutan. Hal ini terbukti dari konsistensi perusahaan dalam mempublikasikan Laporan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainability Development Report* sejak 7 tahun kebelakang terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010. Konsekuensi atas pengungkapan tanggung jawab sosial pada PT. Kaltim Prima Coal, Tbk juga terbukti atas masuknya perusahaan sebagai nominator dalam beberapa kategori di *Indonesia Sustainability Reporting Award* (ISRA) beberapa tahun ini. Berdasarkan *The 6th Indonesia Sustainability Reporting Award 2010*, PT. Kaltim Prima Coal, Tbk terpilih sebagai *Runner Up 1 - Best Sustainability Report 2009 Group A (Agriculture, Plantation, Mining and Basic Industry and Chemicals Companies)*, dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), memberikan peringkat hijau, bagi upaya pengelolaan lingkungan PT. Kaltim Prima Coal (KPC), periode tahun 2010/2011. Hal ini berarti KPC telah melakukan upaya melebihi tingkat kepatuhan yang ditetapkan dan peduli terhadap lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul,

**“ANALISIS PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) BERDASARKAN LAPORAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Pada PT. Kaltim Prima Coal, Tbk.)”**

**I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana penerapan tanggung jawab sosial (CSR) dan tingkat pemenuhan laporan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PT.Kaltim Prima Coal, Tbk. Tahun 2011?”

**I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan CSR pada PT. Kaltim Prima Coal, Tbk. apabila dilihat dari *Sustainability Report* tahun 2011 dan kesesuaiannya terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam *Global reporting Initiative* (GRI).

**I.4 Manfaat penelitian**

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan

untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan sosial.

- b. Bagi kalangan akademisi atau peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak untuk melakukan pengawasan sosial akibat dugaan pencemaran dan pemberian saran terhadap kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

## **I.5 Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Menguraikan tentang tinjauan pustaka tentang akuntansi pertanggung jawaban sosial, akuntansi lingkungan, pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR), konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), penilaian *corporate scial Responsibility* (CSR), pengertian *Sustainability Report*, mamfaat *Sustainability Report*, prinsip-prinsip dalam pengungkapan *Sustainability Report*, isi *Sustainability Report*, *Global*

*Reporting Initiative* (GRI), orientasi Pelaporan *Global Reporting Initiative* (GRI), orientasi *Global Reporting Initiative* (GRI) Guidelines, dan peraturan *Sustainability Report* di Indonesia.

### **Bab III : Metodologi Penelitian**

Berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yang berisi jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, objek penelitian, dan metode analisis data.

### **Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan**

Berisi sejarah perusahaan PT Kaltim Prima Coal, visi & misi perusahaan, dan aktifitas perusahaan.

### **Bab V : Pembahasan**

Menyajikan hasil dan analisis terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan PT. Kaltim Prima Coal berdasarkan laporan berkelanjutan tahun 2011.

### **Bab VI : Penutup**

Berisikan simpulan dan saran yang dapat diambil.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Teori-Teori tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Beberapa alasan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan pengungkapan CSR. Alasan-alasan tersebut dapat dijelaskan menggunakan *agency theory*, *legitimacy theory*, dan *stakeholders theory* [Sembiring (2003) dalam Mansur (2012)].

##### **II.1.1 *Agency Theory***

*Agency theory* (teori keagenan) menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak yang lain bertindak sebagai prinsipal Jensen dan Mecking, dalam James C. Van Horne (2007). Teori ini menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen Jensen dan Mecking, dalam James C. Van Horne (2007). Yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan.

Jensen dan Meckling, dalam James C. Van Horne (2007) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak. Adanya perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen serta adanya pemisahan antara

kepemilikan dan pengendalian perusahaan akan menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal. Akibatnya, manajer akan mengambil tindakan yang dapat memperbaiki kesejahteraannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan teori agensi, pemimpin perusahaan memiliki pandangan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara luas. menurut [Friedman (2009) dalam Mansur (2012)], tanggung jawab sosial perusahaan hanyalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan, yakni memaksimalkan laba. Pada saat yang sama, agen juga harus menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. Semua hubungan baik tersebut dikembangkan oleh agen dalam rangka mengupayakan terciptanya maksimasi laba [Friedman (2009) dalam Mansur (2012)]. Dengan demikian perusahaan menggunakan retorika *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai salah satu strategi dalam memaksimalkan laba.

### **II.1.2.     *Legitimacy Theory***

Menurut Hadi (2011) dalam Mansur (2012), legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat. Menurut yang dijelaskan Meutia (2010) dalam Mansur (2012), legitimasi adalah menyamakan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Untuk mencapai tujuan ini

organisasi berusaha untuk mengembangkan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dihubungkan dengan kegiatannya dan norma-norma dari perilaku yang diterima dalam system sosial yang lebih besar dimana organisasi itu berada serta menjadi bagiannya.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan perusahaan dalam mengelolah legitimasi agar efektif [Dowling dan Pfeffer (2011) dalam Mansur (2012)]:

1. Melakukan identifikasi dan komunikasi dan dialog dengan publik.
2. Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang perusahaan.
3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Konteks *Corporate Social Responsibility* (CSR) dipandang sebagai suatu kebijakan yang disetujui antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang telah memberikan izin kepada perusahaan untuk menggunakan sumber daya alam dan manusianya serta izin untuk melakukan fungsi produksinya. Jadi dalam pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Karena itu, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela. Namun harus diingat bahwa izin tersebut tidaklah tetap sehingga kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari perusahaan bergantung pada bagaimana perusahaan secara terus menerus



berevolusi dan beradaptasi terhadap perubahan keinginan dan tuntutan dari masyarakat.

### **II.1.3. *Stakeholders Theory***

*Stakeholders Theory* (Teori *Stakeholder*), mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholders*. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para *stakeholders* dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi *stakeholders*, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholders*nya [Sembiring (2003) dalam Mansur (2012). Menurut Thomas dan Andrew, dalam Mansur (2012), *Stakeholders Theory* memiliki beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok *stakeholders* yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan.
2. Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran bagi perusahaan dan *stakeholders*nya.
3. Kepentingan seluruh legitimasi *stakeholders* memiliki nilai secara hakiki, dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain.
4. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan manajerial.

*Teory stakeholder* menjelaskan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan *stakeholders*. Implikasinya adalah perusahaan akan secara sukarela melaksanakan

*Corporate Social Responsibility* (CSR), karena pelaksanaan CSR adalah merupakan bagian dari peran perusahaan ke *stakeholders*. Teori ini jika diterapkan akan mendorong perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan keinginan dari *stakeholder* dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya (*sustainability*).

## **II.2 Akuntansi Pertanggung Jawaban Sosial**

Sampai saat ini, belum terdapat kesepakatan definisi pasti tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial. Diantara pendapat-pendapat para ahli yang mengemukakan definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial ini, masing-masing pendapat sifatnya hanya saling melengkapi satu sama lain.

Belkai (Harahap, 2003:349), lebih suka menggunakan istilah *Socio Economic Accounting* (SEA) untuk akuntansi sosial dan memiliki pengertian sendiri untuk hal tersebut, yaitu :

“Akuntansi sosio ekonomi timbul dari penerapan akuntansi ilmu sosial, ini menyangkut pengaturan, pengukuran, analisis dan pengungkapan pengaruh ekonomi dan sosial dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Hal ini termasuk kegiatan yang bersikap mikro dan makro. Pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial negara mencakup *social*

*accounting* dan *report*, peranan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya, mencakup : *financial and managerial social accounting, social auditing*".

Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan proses seleksi-seleksi variabel kinerja sosial perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengukur kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada *shareholders* dan *stakeholders*.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah menilai, mengukur, dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan operasi perusahaan, baik untuk keperluan pihak internal maupun eksternal. Secara luas, definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial tidak hanya mencakup dampak operasional perusahaan, tetapi juga program-program sosial yang diadakan perusahaan.

### **II.3 Akuntansi Lingkungan**

Akuntansi konvensional selama ini hanya melaporkan informasi keuangan yang hanya mempengaruhi posisi keuangan dianggap kurang lengkap. Fenomena yang terjadi disekitar perusahaan khususnya dampak terhadap

lingkungan yang terjadi akibat operasi perusahaan dianggap perlu dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan sebagai wujud akuntabilitas perusahaan. Untuk memfasilitasi masuknya dimensi lingkungan kedalam laporan tahunan perusahaan maka muncul akuntansi lingkungan.

Akuntansi lingkungan merupakan konsep yang membahas mengenai dampak yang disebabkan oleh perusahaan terhadap lingkungan. Fokus utama akuntansi lingkungan didasarkan pada penerapannya sebagai salah satu alat komunikasi manajerial untuk pengambilan keputusan bisnis internal.

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environment Protection Agency* (US EPA, 1996 di dalam Putra, 2008), mengemukakan bahwa fungsi utama dari akuntansi lingkungan adalah :

*“an important function of environmental accounting is to bring environmental cost to the attention of corporate stakeholders who may be able and motivated to identify ways of reducing or avoiding those cost while at the same time improving environmental quality. (“Suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”).)*

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi lingkungan merupakan prosedur akuntansi yang berguna sebagai pembangunan berkelanjutan dan memberikan informasi sosial digunakan untuk memberikan gambaran bentuk komprehensif akuntansi yang memasukkan eksternalitas kedalam perusahaan seperti informasi yang berkaitan dengan lingkungan dalam bentuk mengidentifikasi biaya lingkungan serta mengidentifikasi manfaat dan mendukung penyebaran informasi dari pengukuran tersebut.

#### **II.4 Corporate Social Responsibility (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau biasa dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan sudah menjadi bagian penting dari perusahaan, terutama perusahaan besar untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri serta sebagai sarana bentuk kepedulian perusahaan terhadap unsur eksternal dan internal perusahaan. Banyak cara yang dilakukan berbagai perusahaan di Indonesia untuk menjalankan program CSR perusahaannya, seperti bantuan pengembangan fasilitas pendidikan, bantuan modal Usaha Kecil Menengah (UKM), pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas masyarakat, dan lain sebagainya. CSR diharapkan tidak hanya sekedar '*doing good*' melainkan '*doing to make it good*' agar kesejahteraan masyarakat dan lingkungan dapat tercapai sesuai dengan tujuan CSR secara global.

#### **II.4.1      Pengertian *Corporate Social Responsibility***

Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)* sudah banyak didefinisikan oleh para ahli akhir-akhir ini. Meskipun belum ada definisi *corporate social responsibility (CSR)* yang dapat diterima secara universal, pada umumnya definisi yang beranekaragam tersebut memiliki ciri-ciri yang sama mengenai cara pandang terhadap inti dari definisi CSR itu sendiri.

Menurut L. Daft (2006) pengertian formal dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta organisasi itu sendiri. Meskipun pengertian lugas, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat menjadi sebuah konsep yang sulit dipahami karena orang-orang yang berbeda mengenai tindakan apa yang bias meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Griffin (2004) secara khusus mengatakan, tanggung jawab sosial adalah serangkaian kewajiban yang dimiliki suatu organisasi untuk melindungi dan memajukan masyarakat tempatnya berfungsi. Menurut Bateman dan Snell (2009) *Corporate Social Responsibility* adalah kewajiban kepada masyarakat yang ditanggung oleh perusahaan. Robbins dan Coulter (2010) menyatakan konsep dari tanggung jawab sosial telah dijelaskan dalam beberapa cara yang berbeda yaitu kewajiban sosial adalah keterlibatan perusahaan dalam aksi sosial dikarenakan kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Organisasi melakukan apa yang wajib dilakukan dan tidak lebih. Ide ini merefleksikan pandangan klasik dari

tanggung jawab sosial, yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial manajemen hanyalah maksimalisasi keuntungan.

Dua konsep lainnya yaitu responsivitas sosial dan tanggung jawab sosial mencerminkan pandangan sosio-ekonomi yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial manajer bukan sekadar menghasilkan keuntungan, tetapi juga termasuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perusahaan *bukanlah* entitas mandiri yang bertanggung jawab hanya kepada pemegang saham tetapi juga mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat luas. Responsivitas sosial berarti bahwa perusahaan ini dipandu oleh norma dan nilai sosial dalam membuat keputusan praktis dan berorientasi pasar mengenai tindakannya. Organisasi yang bertanggung secara sosial mempunyai pandangan yang berbeda. Organisasi ini melampaui apa yang wajib dilakukan atau dipilih dilakukan karena kebutuhan sosial populer. Selain itu, organisasi melakukan apa yang perlu dilakukan untuk membantu pengembangan masyarakat karena itu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Kita mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai entitas bisnis, melampaui kewajiban hukum dan ekonominya, untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Definisi kita mengasumsikan bahwa sebuah bisnis mematuhi hukum dan memperhatikan pemegang sahamnya, menambahkan kebutuhan etis untuk melakukan hal-hal yang membuat masyarakat lebih baik dan tidak melakukan hal-hal yang membuat masyarakat menjadi lebih buruk.

Sedangkan *World Business Council for Sustainable Development's* (2008) dalam Purwitasari & Anis (2011 ) mengartikan CSR sebagai:

*“The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”.*

Pengertian CSR di Indonesia sendiri telah diangkat dalam peraturan normative yakni dalam UUPT. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 UUPT, CSR memiliki definisi yaitu sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat. Pengertian CSR dinyatakan oleh Maignan & Ferrell (2004) dalam Susanto (2009) sebagai berikut :

*“A business acts in socially responsible manner when its decision and actions account for and balance diverse stakeholder interests”.*

Definisi ini menekankan perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholder yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.

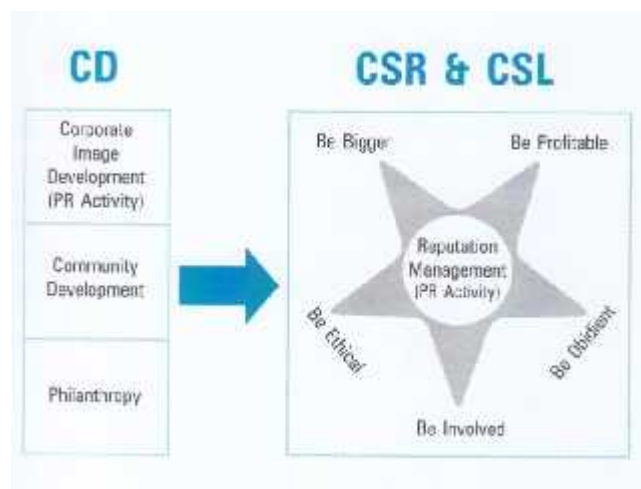
Menurut Suharto (2008), CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan



manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Konsep ini dinamakan konsep 4P yang merupakan pengembangan dari konsep *Tripple Bottom Line* (3P) yang dikemukakan oleh Elkington. Di dalam konsep 4P ini, Suharto memadukan konsep ISO 26000 dimana unsur prosedur dapat mewakili konsep *organizational governance, labor practices, fair operating practices*, dan *consumer issues*.

Sedangkan menurut konsep “*Leit*” *Star* yang dikemukakan oleh Susanto (2009), CSR dalam arti luas mempunyai 5 (lima) kewajiban : *Be Profitable, Be Ethical, Be Involved, Be Obedient*, dan *Be Bigger*.

**Gambar II.1**  
**Konsep Susanto ‘Leit’ Star**



Sumber : A.B. Susanto, *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategic Management dalam CSR*, 2009.

Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, tanpa laba yang memadai, perusahaan tidak akan mampu membayar pajak, memberi imbalan yang layak kepada para karyawan, kepada para pemasok, dan tidak dapat

memberikan *multiplier effect* yang diharapkan kepada komunitasnya. Selain itu dalam konsep ini juga dijelaskan bahwa perusahaan yang melakukan CSR harus mematuhi berbagai peraturan yang berlaku, memiliki prospek pertumbuhan yang cerah di masa depan, menjunjung tinggi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup komunitas dan lingkungan sekitarnya.

*The Jakarta Consulting Group* (JCG) dalam “*Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*” karangan A.B. Susanto (2009) mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) perusahaan. Ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada *shareholders* dan karyawan. Sedangkan ke luar, tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang.

Selain itu, ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* juga memberikan definisi CSR. Menurut ISO 26000, CSR adalah:

“Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh”. (draft 3, 2007).

Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklah sesederhana sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR mencakup tujuh komponen utama, yaitu *the environment, social development, human rights, organizational governance, labor practices, fair operating practices*, dan *consumer issues*.

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan yakni bahwa *corporate social responsibility* (CSR) pada hakikatnya merupakan sebuah teori tentang perlunya perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat terutama masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya, yang merupakan tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholders*-nya. Dimana dalam menjalankan hal ini suatu perusahaan tidak boleh meninggalkan etika dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat tercipta perusahaan yang besar dan terus berkembang.

#### **II.4.2 Bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility***

Tanggung Jawab sosial dapat dikelompokkan dengan lebih spesifik (Bateman & Snell, 2009):

- 1) Tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*), Perusahaan adalah memproduksi barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat pada suatu tingkat harga yang dapat membuat bisnisnya terus berjalan dan memenuhi kewajiban kepada investor.
- 2) Tanggung jawab hukum (*Legal Responsibilities*), Yaitu untuk mematuhi hukum lokal, negara, dan internasional.

- 3) Tanggung Jawab Etis (*Ethical Responsibilities*), Meliputi pemenuhan berbagai ekspektasi lainnya dari masyarakat, yang bukan hanya sekadar hukum tertulis.
- 4) Tanggung Jawab Filantropis (*Philanthropic Responsibilities*), Adalah perilaku dan aktivitas tambahan yang dianggap baik oleh masyarakat dan yang didukung oleh nilai-nilai yang dianut perusahaan.

**Gambar II.2**  
**Bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility**



Sumber: A. Carrol, "managing ethically with global stakeholders": A. present and future challenge, "academy of management executive, mei 2004, hal.116, 114-20.

### II.4.3 Manfaat Corporate Social Responsibility

CSR tidak dapat dipungkiri dapat memberikan manfaat yang besar baik untuk internal maupun eksternal perusahaan. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yaitu

laba, lingkungan dan masyarakat. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, melainkan dapat ikut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Dari sisi perusahaan terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR, antara lain :

1. Mengurangi resiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan.
2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.
3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan.
4. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*-nya.
5. Meningkatnya penjualan seperti yang terungkap dalam *riset Roper Search Worldwide*, yaitu bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.
6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat lagi menjalankan tanggung jawab sosialnya.

#### II.4.4 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* atau *corporate social responsibility disclosure* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005:381)

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai *corporate social reporting* merupakan suatu proses pengkomunikasian dampak-dampak sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan. Kontribusi negatif perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Salah satu usaha untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut adalah dengan mengungkapkan informasi-informasi mengenai operasi perusahaan sehubungan dengan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

Beberapa negara telah menetapkan keharusan mengenai perlunya pelaporan CSR, meskipun kesepakatan mengenai alat ukur terhadap kinerja sosial dan lingkungan masih belum dicapai secara bulat. Banyak perusahaan saat ini telah menghasilkan laporan-laporan tahunan berdasarkan audit eksternal yang pada umumnya mencakup isu-isu pembangunan berkelanjutan dan CSR.

Beberapa standar laporan yang sudah dikenal untuk menunjukkan *good business performance* antara lain, *Standard Account Ability* (AA1000) berdasarkan konsep *Triple Bottom Line* (3BL) yang digagas John Elkington, Pedoman Pelaporan

Berkelanjutan *Global Reporting Initiative*, Pedoman *Monitoring Verite*, *Social Accountability International* (SA8000); dan Standard Manajemen Lingkungan ISO 14000.

#### **II.4.5 Penilaian terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR *Assessment*)**

CSR *Assessment* ditujukan untuk mengidentifikasi masalah, peluang, dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR. Penilaian CSR bertujuan agar perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas CSR secara berkesinambungan, dan tidak bersifat parsial. Penilaian CSR juga membantu perusahaan mengidentifikasi kesenjangan dan peluang yang ada, sehingga mampu memperbaiki kualitas pengambilan keputusan.

Susanto (2009) menjelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) kriteria dalam penilaian CSR, yaitu :

1. Nilai-nilai dan etika perusahaan.
2. Dorongan eksternal dan internal yang memotivasi perusahaan untuk menjalankan aktivitas CSR.
3. Isu-isu penting seputar CSR yang dapat memberikan dampak bagi perusahaan.
4. *Stakeholder-stakeholder* kunci.
5. Struktur pengambilan keputusan yang berlaku dalam perusahaan saat ini, kekuatan dan kelemahannya dalam hal mengimplementasikan program CSR yang terintegrasi.
6. Implikasi terhadap sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki.

7. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan CSR yang tengah berjalan.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, terdapat 4 (empat) tahap dalam pelaksanaan penilaian CSR, yaitu :

1. Membentuk tim kepemimpinan CSR
2. Merumuskan definisi program CSR
3. Melakukan kajian terhadap dokumen, proses, dan aktivitas perusahaan
4. Mengidentifikasi dan melibatkan *stakeholder* kunci.

## **II.5        *Sustainability Reporting***

### **II.5.1      *Pengertian Sustainability Reporting***

Bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diungkapkan ke dalam laporan disebut *sustainability reporting*. Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), *sustainability reporting* merupakan laporan yang mengukur, mengungkapkan, dan menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan, serta merupakan laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut dengan *sustainable development*.

*Sustainability Reporting* juga disarankan oleh SAK dalam PSAK No.1 Paragraf 9 yang menyatakan perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan nilai tambah (*Value Added Statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.



### II.5.2 Manfaat *Sustainability Report*

*Sustainability Reporting* adalah praktik untuk pengukuran, pengungkapan dan dapat dihitung oleh *stakeholder* internal dan eksternal atas kinerja organisasi terhadap tujuan *sustainable development*.

Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), *sustainability report* mempunyai beberapa tujuan, antara lain :

- a. *Benchmarking* dan memperkirakan *sustainability performance* terkait hukum, norma, aturan, standar kinerja, dan inisiatif sukarela,
- b. *Demonstrating*. Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekspektasi mengenai *sustainability development*.
- c. *Comparing*. Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dengan organisasi lain sepanjang waktu.

### II.5.3 Prinsip-prinsip dalam Pengungkapan *Sustainability Report*

Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), prinsip-prinsip dalam pengungkapan *sustainability report* antara lain :

#### 1. *Transparency and Inclusiveness*

Kedua prinsip ini mewakili poin awal dalam proses pelaporan dan ditandai sebagai bahan dasar prinsip-prinsip lainnya. Seluruh keputusan mengenai pelaporan (misalnya bagaimana, kapan, dan apa) diambil dari dua prinsip ini dan dikaitkan dalam pertimbangan praktek.

2. *Sustainability Context, Completeness, and Relevance*

Ketiga prinsip ini memainkan peran penting dalam menentukan apa yang dilaporkan. Laporan sebaiknya dapat membantu menempatkan kinerja organisasi dalam konteks, tantangan, risiko, dan kemampuan *sustainability*. Informasi yang terkandung di dalam laporan harus melewati tes kelengkapan dalam lingkup batasan laporan, cakupan dan kerangka (waktu). Pada akhirnya, informasi yang dilaporkan sebaiknya relevan terhadap kebutuhan pengambilan keputusan oleh *stakeholders*.

3. *Neutrality, Comparability, and Accuracy*

Prinsip ini terkait dengan kualitas dan kepercayaan terhadap laporan. Laporan sebaiknya dapat membandingkan kapan saja antar organisasi. Informasi juga sebaiknya tepat akurat dan dapat dipercaya agar memungkinkan digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan. Selain itu, laporan sebaiknya menyajikan isi secara seimbang dan tidak bias.

4. *Clarity and Timeliness*

Prinsip ini terkait dengan pengelolaan akses dan ketersediaan laporan.

5. *Auditability*

Prinsip ini berhubungan dengan beberapa prinsip lainnya yang sebelumnya disebutkan. Prinsip ini merujuk pada kemampuan untuk menunjukkan bahwa proses yang mendasari persiapan laporan dan informasi dalam laporan itu sendiri telah memenuhi standar kualitas, reability, dan harapan lainnya.

#### **II.5.4 Isi *Sustainability Report***

Isi pelaporan *sustainability report* pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu :

1. Strategi dan Profil

Serangkaian konteks keseluruhan untuk memahami kinerja organisasi seperti strategi, profil, dan tata kelola (*governance*).

2. Pendekatan Manajemen

Pengungkapan yang mencakup bagaimana sebuah organisasi menghasilkan serangkaian topik dengan tujuan untuk menyediakan konteks pemahaman kinerja dalam wilayah yang spesifik.

3. Indikator Kinerja

Merupakan indikator yang mengungkap informasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dapat dibandingkan dalam sebuah organisasi.

#### **II.6 *Global Reporting Initiative (GRI)***

##### **II.6.1 Profil *Global Reporting Initiative (GRI)***

*Global Reporting Initiative* yang juga disingkat dengan GRI disusun pertama kali pada tahun 1997 oleh *The Boston-based Coalition on Environmentally Responsible Economies* (CERES) yang bekerjasama dengan *Tellus Institute*. Selama lebih dari lima tahun terakhir ini, GRI telah masuk dalam kriteria kerangka laporan dalam semua aspek perkembangan perusahaan. GRI tersedia sebagai sarana internal untuk mengevaluasi konsistensi kebijakan

sustainability perusahaan dan strategi yang digunakan, serta kegiatan aktual lainnya.

Pada bulan Maret 1999, GRI mengeluarkan *the Sustainability Reporting Guidelines* sebagai draft pembuka bagi tanggapan dan pengujian publik pada musim semi tahun 2000. Sebanyak dua puluh satu perusahaan dari seluruh dunia menjadi proyek percontohan bagi panduan tersebut. Dan ratusan *stakeholder* dari seluruh dunia menyediakan komentar yang substantive. Baru pada Juni 2000, GRI meluncurkan *the Sustainability Reporting Guidelines* yang telah diadopsi oleh kurang lebih seratus perusahaan di seluruh dunia.

Tujuan GRI diantaranya adalah untuk membantu para investor, pemerintah, perusahaan dan masyarakat umum untuk memahami lebih jelas mengenai proses peningkatan dalam pencapaian keberlanjutan (*sustainability*). Dalam dokumen ini, kerangka kerja secara umum digunakan sebagai cara untuk meningkatkan analisis relasi dan panduan dalam membuat keputusan. Sebagai contoh, panduan ini salah satunya menyarankan untuk membuat rangkuman pendekatan dalam pelaporan energi, dengan ketentuan diantaranya :

1. Ukuran yang digunakan dalam satuan energi total
2. Tipe-tipe indikasi yang luas (misalnya mengenai sumber primer) dan kegunaan energi tersebut
3. Inisiatif dan tujuan dalam mengambil sumber energi terbaru dan efisiensi energi

*The Global Reporting Initiative* (GRI) memiliki misi yang ambisius, yakni "untuk meningkatkan laporan secara berkelanjutan pada tingkat yang sama

dengan laporan keuangan melalui pengembangan kerangka laporan umum yang dapat diterima.” *The GRI Guidelines* tersebut ditujukan untuk pelaporan ekonomi, lingkungan dan sosial. Dalam waktu jangka panjang, *the GRI Sustainability Reporting Guidelines* diharapkan mampu untuk diaplikasikan oleh seluruh tipe organisasi. Kerja pengembangan GRI yang pertama difokuskan pada pelaporan oleh organisasi bisnis.

## **II.6.2 Orientasi Pelaporan GRI**

Semua dokumen kerangka pelaporan GRI dikembangkan menggunakan proses yang mencari kesepakatan melalui dialog antara *stakeholder* dari bisnis, komunitas investor, buruh, masyarakat sipil, akuntansi, kaum akademisi, dan lainnya. Semua dokumen kerangka kerja pelaporan ditujukan untuk menguji *continuous improvement*.

*The GRI Reporting Framework* bertujuan untuk melayani sebagai kerangka kerja yang diterima secara umum untuk melaporkan ekonomi, lingkungan, dan kinerja sosial organisasi *The GRI Reporting Framework* dirancang untuk digunakan oleh organisasi dengan beragam ukuran, sektor, atau lokasi. Hal ini dikarenakan pertimbangan praktis yang dihadapi oleh beragam batasan organisasi, dari perusahaan kecil hingga perusahaan yang luas dan operasi yang menyebar secara geografis.

*The Sustainability Reporting Guidelines* (pedoman) terdiri dari prinsip-prinsip yang mendefinisikan isi laporan dan memastikan kualitas informasi yang dilaporkan. Pedoman ini meliputi *Standard Disclosures* yang tersusun atas

indikator kinerja dan item pengungkapan lainnya, serta pedoman pada topik teknis khusus dalam pelaporan.

### **II.6.3 Orientasi GRI Guidelines**

*The Sustainability Reporting Guidelines* terdiri dari prinsip pelaporan, petunjuk pelaporan, dan pengungkapan standar (termasuk indikator kinerja). Elemen-elemen ini dipertimbangkan sama dalam bobot dan kepentingannya.

#### **Bagian 1 – Prinsip pelaporan**

Untuk membantu apa yang dilaporkan, bagian ini meliputi prinsip pelaporan materialitas, *stakeholder inclusiveness*, konteks *sustainability* dan kelengkapan, bersamaan dengan laporan singkat atas pengujian tiap-tiap prinsip. Aplikasi prinsip-prinsip ini dengan pengungkapan standar menentukan topik dan indikator yang dilaporkan. Hal ini diikuti dengan prinsip keseimbangan, perbandingan, ketelitian, ketepatan waktu, keandalan, dan kejelasan, bersamaan dengan pengujian yang dapat digunakan untuk membantu pencapaian kualitas yang tepat atas informasi yang dilaporkan. Bagian ini menyimpulkan penentuan batas entitas yang diwakili oleh laporan (juga disebut batas Laporan).

#### **Bagian 2 – Pengungkapan Standar**

Bagian ini terdiri dari pengungkapan standar yang seharusnya dimasukkan dalam *sustainability report*. Petunjuk tersebut mengidentifikasi informasi yang relevan

dan material untuk sebagian organisasi dan perhatian pada sebagian besar *stakeholder* untuk melaporkan 3 tipe pengungkapan standar :

- a. Strategi dan profil, mengungkapkan seperangkat teks menyeluruh untuk memahami kinerja organisasi seperti strategi, profil, dan kepemimpinan,
- b. Pendekatan manajemen, mengungkapkan bagaimana sebuah organisasi memperoleh seperangkat topik dalam menyediakan konteks untuk memahami kinerja di area khusus, dan
- c. Indikator kinerja, mengindikasikan informasi yang diperoleh dapat dibandingkan berdasarkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi.

#### **II.6.4 Penerapan Tingkat GRI**

Tingkat aplikasi menunjukkan bahwa sejauh pedoman telah diterapkan dalam pelaporan keberlanjutan. Tingkat aplikasi terdiri dari:

##### **a) Tingkat Aplikasi C**

Aplikasi tingkat C ditujukan untuk entry-level organisasi pelaporan. Satu set pengungkapan profil (1.1; 2,1-2,10; 3,1-3,8, 3,10-3,12; 4,1-4,4, 4,14-4,15) harus dilaporkan, tetapi tidak diperlukan untuk melaporkan Pengungkapan pada Pendekatan Manajemen (DMA). Persyaratan untuk aplikasi tingkat C adalah laporan terpenuhi setidaknya 10 indikator kinerja, baik inti atau tambahan, termasuk setidaknya satu dari masing-masing indikator ekonomi, indikator lingkungan, dan sosial. Indikator kinerja dari sektor suplemen dapat dimasukkan jika ada sektor suplemen terakhir dalam pelaporan setidaknya 10 (*core* atau

tambahan) indikator kinerja, dengan setidaknya tujuh dari Pedoman G3 asli atau G3.1.

b) Tingkat Aplikasi B

Tingkat aplikasi ini ditujukan untuk wartawan menengah. Persyaratan untuk aplikasi tingkat B adalah laporan terpenuhi semua pengungkapan profil (1,1-4,17) dan semua Pengungkapan pada Pendekatan Manajemen (DMA) setidaknya 20 Indikator Kinerja, baik inti atau tambahan, termasuk setidaknya satu dari setiap kategori indikator (ekonomi, lingkungan, praktik ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk). Indikator kinerja dari sektor suplemen dapat dimasukkan jika ada sektor suplemen terakhir dalam pelaporan setidaknya 20 (*core* atau tambahan) indikator kinerja, dengan setidaknya 14 dari Pedoman G3 asli atau G3.1.

c) Tingkat Aplikasi A

Tingkat ini ditujukan untuk organisasi laporan lanjutan. Organisasi-organisasi pelaporan diharapkan telah melaksanakan proses materialitas menyeluruh dalam konsultasi dengan pemangku kepentingan mereka. Akibatnya, wartawan ini mampu "melaporkan atau menjelaskan" untuk sepenuhnya. Persyaratan untuk tingkat ini harus melaporkan semua pengungkapan profil (1,1-4,17), mengatasi semua Pengungkapan pada Pendekatan Manajemen (DMA) untuk setiap aspek, dan semua indikator kinerja utama.

Jadi, ada tiga jenis tingkat aplikasi (C, B, A) yang menunjukkan kelas laporan keberlanjutan. Selain itu, laporan keberlanjutan yang telah eksternal meyakinkan, status tingkat aplikasi ditandai dengan status tanda "+". Penjelasan



tentang tingkat aplikasi dan persyaratan ini dibahas di atas diilustrasikan gambar berikut.

**Gambar II.3**  
**GRI Application Level**

Report Application Level		C	C+	B	B+	A	A+
Standard Disclosures	Profile Disclosures	Report on: 1.1 2.1 - 2.10 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15	Report Externally Assured	Report on all criteria listed for Level C plus: 1.2 3.9, 3.13 4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17	Report Externally Assured	Same as requirement for Level B	
	Disclosures on Management Approach	Not required		Management Approach Disclosures for each Indicator Category		Management Approach disclosed for each Indicator Category	
	Performance Indicators & Sector Supplement Performance Indicators	Report fully on a minimum of any 10 Performance Indicators, including at least one from each of: social, economic, and environment.**		Report fully on a minimum of any 20 Performance Indicators, at least one from each of: economic, environment, human rights, labor, society, product responsibility.***		Respond on each core and Sector Supplement* indicator with due regard to the materiality Principle by either: a) reporting on the indicator or b) explaining the reason for its omission	
						Report Externally Assured	

\* Sector supplement in final version  
 \*\* Performance Indicator may be selected from many finalized Sector Supplement, but 7 of the 10 must be from the original GRI Guidelines  
 \*\*\* Performance Indicators may be selected from any finalized Sector Supplement, but 14 of the 20 must be from the original GRI Guidelines

Sumber: <https://www.globalreporting.org/information/FAQs/Pages/Application-Levels.aspx>

## II.6.5 Indikator GRI

Indikator GRI terdiri dari indikator yang memperoleh informasi dibandingkan terhadap kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi. Pelaporan organisasi didorong untuk mengikuti struktur ini dalam menyusun laporan mereka, tetapi format lain dapat dipilih. Indikatornya antara lain:

- a. Indikator ekonomi menggambarkan aliran modal antara para pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomi utama dari organisasi seluruh masyarakat.
- b. Pada indikator lingkungan, kinerja yang terkait dengan input seperti bahan, energi, air dan output seperti emisi, limbah, dan limbah tertutup. Indikator ini juga mencakup kinerja yang terkait dengan keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi relevan lainnya seperti pengeluaran lingkungan dan dampak produk dan jasa. Aspek Indikator Lingkungan meliputi Material, Energi, Air, Keanekaragaman Hayati, Emisi, Efluen dan Limbah, Produk dan Layanan, Kepatuhan, Transportasi dan keseluruhan.
- c. Dimensi sosial keberlanjutan menyangkut dampak sebuah organisasi yang memiliki pada sistem sosial di mana ia beroperasi. Indikator GRI Kinerja Sosial mengidentifikasi kunci aspek kinerja sekitarnya praktek perburuhan, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Semua indikator yang dibahas di atas berfungsi sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja laporan keberlanjutan perusahaan.

**Tabel II.4**  
***Global Reporting Initiative Indicators***

Indikator-indikator Kinerja Ekonomi		
Aspek Kinerja Ekonomi	EC1	Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.
	EC2	Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.
	EC3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.
	EC4	Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.
Aspek Kehadiran Pasar	EC5	Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.
	EC6	Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.
	EC7	Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.
Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono.
	EC9	Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.
Indikator-indikator Kinerja Lingkungan		
Aspek Material	EN1	Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume
	EN2	Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang
Aspek Energi	EN3	Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer

	EN4	Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer
	EN5	Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi
	EN6	untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.
	EN7	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai
Aspek Air	EN8	Total pengambilan air per sumber
	EN9	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang
Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)	EN11	Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi
	EN12	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)
	EN13	Perlindungan dan Pemulihan Habitat
	EN14	Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati
	EN15	Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat

		di daerah-daerah yang terkena dampak operasi
Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah	EN16	Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat
	EN17	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat
	EN18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya
	EN19	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat
	EN20	NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat
	EN21	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan
	EN22	Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan
	EN23	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan
	EN24	Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.
	EN25	Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.
Aspek: Produk dan Jasa	EN26	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.
	EN27	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.
Aspek: Kepatuhan	EN28	Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan
Aspek: Pengangkutan/Transportasi	EN29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta

		material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.
Aspek: Menyeluruh	EN30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.
Indikator Kinerja Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak		
Aspek: Pekerjaan	LA1	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah, kondisi buruk berdasarkan jenis kelamin.
	LA2	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.
	LA3	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.
	LA15	Kembali ke pekerjaan dan tingkat retensi setelah cuti, berdasarkan jenis kelamin.
Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen	LA4	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.
	LA5	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.
Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan	LA6	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.
	LA7	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.
	LA8	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/ bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.

	LA9	Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.
Aspek: Pelatihan dan Pendidikan	LA10	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.
	LA11	Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.
	LA12	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.
Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara	LA13	Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.
Aspek: Remunerasi Sama Untuk Pria dan Wanita	LA14	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dengan laki-laki berdasarkan kategori karyawan, dengan lokasi operasi yang signifikan.
Indikator-indikator Hak Asasi Manusia		
Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan	HR1	Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.
	HR2	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM
	HR3	Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.
Aspek: Nondiskriminasi	HR4	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.
Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama	HR5	Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang

Berkumpul		signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
Aspek: Pekerja Anak	HR6	Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib	HR7	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.
Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan	HR8	Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi
Aspek: Hak Penduduk Asli	HR9	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.
Aspek: Penilaian	HR10	Persentase dan jumlah operasi yang telah tunduk pada ulasan-ulasan hak asasi manusia dan / atau dampak penilaian.
Aspek: Remediasi	HR11	Jumlah keluhan yang berkaitan dengan hak asasi manusia diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui jalur formal mekanisme pengaduan.
Indikator-Indikator Kinerja Masyarakat		
Aspek: Komunitas Lokal	S01	Persentase operasi dengan diimplementasikan keterlibatan masyarakat lokal, dampak penilaian, dan program pembangunan.
	SO9	Operasi dengan potensi yang signifikan atau aktual dampak negatif terhadap masyarakat setempat.
	SO10	Pencegahan dan mitigasi diimplementasikan dalam operasi dengan signifikan potensial atau aktual dampak negatif pada lokal masyarakat.
Aspek: Korupsi	S02	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki



		risiko terhadap korupsi.
	S03	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.
	S04	Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.
Aspek: Kebijakan Publik	S05	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.
	S06	Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.
Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing	S07	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.
Aspek: Kepatuhan	S08	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.
Indikator-indikator kinerja Tanggung Jawab Produk		
Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan		Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut
	PR2	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.
Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.
	PR4	Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.

	PR5	Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.
Aspek: Komunikasi Pemasaran	PR6	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan <i>voluntary codes</i> yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan <i>sponsorship</i> .
		Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.
Aspek: Keleluasaan Pribadi ( <i>privacy</i> ) Pelanggan		Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi ( <i>privacy</i> ) pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Aspek: Kepatuhan	PR9	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa

## II.7 Peraturan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sudah mulai diakui keberadaannya. Hal ini terbukti dari munculnya beberapa peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun organisasi khusus (misal Dewan Standar Akuntansi). Dengan adanya peraturan atau Undang-Undang ini diharapkan perusahaan di Indonesia dapat

menerapkan serta melaporkan kegiatan tanggung jawab sosialnya secara konsisten dan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang ada.

### **II.7.1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, kewajiban CSR bagi penanam modal di Indonesia diatur pada pasal 15, 16, dan 17.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

“Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 16 berbunyi :

“Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 17 berbunyi :

“Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

## **II.7.2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban CSR bagi perusahaan dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) diatur pada pasal 74.

Pasal 74 berbunyi :

- “(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

### **II.7.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang no.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) diterbitkan tgl 3 Oktober 2009, Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Undang-Undang ini dijelaskan antara lain tentang :

1. Kewajiban AMDAL dan UKL-UPL
2. Perizinan lingkungan
3. Instrumen ekonomi lingkungan hidup

4. Analisis risiko lingkungan hidup
5. Audit lingkungan
6. Dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup
7. Pengelolaan B3 dan limbah B3
8. Menaati baku mutu lingkungan dan baku kerusakan lingkungan
9. Tanggung jawab mutlak pelaku kegiatan
10. Sanksi (perdata, administratif dan pidana)

## **II.8 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Monalisa (2012) tentang *Analysis Of 2010 PT. Indosat Sustainability Report Based On Global Reporting Initiative (GRI)*, Penelitian yang dilakukan oleh Monalisa (2012) menggunakan objek perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi. Penelitiannya adalah kualitatif deskriptif dan menggunakan analisa konten sebagai teknik dalam menganalisa data. Hasil penelitiannya dalam persentase adalah PT Indosat Tbk memenuhi 28% indikator, and 6% indikator tambahan dan memenuhi standar 6% indikator inti dan 11% indikator tambahan. Dari analisisnya, laporan keberlanjutannya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan GRI. Penelitian lain dilakukan oleh Firmansyah (2012) tentang *Analisa implementasi dari Laporan Keberlanjutan Pada PT Timah, Tbk.* menggunakan objek perusahaan pertambangan di bidang industri timah. Metode penelitiannya adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik interpretative untuk mengukur tingkat pemenuhan standard dari laporan keberlanjutan pada PT

Timah Hasil dari penelitian adalah PT Timah telah melaporkan semua indikator yang direkomendasikan oleh *Global Reporting Initiative*. Perusahaan memenuhi sebagian standard sebesar 13 indikator inti dari 60 indikator utama dan 4 indikator tambahan dari 30 indikator tambahan dan memenuhi standard 47 indikator utama dari 60 indikator utama dan 26 indikator tambahan dari 30 indikator tambahan yang direkomendasikan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). PT Timah telah memenuhi 80 % indikator utama dan 86 % indikator tambahan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Sustainability Reporting Guidelines & Mining and Metals Sector Supplement Global Reporting Initiative version 3.1* yang mana merupakan standar yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai pedoman dalam pembuatan *sustainability report*, yang di khususkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang tambang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Mardalis (2010), penelitian deskriptif bertujuan untuk menedeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku.

#### **III.2 Jenis dan sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang disajikan dalam kata-kata yang mengandung makna. Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan paparan dari Moleong (2008), yang juga mengutip dari Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Masih mengacu pada literatur yang sama, penelitian kualitatif itu sendiri merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penulis mendapatkan data sekunder melalui media internet dari situs web perusahaan dan data yang telah dikumpulkan adalah laporan historis yang



telah menerbitkan laporan keberlanjutan, Peneliti mengambil sebuah laporan keberlanjutan 2011 karena itu adalah laporan keberlanjutan terbaru. Sumber data sekunder:

1. Publikasi Informasi - informasi diperoleh dari media elektronik dan seperti laporan tahunan PT. Prima Coal, Tbk. termasuk pelaporan keuangan dan pelaporan keberlanjutan.
2. Komputerisasi database. Informasi ini dari media internet online, pengembangan jaringan internet yang digunakan adalah untuk membantu mahasiswa dan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih mudah dan lebih cepat.

Data sekunder ini berupa dokumen tertulis, laporan-laporan, dan artikel-artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti laporan keuangan, standar operasional, dan prosedur. Data sekunder dalam penelitian ini adalah *sustainability report* PT. Kaltim Prima Coal, Tbk. tahun 2011.

### **III.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

### **III.3.1 Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan dan mengambil data dan catatan-catatan dan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan keperluan penelitian untuk kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan melalui *website* PT. Kaltim Prima Coal, Tbk.

### **III.3.2 Riset Pustaka (*Library Research*)**

Riset pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, baik berupa *text book*, atau karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, untuk memberikan landasan teoritis dalam melakukan penelitian.

### **III.4 Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan *Corporate Social Responsibility Report* PT.Kaltim Prima Coal (KPC), periode tahun 2011/2012. PT. Kaltim Prima Coal, Tbk. merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tambang, yang merupakan perusahaan pertambangan batubara terbesar di Indonesia, yang menerapkan *corporate social responsibility* secara berkelanjutan.

### III.5 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis tingkat kesesuaian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan laporan berkelanjutan, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus dengan analisis deskriptif. Menurut William (2008) dalam Sangadji (2010), penelitian studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuannya adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membaca dan menganalisis praktek tanggung jawab sosial yang telah dilakukan PT. Kaltim Prima Coal berdasarkan laporan berkelanjutan. Tahap ini memiliki beberapa tujuan, antara lain: mengetahui bagaimana perusahaan memandang konsep tanggung jawab sosial, mengetahui tema apa saja yang telah diungkapkan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Membuat suatu uraian terperinci mengenai pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam tahap ini, penulis mendeskripsikan data dan informasi yang telah diperoleh dalam proses sebelumnya.
3. Mengklasifikasikan *sustainability report* PT. Kaltim Prima Coal, Tbk tahun 2011 sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative* (GRI).

4. Membandingkan hasil klasifikasi dengan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) dan mengomentari hasil perbandingan.
5. Memberikan penilaian terhadap *sustainability report* PT. Kaltim Prima Coal, Tbk tahun 2011 berdasarkan Kriteria Level Aplikasi dari *Global Reporting Initiative* (GRI).
6. Melakukan perbandingan Corporate Social Responsibility tahun 2010 dengan tahun 2011 berdasarkan laporan berkelanjutan PT. Kaltim Prima Coal, Tbk dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan standar GRI.

Penilaian *sustainability report* PT. Kaltim Prima Coal, Tbk ini diukur melalui pemberian skor. Pemberian skor oleh penulis didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk masing-masing indikator performa. PT. Kaltim Prima Coal, Tbk.. Dalam GRI G3 terdapat 3 jenis penilaian yang dapat dilakukan pada sebuah *sustainability report*, yaitu :

1. *Self Declared*

Perusahaan memberikan penilaian sendiri terhadap *sustainability report* yang telah dibuat perusahaan.

2. *Third Party Checked*

Pihak ketiga berhak memberikan penilaian terhadap *sustainability report* yang telah dibuat perusahaan.

3. *GRI Checked*

GRI selaku pihak yang mengeluarkan GRI G3 juga berhak memberikan penilaian terhadap *sustainability report* yang telah dibuat perusahaan.

Adapun penilaian yang dilakukan penulis terhadap *sustainability development report* PT. Kaltim Prima Coal, Tbk termasuk dalam *Third Party Checked*, dimana penulis selaku pihak ketiga juga berhak memberikan penilaian terhadap *sustainability report* PT. Kaltim Prima Coal, Tbk berdasarkan GRI G3.1 khususnya *Sustainability Reporting Guidelines & Mining and Metals Sector Supplement RG Version 3.1 / MMSS Final Version*.

Dengan dipilihnya metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, maka penelitian ini hendak menggambarkan tentang pemenuhan *performance indicator sustainability report* dari PT. Kaltim Prima Coal, Tbk berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **IV.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Kaltim Prima Coal (KPC) berdiri sejak tahun 1982, sesuai dengan akta No. 28 tanggal 9 Maret 1982 dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sesuai dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/208/25 tanggal 16 Maret 1982. Pengesahan tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Juli 1982 No. 61 Tambahan Nomor 967.

KPC bergerak dalam bidang pertambangan dan pemasaran batubara untuk pelanggan industri baik ekspor maupun domestic. Sesuai dengan perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ditandatangani pada tanggal 8 April 1982, pemerintah memberikan izin kepada Perusahaan untuk melaksanakan eksplorasi, produksi dan memasarkan batubara dari wilayah perjanjian sampai dengan tahun 2021. Wilayah perjanjian PKP2B ini mencakup daerah seluas 90.938 Ha (D4KW96PB0363) dan berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur.

Pada awalnya, kepemilikan saham KPC dipegang oleh British Petroleum International Ltd (BP) dan Conzinc Rio Tinto of Australia Ltd (Rio Tinto). Saat ini berdasarkan Akta Notaris No. 3 Tanggal 18 Oktober 2005, perusahaan dimiliki oleh PT. Bumi Resources, Tbk. sebagai pemilik mayoritas. Selain itu sesuai dengan akta

notaris No. 34 tanggal 4 mei 2007, 30% saham lainnya dimiliki oleh Tata Mauritius Ltd.

Seluruh kegiatan operasional KPC berada dalam wilayah Indonesia. Wilayah operasi dan kantor pusat berlokasi di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan kantor-kantor perwakilan di Balikpapan, Samarinda, dan Jakarta. Didukung oleh 5187 orang karyawan, usaha focus pada pengelolaan areal pertambangan dengan luas lebih dari 90.000 Ha, memproduksi tiga jenis batu bara berkualitas dengan total cadangan sumber daya mencapai lebih dari 4,5 miliar ton yang dipasarkan kepada pelanggan dari berbagai sektor industri di pasar internasional (ekspor) maupun di Indonesia. Pada akhir tahun 2011, KPC mencatat total penjualan bersih sebesar US\$4.012 juta dari volume terjual sebesar 40,46 juta ton.

Pada tahap operasi produksi, sesuai dengan SK Penciutan Produksi No. 940.K/20.10/DjP/1999 tanggal 24 Desember 1989, perusahaan melaksanakan kegiatan operasional penambangan secara mandiri oleh divisi MOD, melalui kerja sama dengan beberapa kontraktor penambangan.

PT. Kaltim Prima Coal yang beralamat di *Mine Site Building*, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur Indonesia ini, memiliki total sumber daya mencapai lebih dari 4,5 miliar ton yang dipasarkan di pasa ekspor maupun dalam negeri dan memproduksi tiga jenis batu bara berkualitas.

## **IV.2. Visi dan Misi Perusahaan**

PT. Kaltim Prima Coal tidak hanya ingin menjadi perusahaan tambang batu bara, dengan semangat dan motto “*More Than Mining*”, Perusahaan ingin menjadi perusahaan yang tidak hanya mampu menghasilkan produk batu bara yang bermutu dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan, tapi juga mampu memberikan mamfaat positif bagi produk lokal, habitat lingkungan, bangsa Indonesia dan masyarakat dunia. Hal tersebut diwujudkan dengan cara:

1. Menerapkan praktek tata kelola secara berkelanjutan
2. Memberikan daya bagi industri dan rumah tangga
3. Bersikap peduli terhadap manusia dan lingkungan
4. Mentransformasikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar
5. Melakukan perbaikan berkesinambungan

### **IV.2.1 Visi dari PT. KPC, Tbk.**

Produsen batubara terkemuka Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dunia yang memberikan nilai optimal bagi semua pemangku kepentingan

### **IV.2.2 Misi Perusahaan**

- a) Memupuk budaya yang mengutamakan kesehatan, keselamatan dan lingkungan dalam segala tindakan:
  1. Mematuhi peraturan perundangan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang berlaku.



2. Berupaya tanpa henti mempromosikan budaya praktek terbaik dalam pengelolaan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.
- b) Memelihara tatakelola perusahaan yang baik dan mempromosikan perusahaan sebagai warga yang baik:
1. Melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, tanggung-gugat, tanggung-jawab, integritas, dan keadilan.
  2. Peka terhadap falsafah bangsa dalam kehidupan sehari-hari.
- c) Menyediakan lingkungan belajar untuk mencapai keunggulan dan meningkatkan kesejahteraan.
1. Mendorong pemberdayaan karyawan.
  2. Memberikan pengakuan dan penghargaan atas kinerja yang unggul.
  3. Mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan dinamis.
- d) Mengoptimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan:
1. Memaksimalkan pengembalian investasi pemegang saham.
  2. Memastikan para mitra diakui dan didorong memberikan pencapaian lebih tinggi.
  3. Mendorong terciptanya rasa memiliki, semangat kemitraan dan dukungan masyarakat terhadap operasi KPC.
  4. Menunjukkan kepemimpinan dalam pengelolaan risiko para pemangku kepentingan.
- e) Menyelenggarakan praktik pengelolaan dan operasi terbaik untuk menghasilkan produk dan kinerja berkualitas tinggi secara konsisten:

1. Terus-menerus berupaya menjadi produsen batu bara yang efisien.
2. Meminimalkan kerugian.
3. Memupuk budaya perbaikan berkesinambungan.

#### **IV.2.3 Nilai**

1. Keunggulan
2. Integritas
3. Transparansi
4. Kegesitan
5. Pemberdayaan
6. Kerjasama
7. Kepedulian

Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusianya, keunggulan produk atau jasa yang dijual, jaringan, dan teknologi yang unggul guna mendukung *operational excellence*. Komponen tersebut bukanlah penentu yang menjadi kunci keberhasilan suatu bisnis. Faktor pendorong yang sesungguhnya terletak pada kekuatan visi dan misi serta nilai-nilai yang menjadi sumber inspirasi dan energi budaya kerja perusahaan.

### IV.3 Struktur Organisasi

KPC memiliki Dewan Komisaris dan Direksi yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan satu tahun sekali secara berkala. Pada tahun ini seperti halnya tahun sebelumnya, KPC tidak memiliki anggota komisaris independen.

Kinerja operasional perusahaan dipertanggungjawabkan di forum RUPS ini. Begitu juga dengan kompensasi termasuk bonus yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan yang sepenuhnya ditentukan kinerja dan pencapaian. Melalui RUPS ini pula, para pemegang saham berdiskusi dan bermusyawarah dalam pengambilan segala keputusan, risiko-risiko yang mungkin dihadapi, peluang usaha dan penentuan arah strategis perusahaan.

Selain RUPS, Dewan Komisari dan Direksi tersebut, KPC memiliki *Executive Committee* yang beranggotakan *Chief Executive Officer* (CEO), *Chief Operating Officer* (COO), *Chief Financial Officer* (CFO) dan seluruh *General Manager*. *Executive Committee* ini melakukan pengawasan rutin terhadap seluruh aspek terkait kegiatan operasional tambang, termasuk perencanaan, status saat itu, kebijakan serta hal-hal penting lain, untuk pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan di masa mendatang. Melalui forum rapat ini, KPC juga mengevaluasi seluruh kinerja Perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, meninjau ketaatan terhadap aturan yang berlaku, menetapkan risiko yang harus segera ditangani dan memanfaatkan peluang yang dapat diraih. Pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan dalam RUPS. Dewan Komisaris dan Direksi dipilih berdasarkan kompetensi, yakni pengalaman kerja, pendidikan dan keahlian. Selanjutnya, untuk

meningkatkan dan mengasah kompetensi, program pelatihan dan pengembangan yang difasilitasi oleh divisi Human Resource juga memberikan pelatihan-pelatihan terkait konsep keberlanjutan, *Sustainable Development* dan keseimbangan pembangunan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan (*triple bottom line*) di samping pelatihan teknis dan opsional kepada jajaran manajemen puncak KPC.

#### **IV.4 Kegiatan Usaha PT. Kaltim Prima Coal Tbk.**

Produksi batubara KPC terdiri dari beberapa klasifikasi kelas berdasarkan kualitas, yakni batubara Prima, Pinang dan Melawan. Batubara Prima adalah kategori batubara kelas terbaik yang bermutu tinggi. Batubara Pinang terbagi menjadi beberapa spesifikasi berdasarkan nilai kalori. Sedangkan Batubara Melawan adalah jenis batubara bernilai kalori di bawah jenis Pinang dan Prima.

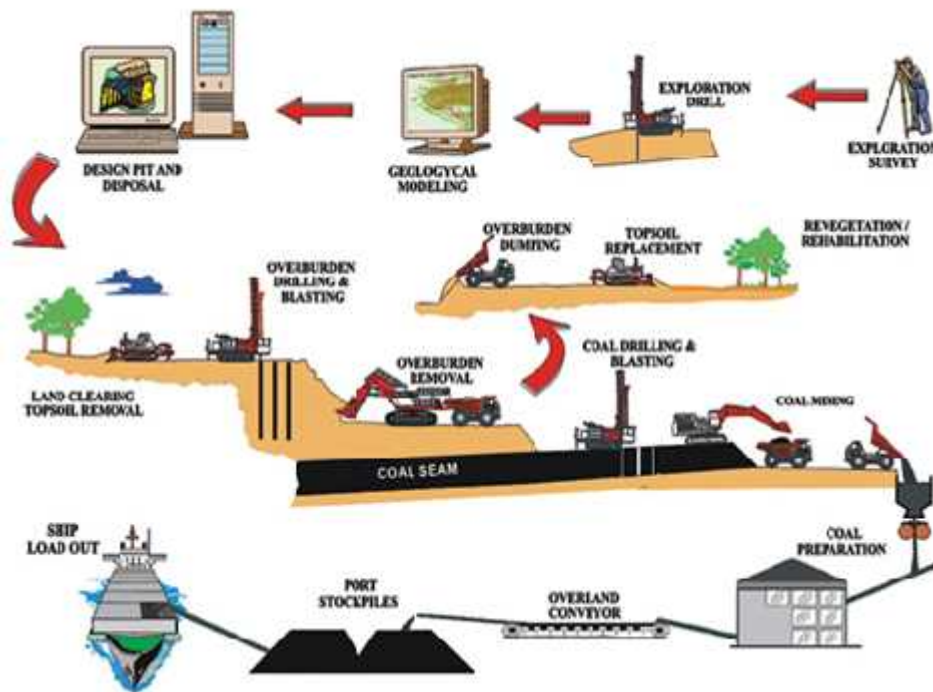
Batubara Prima termasuk salah satu batubara bermutu tinggi yang diperdagangkan di pasar internasional. Batubara ini merupakan batubara bitumen yang sangat mudah menguap dengan nilai kalori tinggi, kandungan abu sangat rendah, kandungan sulfur sedang, dan total kelembaban relatif rendah. Batubara Prima juga merupakan salah satu jenis batubara yang mengkilat dengan kandungan *Vitrinite* yang tinggi.

Batubara Pinang sejenis dengan Batubara Prima, namun jenis ini memiliki kadar kelembaban lebih tinggi dan kandungan kalori lebih rendah. Sementara itu, Batubara Melawan merupakan jenis batubara sub-bitumin yang sangat bersih dengan kandungan sulfur dan abu sangat rendah. Batubara Prima dan Melawan

diproduksi di pit Sangatta, sedangkan Batubara Pinang dihasilkan di pit Sangatta dan pit Bengalon.

Di tahun 2011, total penjualan batubara KPC mencapai 40.463.986 ton, terdiri dari batubara Pinang 50%, Melawan 49% dan 1% batubara Prima. Pada tahun 2011, mayoritas penjualan perusahaan dikontribusikan oleh pelanggan-pelanggan di negara Jepang, India, Cina, Indonesia, Taiwan, Filipina dan beberapa negara lainnya.

**Gambar IV.2**  
**Bagan Alur Operasi PT. Kaltim Prima Coal**



Sumber: Laporan Pembangunan Berkelanjutan 2010. PT. Kaltim Prima Coal, Tbk.

Secara garis besar, operasi penambangan perusahaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tahap persiapan penambangan, penambangan, dan pasca penambangan.

Tahap persiapan penambangan diawali dengan kegiatan survei eksplorasi. Kegiatan eksplorasi ini meliputi pemetaan lapangan, pengukuran struktur geologi, pengambilan sampel singkapan, pemboran eksplorasi, *logging* geofisika, dan penaksiran cadangan. Selanjutnya dilakukan pemodelan geologi dengan menggunakan *software* tambang (*Minex Software 4.1-G*) untuk melakukan perhitungan cadangan dan diikuti pembuatan rencana penambangan. Pada tahun 2010, perusahaan juga dalam proses transisi menggunakan *software* tambang terbaru *Minex Software 6*.

Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan cadangan secara lebih detil dengan melibatkan analisis ekonomi menggunakan *Minex Software* versi 4.1 G yang untuk membuat desain pit, timbunan tanah penutup, jalan tambang dan system *Drainase* yang optimal untuk merencanakan tahapan penambangan yang memberikan gambaran volume tanah penutup yang akan dipindahkan dan produksi batubara yang diperoleh. Pada tahap ini juga dihitung jumlah tanah pucuk yang dipindahkan, rencana area rehabilitasi dan jumlah peralatan tambang yang diperlukan. Berikutnya masuk ke tahap penambangan atau tahap produksi.

Tahap produksi diawali dengan kegiatan penebangan dan pemotongan pohon serta pemindahan tanah pucuk, didahului dengan kegiatan identifikasi dan dokumentasi flora dan fauna yang ada di daerah tersebut. Beberapa jenis spesies tanaman penting dikoleksi sebagai bibit tanaman bagi kegiatan rehabilitasi nanti. Tanah pucuk dipindahkan ke lokasi penyimpanan yang sudah disiapkan atau bisa langsung digunakan untuk rehabilitasi area timbunan yang sudah permanen. Setelah

melalui tahap penebangan pohon dan pemindahan tanah pucuk, selanjutnya dilakukan pemboran dan peledakan tanah penutup.

Tanah penutup yang sudah diledakkan kemudian dimuat oleh *shovel* dan *backhoe* lalu diangkut oleh truk untuk ditimbun di lokasi timbunan yang sudah direncanakan. Tanah penutup yang mengandung asam/PAF (*Potential Acid Forming*) ditimbun terpisah dari tanah yang tidak mengandung asam/NAF (*Non Acid Forming*) di lokasi yang sudah direncanakan. Tanah penutup dengan kategori NAF ditimbun di lokasi timbunan yang sudah permanen dan dilakukan rehabilitasi sementara tanah penutup dengan kategori PAF ditimbun di lokasi timbunan sementara. Proses ini dilakukan dengan menggunakan kontrol sistem elektronik (sistem *Dispatch*).

Setelah tanah penutup dipindahkan, batubara yang sudah terbuka ditambang menggunakan alat muat khusus batubara. Batubara kemudian diangkut oleh truk langsung menuju lokasi peremukan (*crusher*) atau ditimbun sementara di lokasi penyimpanan batubara (*stockpile* batubara) sesuai dengan kualitas batubara. Di lokasi *crusher*, batubara ditumbuk sesuai ukuran yang sudah ditetapkan, dilanjutkan proses pencucian untuk batubara kotor. Batubara yang sudah mengalami pengecilan ukuran dan siap jual selanjutnya diangkut menggunakan ban berjalan (*belt conveyor*) menuju ke lokasi timbunan batubara di pelabuhan Tanjung Bara (*Coal terminal*). Seiring dengan peningkatan produksi, pengangkutan batubara juga menggunakan *coal trucking* dari *stockpile* batubara di CPP ke *stockpile* batubara di *Port stockpile* dengan jumlah yang terbatas. Batubara siap jual selanjutnya dimuat ke dalam kapal untuk dikirim ke para pelanggan (*customer*). Setelah proses penambangan selesai, lalu



melakukan reklamasi terhadap area bekas penambangan. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan, perusahaan Kaltim Prima Coal memiliki program rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan lahan ke kondisi aman, stabil, dan produktif. Rehabilitasi dilakukan secara bertahap. Program rehabilitasi meliputi perencanaan, penempatan batuan penutup, pembentukan akhir, penempatan tanah pucuk, pembangunan sarana pengendali air (*drainage*), penanaman, perawatan, dan pemantauan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **V.1 Informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang Diungkapkan PT. Kaltim Prima Coal dalam Laporan Berkelanjutan PT. Kaltim Prima Coal.**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sesuatu yang penting dalam perusahaan, apa lagi perusahaan pertambangan yang akan banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar areal pertambangan. Begitu juga dengan perusahaan Kaltim Prima Coal (KPC), yang sangat mementingkan CSR didalam setiap aktivitasnya. Dalam laporan berkelanjutan tertuang seluruh kegiatan operasional perusahaan tahun yang bersangkutan. Pada laporan berkelanjutan ini, menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Yaitu pemerintah, pemasok, pelanggan, investor, dan tidak terkecuali masyarakat sekitar daerah operasional perusahaan, yang secara langsung atau tidak langsung akan mendapatkan dampak dari proses kegiatan produksi ataupun kegiatan operasional perusahaan.

Laporan Keberlanjutan merupakan praktek pengukuran penjelasan, dan menjadikan akuntabel terhadap kinerja organisasi sambil bekerja menuju tujuan pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*). Sebuah laporan keberlanjutan memberikan gambaran yang seimbang dan wajar terhadap kinerja keberlanjutan dari organisasi pelapor, termasuk kontribusi positif dan negatif.

Untuk mengungkapkan tanggung jawab perusahaan (CSR), laporan berkelanjutan akan di analisis berdasarkan standar GRI G3 khususnya *Sustainability Reporting Guidelines & Mining and Metals Sector Supplement RG Version 3.1 / MMSS Final Version*. Pada penelitian ini laporan berkelanjutan adalah laporan tahun 2011, karena untuk tahun 2012 dan 2013 belum dipublikasi.

#### **V.1.1 Menghormati Masyarakat Tetangga**

Berbagai program pengembangan masyarakat (*community development*) sebagai bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan yang senantiasa melekat pada setiap usaha yang dijalani Kaltim Prima Coal (KPC). Perusahaan ingin tumbuh bersama masyarakat sekitar dengan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya melalui setiap aktivitas yang di lakukan yang di wujudkan melalui kegiatan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility/CSR*) KPC yang mencakup dan dilakukan di seluruh (100%) wilayah operasi. Komitmen KPC dalam menjalankan kegiatan CSR yang memadukan kepentingan ekonomi (*profit*) dengan kepentingan sosial (*people*) dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) pada operasional bisnisnya, diyakini akan memberikan kontribusi dan nilai tambah positif bagi pertumbuhan perusahaan KPC yang berkelanjutan serta menempatkannya dalam jajaran warga korporasi yang memiliki reputasi dan tata kelola perusahaan yang baik.

Program pengembangan masyarakat KPC terdiri dari 7 bidang program, yaitu: Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kesehatan Masyarakat,

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Peningkatan Infrastruktur, Pelestarian Alam dan Budaya, dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah. Ketujuh bidang program ini memiliki tujuan-tujuan utama yaitu:

1. Mencapai sinergi dengan *grand strategy* pemerintah baik lokal, regional maupun nasional.
2. Memenuhi kebutuhan masyarakat (mulai dari sekitar tambang, Kutai Timur hingga Kalimantan Timur).
3. Menjalin hubungan masyarakat yang saling bemanfaat (mulai dari tingkat desa hingga pusat).
4. Ikut mendukung pencapaian *Millennium Development Goals (MDGS)*
5. Memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
6. Amanat perusahaan yang sesuai dengan arah Rencana Pasca Tambang (RPT).

Penentuan dan pelaksanaannya program pengembangan masyarakat dibuat berdasarkan usulan masyarakat, rekomendasi pemerintah dan studi observasi yang dilakukan oleh KPC.

Dengan begitu diharapkan bisa terbentuk sinergi antara kebutuhan masyarakat, program pemerintah dengan program pengembangan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang lingkup pengerjaannya mencakup proses transfer ilmu dan pengetahuan kepada kelompok penerima manfaat hingga pemberian stimulan serta pendampingan berkala oleh

para personil yang ahli di bidangnya. Pada akhirnya, semua kegiatan pengembangan masyarakat yang KPC lakukan bertujuan untuk mewujudkan visi dari program pengembangan masyarakat KPC yaitu menjadi mitra dalam Pembangunan Berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas. Visi tersebut bisa terwujud bila serangkaian misi KPC diterapkan secara maksimal dengan cara :

1. Menjalin hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip saling percaya dan saling menghormati;
2. Mendorong pertumbuhan perekonomian lokal yang saling menguntungkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera;
3. Menjaga tatanan masyarakat dengan memelihara kelestarian alam dan budaya.

Visi, misi dan Komitmen Pengembangan Masyarakat merupakan bagian penting dari Rencana Perusahaan untuk mendukung peningkatan produksi menjadi 70 juta ton/tahun di tahun 2014 yang telah disetujui melalui Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 660.5/K.205/2011.

Seiring dengan hal tersebut, maka untuk menunjang peningkatan produksi di tahun 2014 tersebut, KPC telah melaksanakan serangkaian proyek ekspansi dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip penambangan yang baik (*good mining practices*), yang selaras dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peningkatan produksi tersebut tentunya di jalankan berdasarkan hasil studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang bertujuan

mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif. Perusahaan senantiasa menghormati hak-hak penduduk setempat di wilayah beroperasi, sehingga selama periode pelaporan tidak pernah terjadi insiden ataupun kekerasan yang dilakukan oleh KPC terhadap masyarakat di sekitar operasi tambang perusahaan. Pendekatan persuasif dan komunikasi dua arah yang rutin dan efektif selalu dikedepankan dalam membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat tetangga.

Pendekatan ini diperkuat oleh berbagai program kemasyarakatan yang diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Melalui visi dan misi di atas, *Divisi External Affairs* dan *Sustainable Development*, mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan tambang KPC. Dampak negatif maupun positif dalam aspek sosial menjadi landasan berbagai program pengembangan masyarakat yang dilakukan. Dalam pelaksanaan program tersebut, perusahaan juga mengacu kepada prinsip *Triple Bottom Line* yaitu Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan.

#### **V.1.2 Membina Hubungan yang Berkelanjutan dengan Para Penerima Manfaat**

Program Pemberdayaan Masyarakat Kemitraan Menuju Kemandirian merupakan semangat yang selalu mewarnai semua program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, sehingga keterlibatan dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam semua proses kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kemandirian masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktivitas tambang PT. Kaltim Prima Coal (KPC), di wujudkan dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada melalui tujuh bidang program pemberdayaan masyarakat KPC.

Selain isu lokal (desa dan kecamatan) dan regional (kabupaten), program pemberdayaan masyarakat juga memperhatikan berbagai isu nasional dan internasional sebagai acuan dalam membangun sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

KPC juga bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, konsultan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga donor internasional dan lainnya baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif. KPC berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat sebesar US\$5 juta per tahun. Di tahun 2011 ini, realisasi komitmen kontribusi KPC adalah sebesar US\$5,53 juta. Di samping itu, tambahan dana kontribusi sebesar US\$674,8 ribu telah dialokasikan untuk penyelesaian proyek pembangunan jalan Soekarno-Hatta dan RSUD Sangatta. Sehingga total realisasi dana kontribusi untuk pengembangan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di tahun 2011 adalah sebesar US\$6,2 juta.

### **V.1.3 Forum Multi Stakeholder For Corporate Social Responsibility (FMSH For CSR)**

Sebagai anggota aktif dari forum FMSH for CSR, PT. Kaltim Prima Coal aktif dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat. Forum ini

dibentuk oleh Bupati Kutai Timur pada tahun 2006 melalui SK Bupati nomor 71/02.188.45/HK/III/2006. Forum ini di gunakan sebagai wadah untuk memaksimalkan cara pengelolaan komitmen KPC terkait dana program untuk pengembangan masyarakat secara kemitraan dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Pengelolaan forum ini juga diikuti dengan pertemuan rutin antara pihak KPC dengan anggota sekretariat forum untuk mendiskusikan perencanaan program, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi program. Selain itu, kontribusi lainnya yang disalurkan melalui forum ini adalah berupa pedoman kebijakan, prosedur kerja serta kontrol program atau proyek yang maksimal. Setiap bulan, tim Forum FMSH for CSR bertugas melakukan pemantauan untuk melihat seberapa jauh perkembangan program yang telah berjalan. Selain itu, mekanisme ini juga memberi arahan bagi KPC untuk memastikan bahwa dana bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai kepentingannya. Selama tahun 2011, KPC bekerja sama dengan FMSH for CSR melakukan kegiatan evaluasi kinerja forum dalam periode lima tahun terakhir melalui rapat kerja dan rapat koordinasi, yang turut melibatkan perusahaan-perusahaan anggota forum lainnya.

#### **V.1.4 Wujud Kepedulian KPC Dalam Mencapai Pengembangan Masyarakat Yang Berkelanjutan**

##### **V.1.4.1 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi (SO1)**

KPC melaksanakan berbagai program peningkatan kesehatan masyarakat sebagai partisipasi perusahaan dalam mendukung penanggulangan



penyakit menular, meningkatkan gizi dan kualitas kesehatan masyarakat serta meningkatkan kesadaran penjagaan kesehatan di masyarakat. Beberapa program yang di lakukan mencakup:

1. Program pencegahan penyakit menular seperti HIV/ AIDS, TBC dan demam berdarah.
2. Program edukasi dan rehabilitasi kesehatan gizi anak balita.
3. Bantuan operasi bibir sumbing (program Senyum dan Harapan) dan pengobatan luka bakar. Sampai dengan akhir 2011, telah dilaksanakan operasi bibir sumbing dan pengobatan luka bakar untuk 1.276 orang.
4. Pelaksanaan operasi katarak dan pengobatan gratis serta penyuluhan kesehatan ke masyarakat melalui sarana media radio FM.
5. Donor darah dengan melibatkan karyawan dan kontraktor Perusahaan.

#### **V.1.4.2 Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM)**

KPC mendukung upaya pengembangan KUKM melalui pelaksanaan berbagai program terkait, mencakup:

1. Pelatihan, pendampingan dan pengembangan pelaku usaha UKM.
2. Pelaksanaan Program AKU BISA, yakni pemberdayaan masyarakat lokal yang putus sekolah melalui pemberian latihan ketrampilan dasar mekanik sepeda motor.

3. Pemberdayaan kontraktor lokal melalui partisipasi kontraktor lokal dalam pembangunan infrastruktur disertai penerapan standar keamanan dan pelatihan peningkatan kompetensi.

#### **V.1.4.3 Pengembangan agribisnis**

KPC turut mendorong tumbuhnya usaha masyarakat setempat yang berbasis pertanian dengan produk-produk mencakup jeruk, kakao, durian, sayuran sagu, padi, dan sebagainya, melalui pelaksanaan program Gerdabangagri. Program ini dijalankan guna mendukung upaya peningkatan produktivitas desa melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan pengolahan pasca panen dan perluasan pemasaran produk pertanian dan perkebunan. Beberapa program pengembangan agribisnis yang menjadi program andalan di antaranya:

1. Pengembangan perikanan air tawar.
2. Pengembangan komoditas perkebunan kakao, karet; Pengembangan komoditas pertanian jeruk; durian, tanaman semusim-Program Pelestarian Plasma Nutfah dan Pertanian Berkelanjutan di Bumi Pelatihan dan Percontohan Usaha Tani Konservasi (BPPUTK).
3. Peningkatan produktivitas padi dengan mengenalkan metode *System of Rice Intensification* (SRI) dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah.
4. Pengembangan Peternakan Sapi Terpadu (PESAT) yang berkapasitas 110 ekor sapi di lahan bekas tambang seluas 22 ha dalam rangka mendukung swasembada daging nasional dan pembangunan daerah berbasis agribisnis. Desain fasilitas berhasil mendapatkan *Best Winner* untuk kategori *Tropical*

*Building* dalam ajang *The Fifth ASEAN Energy Award* pada akhir tahun 2011.

#### **V.1.4.4 Program Pelestarian Alam dan Budaya**

KPC melaksanakan beberapa program peningkatan partisipasi masyarakat desa untuk menjaga pelestarian alam dan mengembangkan keanekaragaman budaya setempat. Melalui pilar ini, perusahaan juga ingin membangun kesadaran masyarakat sejak dini mengenai konsep keberlanjutan dan pentingnya efisiensi energi, serta konservasi lingkungan hidup. Sepanjang tahun 2011, BPPUTK telah mengakomodir sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan sekolah tinggi di area Kutai Timur untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan wawasan terhadap lingkungan.

Beberapa program lain yang KPC laksanakan sepanjang tahun 2011 di antaranya mencakup:

1. Program Gerak Bersemi dan Kampung Bersemi
2. Pelestarian Hutan di Taman Nasional Kutai (TNK) dan Pengembangan Ekowisata
3. Dukungan untuk Hutan Lindung Wehea
4. Keikutsertaan dalam Program Pemerintah *Kaltim Green*
5. Konservasi Budaya Masyarakat Dayak Basap

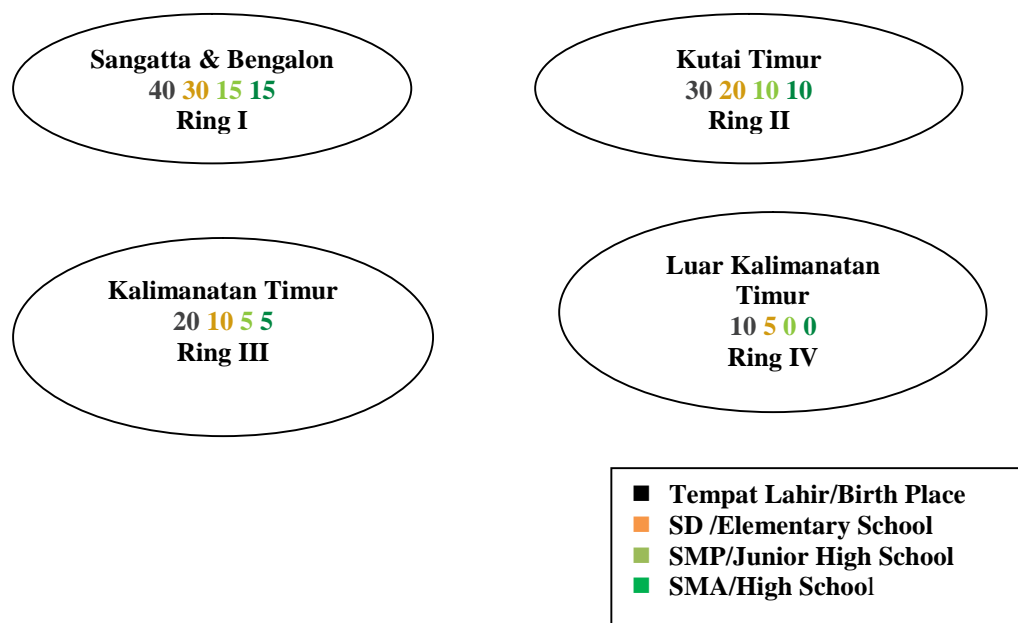
#### V.1.4.5 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan

Program peningkatan pendidikan dan pelatihan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan masyarakat sekitar tambang. Aktivitas dari program pendidikan dan pelatihan masyarakat ini mencakup:

1. Pembangunan infrastruktur pendidikan;
2. Bantuan beasiswa untuk pendidikan tingkat SMP, SMA, S1, S2 dan S3;  
Jumlah paket beasiswa yang telah diberikan sampai dengan akhir tahun 2011 (2005–2011, sejak program beasiswa digulirkan) adalah 1.461 paket beasiswa parsial dan 29 paket beasiswa penuh.
3. Prestasi Junior Indonesia (PJI) yang bertujuan untuk menumbuhkan kewirausahaan di kalangan pelajar;
4. Uji Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
5. Pelatihan guru dan pemberian insentif guru di sekolah terpencil;
6. Program pelatihan dan magang untuk *mechanic* dan operator *trainee*.

Selain program-program pelatihan dan pengembangan di atas, KPC juga menyelenggarakan program pelatihan dan magang, khususnya bagi putra daerah wilayah sekitar tambang. Program ini diprioritaskan untuk putra daerah Sangatta, Bengalon, Kutai Timur, dan Kalimantan Timur. Program ini mengacu kepada Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur nomor: 562/973-PLK/Disnaker/VII/2005 yang mengatur sistem penerimaan berdasarkan *Scoring System*. Kandidat dengan skor tertinggi akan mendapatkan prioritas utama untuk melanjutkan seleksi.

**Gambar V.1**  
**Sistem Pemilihan Peserta Program Pelatihan dan Rekrutmen**



Sumber: Sustainability Report PT. KPC. 2011

#### **V.1.4.6 Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Masyarakat**

KPC membantu pelaksanaan program pembangunan dan perbaikan infrastruktur dengan membangun berbagai sarana infrastruktur yang memadai terutama bagi masyarakat di empat kecamatan sekitar area operasi tambang , yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon dan Rantau Pulung. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan pembangunan ekonomi lokal serta memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat.

Peningkatan infrastruktur secara cukup signifikan dilakukan diberbagai wilayah kecamatan dan desa di Bengalon. Perencanaan program disusun bersama dengan para pemangku kepentingan di tingkat desa dan kecamatan sehingga menghasilkan program yang dibutuhkan warga masyarakat

setempat. Sepanjang tahun 2011, program peningkatan infrastruktur tersebut mencapai nilai US\$ 1 juta meliputi pembangunan kantor, desa, jalan raya, jembatan, listrik, fasilitas air dan lansekap. Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang telah diselesaikan di tahun 2011 mencakup, perbaikan jembatan *Steel Girder* di Sungai Aji Sepaso Induk sepanjang 15 m dan lebar 5 m; perbaikan betonisasi jalan di Desa Tepian Indah sepanjang 300 m dan lebar 4 m; pembangunan tahap 1 gedung serbaguna di Sepaso Timur seluas 19x39,2m di wilayah Kecamatan Bengalonl dan pembuatan pagar pengaman patung Burung Enggang Sangatta untuk meningkatkan fasilitas perkotaan.

Di luar peningkatan infrastruktur masyarakat, KPC juga menyelesaikan pembangunan RSUD tahap 2 (dua) dan melakukan serah terima pengelolaan RSUD kepada Pemkab Kutai Timur, serta perawatan jalan Soekarno Hatta jalur 1. Dukungan utama KPC kepada masyarakat sekitar tambang yang cukup signifikan pada tahun 2011 adalah dukungan kelistrikan di Kecamatan Bengalon (1,3 MW), Rantau Pulung (2x150 KVA) dan Sangatta (1,3 MW dan 265 KVA). Selain itu, KPC juga melakukan Pembangunan instalasi air bersih 2011 adalah Perumahan Griya Prima Lestari (GPL), Munte, luas lokasi 4987m<sup>2</sup>. Memberikan manfaat bagi 507 rumah bantuan modifikasi bangunan *pre-sedimentation* PDAM dan penambahan bahan kimia untuk perbaikan kualitas air baku dan memperbaiki genset 500 KVA, Instalasi air bersih di Desa Singagewe Instalasi air bersih Desa Masabang.

Seluruh pembangunan dan perbaikan infrastruktur instalasi air bersih tersebut dilakukan agar masyarakat sekitar lokasi penambangan dapat menikmati

sarana dan prasarana yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta menjaga kualitas kesehatan sehingga pada akhirnya meningkatkan kegiatan-kegiatan yang produktif.

Dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama para karyawan dan masyarakat, KPC berkontribusi dalam perbaikan beberapa fasilitas ibadah di antaranya, Masjid Al Falah Sangatta, Masjid At Taqwa Teluk Lina, Masjid Sepaso Selatan, Musholla Miftahur Razaq Kaliorang, Gereja Kerapatan Pantekosta Sangatta, Gereja Kerapatan Evangelis Sangatta, dan Gereja GPDI Elsada Rantau Pulung dan juga membantu perayaan hari besar keagamaan melalui penyediaan fasilitas dan dalam bentuk donasi, serta izin meninggalkan tempat kerja pada hari-hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### **V.1.4.7 Penguatan Kapasitas Pemerintahan & Kelembagaan Masyarakat Desa Mandiri**

KPC bekerja sama dengan Bappeda, pemerintah desa dan kecamatan serta pihak multi-stakeholder untuk melakukan program pilot *project* Desa Mandiri di empat kecamatan ring-1. Selain itu, untuk menentukan arah pembangunan desa dan membantu penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), KPC juga KPC juga melakukan pendampingan bekerja sama dengan GAPURA dan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta. Program ini mengacu pada UU no 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan PP no 72 tahun 2005 Tentang Desa. Program Desa Mandiri yang dilaksanakan di tahun 2011 adalah:

1. Pendampingan perancangan program Desa Sepaso Selatan Mandiri Pangan.
2. Pendampingan perancangan program Desa Rantau Makmur Mandiri Berbasis Agribisnis.
3. Pendampingan penyusunan Profil Desa dengan cakupan 4 desa pilot project di dalam wilayah Ring-1, yakni kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon dan Rantau Pulung.
4. Fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2010-2011 untuk semua desa dalam wilayah 4 kecamatan Ring-1 Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun 2011.
5. Fasilitasi musyawarah rencana pembangunan kecamatan (Musrenbang) tahun 2011.

Seiring dengan tujuan KPC untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta untuk menggerakkan roda ekonomi mandiri masyarakat setempat, KPC mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) melalui pelatihan dan pendampingan. Kegiatan ini mengacu pada UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa, PP 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri no 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Bupati Kutai Timur no.12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Selama tahun 2011 ini, perusahaan telah melaksanakan pelatihan Bumdes di seluruh desa



dalam wilayah 4 kecamatan Ring-1. Hingga akhir 2011, dua Bumdes sudah berhasil diterapkan di Kecamatan Rantau Pulung, dua desa masih dalam proses pembentukan dan delapan desa sedang dalam proses persiapan.

#### **V.1.5 Penanganan Keluhan Masyarakat Dan Komunikasi Eksternal**

Sesuai amanat AMDAL 2010, keluhan masyarakat akibat aktivitas tambang perlu di kelola dengan baik. Pemantauan keluhan masyarakat yang kritikal di lakukan melalui sistem umpan balik (*community feedback system*). Sistem ini kami lakukan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) ESDMS/DOC/SOP/ESD/CFS/002 sebagai panduan pelaksanaan teknis. Selama tahun 2011, total keluhan yang dikelola oleh sistem umpan balik berjumlah delapan keluhan, terdiri dari lima keluhan terkait dengan kriteria lingkungan dan tiga keluhan terkait dengan konflik sosial tersebut dapat di kelola dan berhasil diselesaikan (berstatus *closed*) di akhir 2011. Tidak ada insiden ataupun peristiwa yang melibatkan kekerasan yang terkait dengan penanganan keluhan ataupun penyelesaian konflik dengan masyarakat.

Dibandingkan dengan jumlah keluhan tahun 2010, jumlah keluhan tahun 2011 menurun signifikan sebesar lima keluhan atau 45,45%. Selain itu, jumlah aksi *blokade* 2011 pun menurun sebesar 57,14% dibandingkan dengan jumlah aksi *blokade* tahun 2010. Di tahun 2011 hanya terjadi tiga aksi blokade dan seluruhnya terjadi di wilayah Bengalon. Hal ini akibat meningkatnya harapan masyarakat terhadap rencana peningkatan kapasitas produksi dan ekspansi.

Berdasarkan data tahun 2011, keluhan lingkungan menempati porsi terbesar yaitu lima keluhan (62,2%). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan jumlah keluhan lingkungan di tahun 2010 sebanyak satu keluhan. Keluhan terkait lingkungan yang di terima tahun 2011, seluruhnya terkait masalah air, dimana warga mengeluhkan bahwa kegiatan operasional KPC telah menyebabkan keruhnya air sungai Sangatta. Keluhan ini telah diinvestigasi lebih lanjut dengan turut melibatkan wakil-wakil masyarakat dan badan lingkungan hidup (BLH) Kutai Timur. Hasil investigasi bersama ini menunjukkan bahwa keruhnya air sungai Sangatta yang dikeluhkan oleh warga bukanlah akibat buangan limbah ataupun kegiatan operasional perusahaan dan hal ini telah dikomunikasikan kepada warga dan mengundang perwakilan warga masyarakat serta pemerintah daerah setempat dalam kegiatan *Mining Tour: KPC Water Management*. Di tahun 2011 seluruh keluhan yang diterima dapat diselesaikan dengan status akhir *closed*.

## **V.1.6 Menuju Hari Esok Dengan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Baik**

### **V.1.6.1 Kebijakan Publik**

KPC tetap aktif sebagai anggota *United Nations Global Compact* (UNGC) di tahun 2011, menunjukkan bentuk kepedulian dan keterlibatan dalam isu-isu global. Lebih dari pada itu, KPC juga masih terus memberikan dukungan terhadap MDGs melalui pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial. Untuk menjadi mitra pembangunan bagi masyarakat serta pemerintah, perusahaan ikut ambil bagian dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik melalui

organisasi-organisasi publik yang ada, baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus.

Organisasi-organisasi yang dimaksud adalah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), BUN (Bakrie Untuk Negeri), APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan Forum *Multi Stakeholder Corporate Social Responsibility* (FMSH for CSR). Selain itu, PT. Kaltim Prima Coal (KPC) juga menjadi anggota aktif dari *Corporate Forum on Community Development* (CFCD), *Indonesia Business Links* (IBL), Forum Reklamasi Lahan Bekas Tambang (FRLBT), *Indonesian Mining Association* (IMA), PERHAPI (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia), serta Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). UU no. 5/1979 mengenai Pemerintahan Desa, memandang desa sebagai perpanjangan tangan negara (desa korporatis). Dengan demikian masyarakat sipil tidak tumbuh di dalam wilayah desa sehingga ini melahirkan kepala desa yang dominan dan otokratis tanpa kontrol dari masyarakat. Di Tahun 2011, KPC melalui kajian oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD), memberikan masukan di dalam pembentukan system pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan melibatkan stakeholder desa. Di dalam usulan tersebut, diberikan masukan terhadap cara pandang dimana desa sebagai persekutuan masyarakat yang mampu mengatur dirinya sendiri. RUU Pemerintahan Desa ini dijadwalkan akan dibahas di DPR pada tahun 2012.

#### **V.1.6.2 Pemukiman Kembali Yang Lebih Baik**

Mengacu pada dokumen AMDAL produksi 70 juta ton tahun 2010, KPC mendapat amanat untuk mengelola dampak ekspansi aktivitas tambang terhadap masyarakat yang terpapar potensi dampak operasi akibat lokasi pemukiman yang dekat dengan operasi tambang. Dalam hal ini masyarakat dusun Segading, desa Kraiton yang terletak di antara pit A dan pit B-C, area operasi Bengalon. Warga masyarakat Segading sebagian besar adalah masyarakat suku Dayak Basap yang merupakan salah satu penduduk asli (*indigenous people*) Kutai Timur. Program *resettlement* Segading menjadi amanat bagi KPC untuk memberikan perlindungan sosial, serta, mengelola dan meminimalisir potensi dampak negatif dari operasional tambang terhadap masyarakat Segading. Program ini juga sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Prinsip perencanaan *resettlement* Segading mengacu pada dua panduan standar internasional, yaitu Asian Development Bank mengenai *Good Practice Resettlement Plan* dan *Internasional Finance Corporation* mengenai *Resettlement Action Plan*.

Tim pelaksana program *resettlement* Segading dibentuk sesuai dengan Memo Ref.M006/ESD/IV/09. Program *resettlement* Segading ini diperkuat dengan surat keputusan Kepala Desa Kraiton No.049/KD/KRT/IV/2009 perihal Permohonan Relokasi Desa, dan surat Camat Bengalon No.100/41/KB-V/2009 mengenai Relokasi Desa. Di tahun 2011, program *resettlement* Segading menitikberatkan pada dua hal, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur di lokasi *resettlement* dan persetujuan dan kesepakatan keterlibatan masyarakat

Segading dalam program ini. Program-program pemberdayaan yang direncanakan untuk masyarakat Segading termasuk program pengembangan perkebunan karet seluas 200 ha, perikanan air tawar, peternakan ayam dan kambing, budidaya kayu gaharu, pengembangan hutan rakyat, dan pembentukan BUMDES yang mengelola air bersih dan listrik. Sejumlah 27 orang pemuda masyarakat Segading telah diikutsertakan dalam program AKU BISA, yaitu pelatihan mekanik sepeda motor selama 3 bulan di Yogyakarta.

Tahap awal pelaksanaan program *resettlement* Segading adalah pembukaan lokasi dengan *clearing* dan pembangunan jalan utama sebagai akses ke lokasi sepanjang 4 km dengan lebar perkerasan 6 m (perkerasan agregat C/batu merah) dan pembangunan jalan lingkungan pemukiman dengan lebar perkerasan 4 m (perkerasan agregat C/batu merah). Tahap selanjutnya adalah pembangunan unit rumah hunian sebagai prioritas utama dalam percepatan infrastruktur *resettlement* Segading. Selama tahun 2011, dari 60 unit rumah yang direncanakan, 13 unit rumah pembangunan tahap pertama sudah rampung, dengan sisanya direncanakan selesai pada akhir kuartal-1 tahun 2012. Capaian terpenting program *Resettlement* Segading di tahun 2011 adalah tercapainya kesepakatan antara pihak KPC dengan Pemerintah Desa Keraitan beserta perwakilan tokoh masyarakat yang menyatakan mendukung dan akan turut serta dalam program *resettlement* Segading secara tertulis. Tidak terjadi perselisihan dengan masyarakat Desa Keraitan selama proses pencapaian kesepakatan tersebut. Ini merupakan capaian penting di tahun 2011 yang menentukan keberhasilan program *resettlement* Segading. Kemajuan pekerjaan infrastruktur di lokasi dan tercapainya kesepakatan

serta dukungan dari masyarakat Segading ini menunjukkan program *Resettlement* Segading mencapai kemajuan yang berarti di tahun 2011.

## **V.2 Analisis Laporan Berkelanjutan PT. Kaltim Prima Coal Berdasarkan Indikator-indikator GRI**

Analisis dalam laporan ini meliputi enam indikator kinerja yang dapat mengukur kinerja perusahaan dalam pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan. Enam indikator kinerja ini terdiri dari Indikator Kinerja Ekonomi (*Economic Performance Indicators (EC)*), Indikator Kinerja Lingkungan Hidup (*Environmental Performance Indicators (EN)*), Indikator Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak (*Performance Indicators Labor Practices and Decent Work (LA)*), Indikator Kinerja Masyarakat (*Performance Indicators Society (SO)*), Indikator Hak Asasi Manusia (*Performance Indicators for Human Rights (HR)*), dan Indikator Kinerja Tanggung jawab Produk (*Indicators Performance Product Responsibility (PR)*).

Masing-masing indikator kinerja memiliki indikator yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana kinerja perusahaan dalam melaksanakan komitmennya untuk tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaporan keberlanjutan dalam bentuk laporan.

Dalam penelitian ini, peneliti membuat analisis berdasarkan indikator dari G3.1 *GRI Guidelines* yang terbagi menjadi tiga kriteria:

a. *Standar Not Fulfilled* (Tidak Terpenuhi)

Dalam kriteria standar belum terpenuhi, perusahaan tidak menjelaskan indikator atau ada data yang terkait dengan indikator GRI.

b. *Standar Partially Fulfilled* (Setengah Terpenuhi)

Dalam kriteria Sebagian terpenuhi, perusahaan menggambarkan indikator yang sebentar dan tidak menjelaskan semua komponen berkaitan dengan indikator standar.

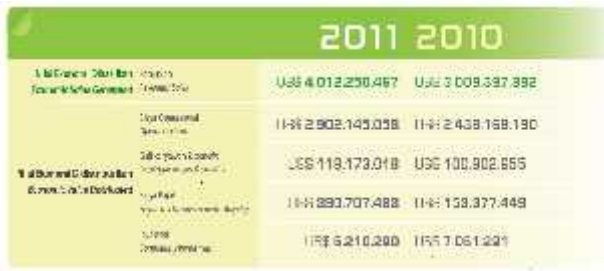
c. *Standar Fully Fulfilled* (Terpenuhi Sepenuhnya)

Dalam memenuhi kriteria standar, perusahaan melaporkan semua komponen dalam indikator standar.

### **V.2.1 Indikator Kinerja Ekonomi**


Indikator kinerja ekonomi adalah indikator yang mengukur kinerja perusahaan dalam perekonomian melalui indikator GRI, yang menunjukkan aliran dana di antara pemegang kepentingan dan dampak ekonomi utama organisasi terhadap masyarakat. Terdiri dari aspek kinerja ekonomi, aspek kehadiran pasar, dampak aspek ekonomi tidak langsung dan juga 9 indikator yaitu 7 indikator inti (*core*) dan 2 indikator tambahan (*add*).

**Tabel V.1**  
**Pemenuhan Indikator-indikator Kinerja Ekonomi**

Indikator-indikator Kinerja Ekonomi	C/A	Aplikasi dalam Laporan keberlanjutan	Sta Peme
<b>Aspek Kinerja Ekonomi</b>			
<p align="center"><b>EC1</b></p> <p>Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.</p>	<b>C</b>	<p align="center"><b>Tabel V.2</b></p>  <p>Pada tahun 2011, KPC berkontribusi untuk pendapatan negara melalui pembayaran royalti batubara dan pajak penghasilan dengan total jumlah sebesar US\$390,70 juta. Besaran total jumlah pembayaran royalti dan pajak tahun 2011 meningkat sebesar 55% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan peningkatan volume produksi dan pendapatan kami dari penjualan.</p>	Standar Fulfilled
<p align="center"><b>EC2</b></p> <p>Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.</p>	<b>C</b>	<p>Di tahun 2011, volume produksi batubara mencapai 40,98 juta ton, sedikit di bawah target produksi tahun 2011 sebesar 46 juta ton. Tingginya curah hujan akibat perubahan iklim global adalah faktor utama yang mempengaruhi produktivitas dan volume produksi perusahaan.</p>	Standar Fulfilled
<p align="center"><b>EC3</b></p> <p>Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.</p>	<b>C</b>	<p>Di tahun 2011, total realisasi pengeluaran dana untuk tunjangan karyawan adalah sebesar US\$151,3 juta. Jumlah ini meningkat sebesar 19,4% dibandingkan dengan realisasi dana tunjangan karyawan di tahun sebelumnya, yakni US\$126,7 juta. Dana tersebut di alokasikan untuk pembayaran gaji karyawan, bonus, cuti, uang makan, Tunjangan Hari Raya (THR), keagamaan, pengobatan, akomodasi, perumahan, tunjangan kerja bergilir, jaminan hari tua, pensiun, dan jenis tunjangan karyawan lainnya</p>	Standar Fulfilled
<p align="center"><b>EC4</b></p> <p>Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.</p>	<b>C</b>	<p>Pemerintah Republik Indonesia berperan besar dalam memberikan layanan terbaik untuk mendukung aktivitas operasi KPC, termasuk membebaskan biaya pajak ekspor terhitung sejak tanggal 13 September 2006 dan perusahaan lain yang tergabung dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama.</p>	Standar Fulfilled
<b>Aspek Kehadiran Pasar</b>			
<p align="center"><b>EC5</b></p> <p>Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada</p>	<b>A</b>	<p>Upah Minimum Sektor Kabupaten Kutai Timur (UMSK) tahun 2011 untuk sektor batubara adalah sebesar Rp1.583.600,- (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah), sementara kami memberikan gaji minimum kepada karyawan</p>	Standar Fulfilled



lokasi operasi yang signifikan.		non skill sebesar Rp1.892.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau 19% lebih tinggi dari UMSK. Besaran gaji minimum tersebut meningkat 7,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.752.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).																										
EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.	C	<p>Operasional KPC didukung oleh mitra pemasok yang terdiri dari dua kategori, yaitu pemasok jasa kontraktor dan equipment dengan berkolaborasi dengan kontraktor, pemasok lokal, nasional, dan asing. KPC pada tahun 2011 didukung oleh 1.150 mitra kontraktor dan pemasok dan telah melakukan migrasi pembelian kepada pemasok lokal untuk ban ukuran 10.00R20 dan 12.00R24, <i>flocculent</i>, suku cadang <i>Crusher</i>, alat alat pelindung diri, <i>body dump truck</i> tambang dan perkakas tangan.</p> <p>Total nilai pembelian barang dan jasa KPC tahun 2011 78% atau sebesar US\$1,152 miliar. Nilai dan persentase pembelian barang dan jasa tahun 2009 – 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.</p> <p style="text-align: center;"><b>Tabel V.3</b></p> <table border="1"> <caption>Nilai Pembelian Barang dan Jasa (US\$)</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai (US\$)</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2009</td> <td>LUAR NEGERI Overseas</td> <td>376.285.833,61</td> <td>29%</td> </tr> <tr> <td>DOMESTIK Domestic</td> <td>924.733.575,11</td> <td>71%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2010</td> <td>LUAR NEGERI Overseas</td> <td>260.416.723,81</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>DOMESTIK Domestic</td> <td>904.733.575,11</td> <td>78%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2011</td> <td>LUAR NEGERI Overseas</td> <td>317.560.763,98</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>DOMESTIK Domestic</td> <td>1.152.439.368,10</td> <td>78%</td> </tr> </tbody> </table> <p>KPC melibatkan 24 kontraktor lokal dalam 45 proyek pengerjaan infrastruktur yang dikelola oleh Divisi External Affairs &amp; Sustainable Development (ESD). Salah satu proyek infrastruktur ini adalah pembangunan 60 rumah beserta sarana dan prasarana untuk masyarakat Dayak Basap di Desa Segading, Bengalon. Pemasok lokal dan nasional juga dilibatkan untuk turut membantu KPC dalam proyek pembangunan infrastruktur yang sedang di persiapkan menuju kapasitas produksi 70 juta ton. 21,45% material yang digunakan dalam proyek ini adalah material yang diperoleh dari pemasok nasional dalam negeri dan pemasok lokal dari Kutai Timur dan Kalimantan Timur dengan total nilai pembelian mencapai US\$ 150,24 juta.</p>	Tahun	Kategori	Nilai (US\$)	Persentase	2009	LUAR NEGERI Overseas	376.285.833,61	29%	DOMESTIK Domestic	924.733.575,11	71%	2010	LUAR NEGERI Overseas	260.416.723,81	22%	DOMESTIK Domestic	904.733.575,11	78%	2011	LUAR NEGERI Overseas	317.560.763,98	22%	DOMESTIK Domestic	1.152.439.368,10	78%	Standar Fulfilled
Tahun	Kategori	Nilai (US\$)	Persentase																									
2009	LUAR NEGERI Overseas	376.285.833,61	29%																									
	DOMESTIK Domestic	924.733.575,11	71%																									
2010	LUAR NEGERI Overseas	260.416.723,81	22%																									
	DOMESTIK Domestic	904.733.575,11	78%																									
2011	LUAR NEGERI Overseas	317.560.763,98	22%																									
	DOMESTIK Domestic	1.152.439.368,10	78%																									
EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang	C	KPC lebih mengutamakan penerimaan karyawan dari wilayah sekitar Kutai Timur dan Kalimantan Timur karena merupakan wilayah operasional perusahaan. Pembukaan lapangan kerja ini, di lengkapi dengan program pelatihan dan magang yang diprioritaskan untuk putra daerah Sangatta, Bengalon, Kutai	Standar Fulfilled																									

signifikan.		<p>Timur, dan Kalimantan Timur. Program ini mengacu kepada Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur nomor: 562/973-PLK/Disnaker/VII/2005 yang mengatur sistem penerimaan berdasarkan <i>Scoring System</i>. Kandidat dengan skor tertinggi akan mendapatkan prioritas utama untuk melanjutkan seleksi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Tabel V.4</b></p>  <p>Sebanyak 324 orang peserta program magang saat ini telah menjadi karyawan di KPC dan selebihnya diserap sebagai tenaga kerja oleh kontraktor-kontraktor KPC dan perusahaan-perusahaan lain di wilayah Kutai Timur.</p>	
<b>Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung</b>			
<p>EC8</p> <p>Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono.</p>	C	<p>Perusahaan telah membantu pelaksanaan program pembangunan dan perbaikan infrastruktur dengan membangun berbagai sarana infrastruktur yang memadai terutama bagi masyarakat di empat kecamatan sekitar area operasi tambang kami, yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon dan Rantau Pulung. Perencanaan program disusun bersama dengan para pemangku kepentingan di tingkat desa dan kecamatan sehingga menghasilkan program yang dibutuhkan warga masyarakat setempat. Sepanjang tahun 2011, program peningkatan infrastruktur tersebut mencapai nilai US\$ 1 juta meliputi pembangunan kantor, desa, jalan raya, jembatan, listrik, fasilitas air dan lansekap. Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang telah di selesaikan di tahun 2011 mencakup: perbaikan jembatan <i>Steel Girder</i> di Sungai Aji Sepaso Induk sepanjang 15 m dan lebar 5 m, betonisasi jalan di Desa Tepian Indah sepanjang 300 m dan lebar 4 m; pembangunan tahap 1 gedung serbaguna di Sepaso Timur seluas 19x39,2m di wilayah Kecamatan Bengalonl dan pembuatan pagar pengaman patung Burung Enggang Sangatta untuk meningkatkan fasilitas perkotaan.</p>	Standar Fulfilled
<p>EC9</p> <p>Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.</p>	A	<p>Hasil studi menunjukkan bahwa terjadi <i>multifying effect</i> untuk setiap penambahan satu orang karyawan yang bekerja di KPC dampaknya akan memicu munculnya kesempatan kerja baru sebanyak enam orang di Kutai Timur. Fakta lain yang dipaparkan dalam hasil studi tersebut adalah, setiap Rp 1 juta pendapatan yang diterima karyawan KPC, akan mendorong perolehan pendapatan masyarakat di Kutai Timur dan wilayah sekitar sebesar Rp 4,8 juta. Secara makro ekonomi, keberadaan industri pertambangan termasuk KPC, masih merupakan tulang punggung utama perekonomian Kutai Timur. Hal ini didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 yang menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</p>	Standar Fulfilled

		Kutai Timur atas harga berlaku, khususnya di sektor pertambangan yang mencapai angka 86,91%.	
--	--	--	--

Dari tabel di atas, dapat dilihat KPC telah menjelaskan kinerja dan tanggung jawab sosialnya pada indikator-indikator kinerja ekonomi dan telah dapat memenuhi seluruh indikator kinerja ekonomi yang disarankan GRI yaitu 7 indikator inti dan 2 indikator tambahan.


## V.2.2 Indikator Kinerja Lingkungan Hidup

Dimensi Lingkungan dari keberlanjutan yang mempengaruhi dampak organisasi terhadap sistem alami hidup dan tidak hidup, termasuk ekosistem, tanah, air dan udara. Indikator Kinerja Lingkungan Hidup meliputi kinerja yang berhubungan dengan input (misalnya material, energi, dan air) dan *output* (misalnya emisi, air limbah, dan limbah). Sebagai tambahan, indikator ini melingkupi kinerja yang berhubungan *biodiversity* (keanekaragaman hayati), kepatuhan lingkungan, dan informasi relevan lainnya seperti pengeluaran lingkungan (*environmental expenditure*) dan dampaknya terhadap produk dan jasa. Terdiri dari 9 Aspek, yaitu aspek menyeluruh, aspek energi, aspek pengangkutan/transportasi, aspek kepatuhan, aspek produk dan jasa, aspek emisi, aspek efluen dan limbah, aspek biodiversitas (keanekaragaman hayati), aspek air, aspek energi, aspek material serta 30 indikator yaitu 17 indikator inti dan 13 indikator tambahan.

**Tabel V.5**

### Pemenuhan Indikator-indikator Kinerja Lingkungan Hidup

Indikator-indikator Kinerja Lingkungan Hidup	C/A	Aplikasi dalam Laporan keberlanjutan	Sta Peme						
Aspek Material									
EN1 Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume	C	<p>Dalam proses produksi sepanjang tahun 2011 KPC menggunakan material dengan rincian sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Tabel V.6</b></p> <p style="text-align: center;">Konsumsi Material untuk Operasi Pemadangan 2011 2011 / Material Consumption for Ash Production (2011)</p> <table><tr><td><p>2010 150,120 Ton</p><p>2011 133,758 Ton</p><p><b>Amonium Nitrat</b> Bahan Peledak</p></td><td><p>2010 1,432 Ton</p><p>2011 1,378 Ton</p><p><b>Magnehit</b> Pengisian Isotop</p></td></tr><tr><td><p>2010 37,9 Ton</p><p>2011 39,4 Ton</p><p><b>Flocculant</b> Pengisian Isotop</p></td><td><p>2010 243 Ton</p><p>2011 135 Ton</p><p><b>Lime</b> Pengisian Isotop</p></td></tr><tr><td><p>2010 2,513 Ton</p><p>2011 1,416 Ton</p><p><b>Lime</b> Pengaturan Air Asam</p></td><td><p>2010 5,340 kiloliter</p><p>2011 1,418 kiloliter</p><p><b>Oil (lubricating oil)</b> Pelumas</p></td></tr></table>	<p>2010 150,120 Ton</p> <p>2011 133,758 Ton</p> <p><b>Amonium Nitrat</b> Bahan Peledak</p>	<p>2010 1,432 Ton</p> <p>2011 1,378 Ton</p> <p><b>Magnehit</b> Pengisian Isotop</p>	<p>2010 37,9 Ton</p> <p>2011 39,4 Ton</p> <p><b>Flocculant</b> Pengisian Isotop</p>	<p>2010 243 Ton</p> <p>2011 135 Ton</p> <p><b>Lime</b> Pengisian Isotop</p>	<p>2010 2,513 Ton</p> <p>2011 1,416 Ton</p> <p><b>Lime</b> Pengaturan Air Asam</p>	<p>2010 5,340 kiloliter</p> <p>2011 1,418 kiloliter</p> <p><b>Oil (lubricating oil)</b> Pelumas</p>	Standar Fulfilled
<p>2010 150,120 Ton</p> <p>2011 133,758 Ton</p> <p><b>Amonium Nitrat</b> Bahan Peledak</p>	<p>2010 1,432 Ton</p> <p>2011 1,378 Ton</p> <p><b>Magnehit</b> Pengisian Isotop</p>								
<p>2010 37,9 Ton</p> <p>2011 39,4 Ton</p> <p><b>Flocculant</b> Pengisian Isotop</p>	<p>2010 243 Ton</p> <p>2011 135 Ton</p> <p><b>Lime</b> Pengisian Isotop</p>								
<p>2010 2,513 Ton</p> <p>2011 1,416 Ton</p> <p><b>Lime</b> Pengaturan Air Asam</p>	<p>2010 5,340 kiloliter</p> <p>2011 1,418 kiloliter</p> <p><b>Oil (lubricating oil)</b> Pelumas</p>								
EN2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang	C	<p>Batuan yang tidak bersifat asam (NAF) aman untuk digunakan kembali untuk tujuan reklamasi lahan ataupun untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur. 100% kebutuhan tanah untuk pembangunan OLC Melawan dan OLC <i>duplication</i>, yakni sebesar 1,315 juta m3 merupakan pemanfaatan kembali NAF.</p> <p>Ban bekas dari truk dimanfaatkan untuk pembuatan sistem drainase (<i>drop structure</i>) di areal reklamasi. Selama tahun 2011, sejumlah 931 ban bekas telah dimanfaatkan di areal reklamasi Pit J, Prima Dam Stage 3, Rawa Indah, Ambalat, Box Cut, Lack Pond 4, PSS <i>outlet</i>, dan Keong. Pelumas bekas yang dihasilkan dari kegiatan operasional di area Sangatta, dimanfaatkan untuk bahan bakar pembantu peledakan (ANFO-Emulsi), Pemanfaatan pelumas bekas dan solar baru adalah 80:20. Selama tahun 2011, jumlah pelumas bekas yang dihasilkan oleh kegiatan operasi KPC dan kontraktornya, baik yang berlokasi di Sangatta maupun Bengalon adalah 10.160.598,53 liter. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.748.100 liter (37%) digunakan sebagai campuran bahan peledak, dan sisanya yaitu sebanyak 6.412.498,53 liter (63%) dikirim ke pengelola berizin. Selama tahun 2011, KPC telah memanfaatkan <i>fly ash</i> (abu batu bara) sebagai pelapis dasar jalan di beberapa lokasi, yaitu jalan PLTU baru sebanyak 1.053,93 ton, <i>Green Road</i> sebanyak 948 ton, dan CPP <i>New Road</i> sebanyak 400 ton. Dan juga memanfaatkan <i>fly ash</i> untuk campuran beton di <i>Marine</i> sebanyak 4 ton dan untuk campuran material <i>paving block</i> di 2 lokasi, yaitu STP 7 Tanjung Bara dan WTP Tanjung Bara masing-masing sebanyak 4 ton dan 8 ton. Dengan demikian, total pemanfaatan <i>fly ash</i> adalah sebesar 2.417,93 ton atau 49.41% dari <i>fly ash</i> yang dihasilkan.</p>	Standar Fulfilled						
Aspek Energi									
EN3	C	Tahun 2011, Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya	Standar						


Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer		<p>Energi Primer KPC adalah 45.207 ton batubara, 12.174 liter solar. Rinciannya:</p> <p><b>Tabel V.7</b></p>  <p>Infographic showing energy consumption for PTU KPC Batubara, Genset Solar, Pertamina Pertamina, and Pertamina Solar for 2010 and 2011. The data is presented in a bar chart format with icons for each energy source.</p>	Fulfilled
EN4 Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer	C	<p>Ditahun 2011, Pemakaian Energi Tidak Langsung adalah 751.212,4 liter solar dan 852,2 liter Pertamina.</p>	Standar Fulfilled
EN5 Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi	A	<p>Di tahun 2011, Program <i>Improvement</i> difokuskan pada dua hal, yakni optimasi kinerja dan biaya operasi tambang dan perubahan budaya kerja karyawan. Implementasi program di lapangan diwujudkan dalam berbagai proyek efisiensi, khususnya yang terkait bahan bakar, bahan peledak, ban, dan kehandalan alat berat. Selain bertujuan untuk efisiensi biaya produksi, program <i>Improvement</i> di KPC juga bertujuan untuk menghemat konsumsi energi. Beberapa program lainnya, yaitu Program Efisiensi Bahan Bakar Solar pada <i>Truck-Shovel</i> dan <i>Over Land Conveyor</i> (OLC) untuk Transportasi Batubara yang mengurangi konsumsi energi.</p>	Standar Fulfilled
EN6 untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.	A	<p><i>Over Land Conveyor</i> (OLC) untuk Transportasi Batubara untuk mengurangi konsumsi energi, khususnya yang terkait dengan proses transportasi batubara dari Pit Melawan hingga ke area <i>crusher</i>. Inisiatif OLC ini telah mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut batubara dan menghemat kebutuhan bahan bakar solar yang sebelumnya digunakan untuk truk pengangkut.</p> <p>Kemajuan proyek pembangunan OLC Pit Melawan hingga Desember 2011 telah mencapai 54%. Sedangkan kemajuan proyek penggandaan OLC sampai dengan Desember 2011 telah mencapai 90%. Di samping itu, sekitar 12,3 km dari total 12,6 km panjang mesin OLC baru, telah selesai dibangun.</p>	Standar Fulfilled
EN7 Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai	A	<p>Program <i>Improvement</i> dalam penghematan energi juga memberikan inisiatif penghematan listrik untuk mengurangi pemakaian listrik yang tidak sesuai peruntukannya dan berlebihan. Dari berbagai upaya penghematan listrik tersebut, jumlah energi listrik yang dapat dihemat selama tahun 2011 mencapai 1.845.465 kWh atau setara dengan mengurangi</p>	Standar Fulfilled


		968,13 ton eq emisi CO <sub>2</sub> .																									
Aspek Air																											
EN8 Total pengambilan air per sumber	C	<p>Air sungai dan air tanah (sumur bor) adalah air yang diguna memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum untuk keperluan domestik, perkantoran karyawan serta kontraktor yang tinggal di areal KPC, yang diolah di instalasi pengolahan air (<i>Water Treatment Plant</i> - WTP) KPC. Selama tahun 2011, jumlah total air bersih yang telah dihasilkan dan dikonsumsi adalah sebanyak 16.500 m<sup>3</sup>. Di Tanjung Bara, terdapat WTP yang menggunakan <i>raw water</i> yang berasal dari sumur dan Sungai Bulu. Air yang masuk ke Sungai Bulu berasal dari air hasil olahan STP06 dan air permukaan (air hujan). Volume air yang masuk dari STP06 ke Sungai Bulu sekitar 29.284 m<sup>3</sup> per tahun. Apabila diasumsikan bahwa seluruh air dari STP ini diolah di WTP, maka 4.3% airbaku WTP berasal dari STP.</p> <p><b>Tabel V.8</b></p> <table><caption>Data for Tabel V.8 (Estimated values from chart)</caption><thead><tr><th>Category</th><th>2010 (m³)</th><th>2011 (m³)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Penggunaan air bersih</td><td>11,000</td><td>16,500</td></tr><tr><td>Produksi air bersih</td><td>11,000</td><td>16,500</td></tr><tr><td>Sumber air</td><td></td><td></td></tr><tr><td>  Sungai Bulu</td><td>11,000</td><td>16,500</td></tr><tr><td>  STP06</td><td>11,000</td><td>16,500</td></tr><tr><td>  WTP</td><td>11,000</td><td>16,500</td></tr><tr><td>  Total</td><td>11,000</td><td>16,500</td></tr></tbody></table>	Category	2010 (m³)	2011 (m³)	Penggunaan air bersih	11,000	16,500	Produksi air bersih	11,000	16,500	Sumber air			Sungai Bulu	11,000	16,500	STP06	11,000	16,500	WTP	11,000	16,500	Total	11,000	16,500	Standar Fulfilled
Category	2010 (m³)	2011 (m³)																									
Penggunaan air bersih	11,000	16,500																									
Produksi air bersih	11,000	16,500																									
Sumber air																											
Sungai Bulu	11,000	16,500																									
STP06	11,000	16,500																									
WTP	11,000	16,500																									
Total	11,000	16,500																									
EN9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air	A	<p>Sampai dengan akhir tahun pelaporan, KPC tidak menerima keluhan dari warga sekitar terkait penurunan volume air sungai ataupun air tanah akibat konsumsi air perusahaan.sumber air yang diambil oleh perusahaan bisa dilihat pada table dibawah ini</p> <p><b>Tabel. V.8</b></p> <table><caption>Data for Tabel. V.8 (Estimated values from chart)</caption><thead><tr><th>Category</th><th>2010 (m³)</th><th>2011 (m³)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Penggunaan air bersih</td><td>11,000</td><td>16,500</td></tr><tr><td>Produksi air bersih</td><td>11,000</td><td>16,500</td></tr><tr><td>Sumber air</td><td></td><td></td></tr><tr><td>  Sungai Bulu</td><td>11,000</td><td>16,500</td></tr><tr><td>  STP06</td><td>11,000</td><td>16,500</td></tr><tr><td>  WTP</td><td>11,000</td><td>16,500</td></tr><tr><td>  Total</td><td>11,000</td><td>16,500</td></tr></tbody></table>	Category	2010 (m³)	2011 (m³)	Penggunaan air bersih	11,000	16,500	Produksi air bersih	11,000	16,500	Sumber air			Sungai Bulu	11,000	16,500	STP06	11,000	16,500	WTP	11,000	16,500	Total	11,000	16,500	Standar Fulfilled
Category	2010 (m³)	2011 (m³)																									
Penggunaan air bersih	11,000	16,500																									
Produksi air bersih	11,000	16,500																									
Sumber air																											
Sungai Bulu	11,000	16,500																									
STP06	11,000	16,500																									
WTP	11,000	16,500																									
Total	11,000	16,500																									
EN10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang	A	<p>Untuk meminimalisir dampak debu selama proses transportasi, bongkar, maupun loading, KPC secara rutin melakukan penyemprotan air ke area-area yang membutuhkan air yang merupakan air hasil daur ulang.</p> <p>Selama tahun 2011 dimana waktu operasional sama dengan tahun 2010, jumlah air yang digunakan dalam proses pencucian batubara adalah sebesar 0.391 m<sup>3</sup>/ton batubara atau 424.557,38 m<sup>3</sup>, yang seluruhnya atau 100% merupakan air hasil daur ulang dan air hasil penampungan air hujan. KPC tidak menggunakan sumber air baru dari sungai ataupun air tanah dalam proses</p>	Standar Fulfilled																								



		produksi batubara.	
		Air yang masuk ke Sungai Bulu berasal dari air hasil olahan STP06 dan air permukaan (air hujan). Volume air yang masuk dari STP06 ke Sungai Bulu sekitar 29.284 m <sup>3</sup> per tahun. Apabila diasumsikan bahwa seluruh air dari STP ini diolah di WTP, maka 4.3% air baku WTP berasal dari STP. Air olahan STP, yakni air yang berasal air bekas wudhu dan wastafel, digunakan kembali untuk toilet dan penyiraman tanaman di kompleks perumahan karyawan.	
<b>Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)</b>			
EN11 Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi?) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi	C	Realisasi pembukaan lahan 2011 seluas 1.511,9 ha dari 2.066,4 ha yang diizinkan oleh Pemerintah. Area konsesi seluas 90.938 ha. Area terganggu seluas 17.077,5 ha; area reklamasi seluas 4407,3 ha. Pada tahun 2011 upaya reklamasi 637 ha lahan telah dilakukan secara progresif, dari rencana 633 ha. Area reklamasi tersebut dimanfaatkan sebagai habitat singgah satwa dan penyebaran benih alami. Area tambang KPC, berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kutai di area barat daya. Area perbatasan ini dikelola sebagai zona penyangga ( <i>buffer zone</i> ). Dalam proses rehabilitasi dan pengelolaan areal bekas tambang, KPC turut meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat sekitar melalui program restorasi ekosistem kawasan.	Standar Fulfilled
EN12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi)	C	Pada tahun 2011, kegiatan operasional yang berpotensi memiliki dampak terhadap lingkungan, habitat dan keanekaragaman hayati adalah: Realisasi pembukaan lahan 2011 seluas 1.511,9 ha dari 2.066,4 ha yang diizinkan oleh Pemerintah. Area konsesi seluas 90.938 ha. Area terganggu seluas 17.077,5 ha; area reklamasi seluas 4407,3 ha. Pada tahun 2011 upaya reklamasi 637 ha lahan telah dilakukan secara progresif, dari rencana 633 ha. Area reklamasi tersebut dimanfaatkan sebagai habitat singgah satwa dan penyebaran benih alami. Aktivitas pembukaan lahan tersebut memang memiliki dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati di area sekitar tambang, seperti hilangnya spesies flora tertentu. Maka rencana pasca tambang KPC bertujuan untuk memastikan bahwa pemulihan kondisi areal terdampak mendekati kondisi rona awal, dan kami bertujuan untuk menambahkan flora dari berbagai spesies untuk mendukung ketahanan habitat yang baru dibentuk  Orangutan, Bekantan dan Burung Enggang adalah satwa-satwa liar yang termasuk dalam daftar merah IUCN karena populasinya di alam terus menurun. KPC menyadari, bahwa jika tidak dilakukan penanganan yang baik, maka operasional KPC berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan satwa-satwa yang dilindungi.	Standar Fulfilled
EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat	A	Rencana pasca tambang KPC bertujuan untuk memastikan bahwa pemulihan kondisi areal terdampak mendekati kondisi rona awal, dan untuk menambahkan flora dari berbagai spesies untuk mendukung ketahanan habitat yang baru dibentuk.	Standar Fulfilled


		<p>Untuk pemulihan habitat, KPC juga melakukan penanaman kembali pada area reklamasi dan konservasi flora spesifik di hutan yang dinamakan hutan Arboretum oleh KPC. Dan juga penanaman vegetasi lokal yang digunakan di area restorasi mengutamakan jenis vegetasi lokal sesuai rona awal, ditambah dengan jenis baru yang terbukti memiliki keunggulan dalam pertumbuhan dan kecepatan penutupan area, dan ditambahkan jenis asli penyusun hutan hujan tropis dari jenis family <i>Dipterocarpaceae</i> setelah terbentuk penutupan tajuk di area reklamasi. Hasil penilaian pelaksanaan reklamasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 mencapai angka 80%. Artinya, hasil tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi.</p> <p>Untuk program konservasi Bekantan dan Burung Enggang, KPC telah melakukan penanaman 3.000 tanaman bakau (<i>Mangrove</i> atau <i>Rhizophora mucronata</i>) untuk memperluas habitat mereka.</p>	
<p>EN14</p> <p>Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati</p>	A	<p>Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, KPC mengembangkan beberapa program pelatihan lingkungan yang dilakukan secara <i>in-house</i>. Pelatihan tersebut meliputi: Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, pengelolaan hidrokarbon dan Limbah, dan spesifikasi rehabilitasi.</p> <p>Pengelolaan Air Asam Batuan merupakan tindakan Untuk menjaga kualitas air (kadar keasaman air-pH air), di lakukan dengan menambahkan kapur pada kolam-kolam pengendap di areal tambang Sangatta dan Bengalon.</p> <p>Selain itu, Aktivitas pembukaan lahan memiliki dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati di area sekitar tambang, seperti hilangnya spesies flora tertentu. Maka rencana pasca tambang bertujuan untuk memastikan bahwa pemulihan kondisi areal terdampak mendekati kondisi rona awal dan menambahkan flora dari berbagai spesies untuk mendukung ketahanan habitat yang baru dibentuk. Untuk menjaga flora juga dilakukan :</p> <p>Setiap bulan dilakukan pemantauan kupu-kupu. Identifikasi orang utan.</p> <p>Program konservasi Bekantan dan Burung Enggang, dengan penanaman 3.000 tanaman bakau (<i>Mangrove</i> atau <i>Rhizophora mucronata</i>) untuk memperluas habitat mereka.</p> <p>Program <i>nursery</i>, penanaman kembali pada area reklamasi dan konservasi floraspesifik di hutan yang di namakan hutan Arboretum oleh KPC.</p> <p>Upaya Berkesinambungan Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Melalui penerapan sistem pengelolaan lingkungan ISO 14001, merupakan inisiatif pelestarian lingkungan yang dijalankan KPC untuk mendukung keberlanjutan.</p> <p>Strategi dan tindakan tersebut tertuang dalam : Rencana Pasca Tambang (RPT) yang telah disetujui Kementrian ESDM tahun 2011.</p>	Standar Fulfilment




		Implementasi <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) terkait Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam mengatur pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna .	
EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi	A	KPC mengidentifikasikan 56 spesies kupu-kupu di area reklamasi.  Bekantan dan Burung Enggang adalah satwa-satwa liar yang termasuk dalam daftar merah IUCN karena populasinya di alam terus menurun. KPC menyadari, bahwa jika tidak dilakukan penanganan yang baik, maka operasional kami berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan satwa-satwa yang dilindungi ini.	Standar Fulfilled
<b>Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah</b>			
EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat	C	Dari berbagai aktivitas KPC sepanjang tahun 2011 total emisi GRK dari keseluruhan aktivitas operasional KPC mencapai 4 juta eq. kg CO <sub>2</sub> .	Standar Fulfilled
EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat	C	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya, terlihat dari gambar dibawah ini:  <b>Tabel V.9</b> 	Standar Fulfilled
EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya	A	Untuk mengurangi dampak emisi gas dari peralatan operasional maupun kendaraan operasional, KPC melakukan perawatan berkala untuk menjaga unjuk kerja proses pembakaran pada peralatan dimaksud. Selain itu, dalam pengadaan peralatan baru (khususnya truk dan alat berat lainnya), KPC telah menggunakan standar emisi EPA ( <i>Environmental Protection Agency</i> ) Tier 2 dan Tier 3 dan juga upaya dalam mengendalikan polutan dan potensi pencemaran udara, KPC telah melakukan pengujian emisi rutin untuk kendaraan operasional KPC dan menggunakan bahan bakar yang memiliki oktan tinggi sehingga gas buang yang dihasilkan relatif lebih aman dan ramah lingkungan.  Selain itu, energi listrik yang dapat dihemat selama tahun 2011	Standar Fulfilled

		mencapai 1.845.465 kWh atau setara dengan mengurangi 968,13 ton eq emisi CO <sub>2</sub> .	
EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat	C	Selain emisi karbon, kegiatan operasional KPC secara tidak langsung mengeluarkan emisi zat perusak ozon ( <i>ozone depleting substances/ODS</i> ). Yang berasal dari penggunaan fasilitas pendingin ruangan maupun AC kendaraan operasional saat pelaksanaan perbaikan dan masih menguji coba sejumlah metode pengukuran dan perhitungan untuk menginventaris jumlah emisi ODS kami.	Standar Fulfilled
EN20 NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat	C	<p><b>Tabel V.10</b></p>  <p>Seperti tampak pada tabel diatas, yang menunjukkan besaran emisi gas NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, CO dan partikulat lain yang seluruhnya telah memenuhi baku mutu</p>	Standar Fulfilled
EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan	C	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuannya seperti terlihat pada ilustrasi di bawah ini: <b>Tabel V.11</b>	Standar Fulfilled

			
<p>EN22</p> <p>Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan</p>	<p>C</p>	<p>Pengelolaan limbah non bahan beracun limbah (non-B3) yang di hasilkan meliputi sampah umum, limbah kertas, ban bekas, plastik, dan kardus bekas. Sampah umum yang dikelola oleh KPC adalah limbah umum yang berasal dari areal perumahan karyawan KPC dan areal industri KPC. Sampah umum ini dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di areal <i>dumping</i> Hatari <i>East</i>. Selama tahun 2011, dengan asumsi 1 m3 setara dengan 400 kg, maka jumlah sampah umum yang dibuang ke TPA adalah sebesar 16.709,2 m3 atau 6.683,68 ton</p> <p><b>Tabel V.12</b></p> <p>Jumlah Limbah B3 yang Dikelola di Tahun 2011</p>  <p>Dan juga Selama tahun 2011, KPC telah memanfaatkan abu batu bara <i>fly ash</i> dengan total pemanfaatan <i>fly ash</i> adalah sebesar 2.417,93 ton atau 49.41% dari <i>fly ash</i> yang dihasilkan.</p>	<p>Standar Fulfilled</p>
<p>EN23</p> <p>Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan</p>	<p>C</p>	<p>Selama tahun 2011, terjadi lima kali tumpahan hidrokarbon (solar dan oli) di dalam areal bengkel, stasiun bahan bakar dan di dalam areal tambang, dengan perkiraan total tumpahan sebesar 18.420 liter dan tumpahan tersebut dapat diisolasi dan bersihkan sehingga tidak keluar dari areal tambang.</p>	<p>Standar Fulfilled</p>
<p>EN24</p> <p>Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan</p>	<p>A</p>	<p>Limbah B3 dari kegiatan operasional KPC dikelola dengan mengikuti peraturan pemerintah dan izin pengelolaan limbah B3 yang diperoleh KPC, mulai dari penyimpanan sementara, pemanfaatan, pengolahan internal, sampai dengan dikirim ke pihak ketiga berizin untuk dikelola lebih lanjut. Pihak ketiga berizin yang dimaksud adalah pengelola limbah B3 yang berada</p>	<p>Standar Fulfilled</p>

<p>persentase limbah yang diangkut secara internasional.</p>		<p>di Indonesia dan telah memiliki izin dari KLH untuk melakukan pengelolaan sebagian atau semua jenis limbah B3 dari penghasil limbah B3. KPC tidak melakukan pengiriman atau pun pembuangan limbah B3 ke luar negeri.untuk lebih rinci, jumlah limbah tersebut bisa di lihat di tabel di bawah ini</p> <p><b>tabel V.12</b></p> 	
<p>EN25</p> <p>Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.</p>	<p>A</p>	<p>Populasi ikan merupakan habitat yang signifikan terkait dengan pembuangan air. populasi dan jenis ikan yang tertangkap selama studi di tahun 2011 menunjukkan kecenderungan meningkat baik jumlah maupun jenisnya dibandingkan sampling di tahun 2009 dan 2007. Dari total jumlah individu (populasi dan jenis ikan) yang tertangkap mengalami peningkatan sebesar 47,6% dibanding hasil sampling di tahun 2009, dan sebesar 30,8% dibanding sampling di tahun 2007. Sedangkan dari spesies ikan yang tertangkap juga mengalami peningkatan sebesar 43,8% dari tahun 2009, dan sebesar 18% dibanding hasil sampling di tahun 2007. Dan nilai indeks keanekaragaman tinggi ditemukan pada lokasi Sungai Sangatta di bagian hilir (WQ9), Teluk Lingga (WQ 25), Rantau Pulung, Muara Kenyamukan, kolam Sisi Danau, dan kolam Kenny J. Sedangkan untuk wilayah Bengalon, keanekaragaman tinggi ditemukan di Sepaso (BWQ2, BWQ3), Segading (BWQ11), dan Sekurau Bawah (BWQ8). Di lokasi BWQ8 ini ditemukan keanakeragaman dengan nilai indek tertinggi serta memberikan hasil tangkapan dan jumlah spesies terbesar.</p>	<p>Standar Fulfille</p>
<p><b>Aspek: Produk dan Jasa</b></p>			
<p>EN26</p> <p>Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.</p>	<p>C</p>	<p>Sistem pengelolaan lingkungan di KPC, diawali dengan penyusunan <i>objective</i>, <i>target</i>, <i>program</i> (OTP), yang mempertimbangkan aspek pemenuhan ketentuan dan undang-undang lingkungan hidup dan program peningkatan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, program ini diterapkan di semua divisi dan dipantau kemajuannya setiap tiga bulan, yang meliputi tinjauan dokumen ERA (<i>Environmental Risk Assesment</i>), evaluasi kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan, audit internal dan audit eksternal.</p> <p>Bahkan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, KPC mengembangkan beberapa program pelatihan lingkungan yang dilakukan secara <i>in-house</i>. Pelatihan tersebut meliputi: Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, pengelolaan hidrokarbon dan Limbah, dan spesifikasi rehabilitasi.</p>	<p>Standar Fulfille</p>

		<p>Untuk mengelola keanekaragaman hayati yang ada di perairan di sekitar wilayah penambangan, KPC melakukan pemantauan biota perairan dari sungai dan anak sungai yang terkena dampak kegiatan tambang, di wilayah Sangatta dan Bengalon.</p> <p>Upaya untuk terus meningkatkan kinerja Sistem Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) salah satunya adalah dengan menetapkan, memantau dan memperbaiki pencapaian parameter indikator kinerja pengelolaan lingkungan. Indikator ini meliputi hasil kegiatan reklamasi lahan bekas tambang, kualitas air, kualitas udara dan pengelolaan limbah dan hidrokarbon.</p>										
<p>EN27</p> <p>Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.</p>	<p>C</p>	<p>Operasional Yang Bertanggung Jawab Landasan manajemen yang baik tentunya akan berdampak kuat bagi aktivitas operasional yang bertanggung jawab sehingga menghasilkan produk yang berkualitas baik dan bermanfaat. Dalam proses produksi, sebelum proses penambangan dilakukan, Tim Geologi KPC akan melakukan survei dan pemodelan. Pengangkutan <i>top soil</i> merupakan tahap awal dari proses penambangan; tahap selanjutnya adalah <i>overburden removal</i> atau proses pengangkutan tanah penutup batubara. Volume produksi dan <i>overburden</i> yang dipindahkan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Tabel V.13</b></p> <div><p style="text-align: center;">Volume Produksi dan Overburden Production Volume and Overburden Removal (MW3)</p><table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Produksi (Ton)</th><th>Overburden Removal (cm³)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2010</td><td>39.332.000</td><td>490.273</td></tr><tr><td>2011</td><td>40.976.000</td><td>499.112</td></tr></tbody></table></div> <p>Bilamana jumlah deposit batubara sudah diketahui, perusahaan akan melakukan pengangkutan batubara ke ROM untuk diproses lebih lanjut. <i>Coal processing</i>, terdiri dari proses <i>sizing</i> dan <i>coal preparation</i> dilakukan di area <i>Coal processing plant</i> (CPP). Dari CPP batubara akan diangkut dengan menggunakan <i>conveyor belt</i> sepanjang +13 km dari CPP ke <i>port stockpile</i>. Setibanya di <i>port stockpile</i> loading batubara akan dilakukan dengan menggunakan <i>reclaimer</i>, <i>stacker</i> dan <i>ship loader</i> yang terhubung ke area <i>jetty</i> dan langsung ke palka kapal. Tidak ada pengemasan secara khusus untuk produk yang dikirimkan ke pelanggan.</p>	Tahun	Produksi (Ton)	Overburden Removal (cm³)	2010	39.332.000	490.273	2011	40.976.000	499.112	<p>Standar Fulfilled</p>
Tahun	Produksi (Ton)	Overburden Removal (cm³)										
2010	39.332.000	490.273										
2011	40.976.000	499.112										
<p><b>Aspek: Kepatuhan</b></p>												
<p>EN28</p> <p>Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran</p>	<p>C</p>	<p>Komitmen KPC terhadap perbaikan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan diwujudkan melalui pemenuhan atas seluruh ketentuan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah sesuai hasil pemantauan kualitas air dan udara serta</p>	<p>Standar Fulfilled</p>									

terhadap hukum dan regulasi lingkungan		pencapaian target reklamasi lahan. Sepanjang tahun 2011, KPC telah berhasil memenuhi kriteria baku mutu dan perundangan-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku. Oleh karenanya, tidak ada sanksi administrasi yang dibebankan terkait dengan pelanggaran baku mutu maupun denda akibat pelanggaran kinerja pengelolaan lingkungan.	
Aspek: Pengangkutan/Transportasi			
EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.	A	Untuk mengelola dampak lingkungan yang berasal dari pengangkutan batubara dari areal tambang ke lokasi penumpukan batubara, KPC melakukan pemantauan rutin kualitas udara di lokasi pemukiman di sekitar tambang dan pengujian emisi kendaraan, yang dilakukan oleh pihak independen. Hasil pemantauan kualitas udara selama tahun 2011 memenuhi baku mutu di seluruh lokasi pemantauan.	Standar Fulfilled
Aspek: Menyeluruh			
EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.	A	Realisasi biaya pemeliharaan lingkungan yang telah KPC keluarkan di tahun 2011 adalah sebesar US\$53,83 juta, melebihi rencana anggaran tahun 2011 sebesar US\$51,17 juta. Total biaya tersebut meliputi biaya pengelolaan lingkungan (penataan lahan, pesemaian, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemeliharaan armada rehabilitasi, perencanaan reklamasi, pengerukan sedimen, pengelolaan air asam, pembangunan kolam pengendap, pengelolaan hidrokarbon dan limbah), pemantauan lingkungan (pengadaan peralatan pantau, pengambilan sampel air dan udara, analisis laboratorium, upah tenaga kerja), pelatihan lingkungan, program pelestarian lingkungan, peringatan hari lingkungan hidup, dan audit <i>surveillance</i> ISO 14001.	Standar Fulfilled

**Tabel V.14**

Anggaran dan Realisasi Biaya Pemeliharaan Lingkungan 2011  
2011 Performance Analysis and Environmental Management

	RENCANA	REALISASI
<b>Dasar Tahun 2011 100%</b>		
Pengelolaan Lingkungan	17.065.170	16.045.965
Penataan Lahan	4.690.000	4.690.000
Pesemaian	1.000.000	1.000.000
Penanaman	1.000.000	1.000.000
Pemeliharaan Tanaman	1.000.000	1.000.000
Pemeliharaan Armada Rehabilitasi	1.000.000	1.000.000
Perencanaan Reklamasi	1.000.000	1.000.000
Pengerukan Sedimen	1.000.000	1.000.000
Pengelolaan Air Asam	1.000.000	1.000.000
Pembangunan Kolam Pengendap	1.000.000	1.000.000
Pengelolaan Hidrokarbon dan Limbah	1.000.000	1.000.000
Pemantauan Lingkungan	1.000.000	1.000.000
Pengadaan Peralatan Pantau	1.000.000	1.000.000
Pengambilan Sampel Air dan Udara	1.000.000	1.000.000
Analisis Laboratorium	1.000.000	1.000.000
Upah Tenaga Kerja	1.000.000	1.000.000
Pelatihan Lingkungan	1.000.000	1.000.000
Program Pesta Lingkungan	1.000.000	1.000.000
Peringatan Hari Lingkungan Hidup	1.000.000	1.000.000
Audit ISO 14001 (Surveillance)	1.000.000	1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>51.171.222</b>	<b>53.833.854</b>

Dari tabel di atas, KPC tidak dapat memenuhi seluruh indikator lingkungan hidup yang disarankan GRI. KPC hanya memenuhi 29 indikator dari yaitu 17 indikator inti dan 13 indikator tambahan. Sedangkan yang satunya adalah Setengah Penuh (*Partially Fulfilled*) dari indikator inti. Aspek yang setengah penuh itu adalah pada aspek Emisi, Efluen dan Limbah pada indikator ke 19 (EN19). Keterangan indikator adalah Emisi bahan kimia yang merusak lapisan



ozon (*ozone-depleting substances*/ODS) diperinci berdasarkan berat, didalam keterangan, Laporan Berkelanjutan KPC hanya menjelaskan akibat yang ditimbulkan tapi tidak diperinci berdasarkan beratnya sebagai mana yang diminta oleh standar GRI. Karena KPC masih melakukan pengujian dan pengukuran untuk hasil emisi kegiatan operasional perusahaan.

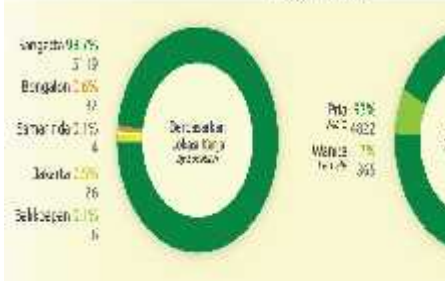
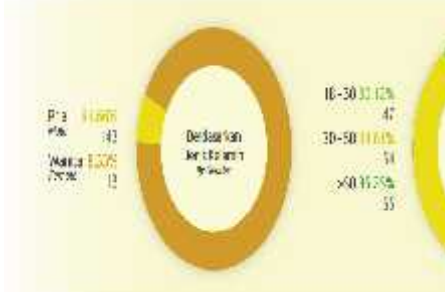
### V.2.3 Indikator Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak

Indikator-indikator ini menggambarkan tanggung jawab sosial dari usaha bisnis perusahaan dan praktek tenaga kerja. Terdiri dari 6 aspek, yaitu aspek pekerjaan, aspek tenaga kerja/hubungan manajemen, aspek kesehatan dan keselamatan jabatan, aspek pelatihan dan pendidikan, aspek keberagaman dan kesempatan setara, aspek remunerasi sama untuk pria dan wanita. Serta 15 indikator, yaitu 10 indikator inti dan 5 indikator tambahan.

**Tabel V.15**

#### **Pemenuhan Indikator-indikator Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak**


<b>Indikator-indikator Kinerja Lingkungan Hidup</b>	<b>C/A</b>	<b>Aplikasi dalam Laporan keberlanjutan</b>	<b>Standar Pemenuhan</b>	<b>Halaman</b>
<b>Aspek: Pekerjaan</b>				
LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah, kondisi yang buruk berdasarkan jenis kelamin.	<b>C</b>	Tercatat pada akhir tahun 2011, KPC memiliki 5.187 orang karyawan, terdiri dari 5.035 karyawan tetap dan 152 karyawan Kontrak. Untuk lebih jauh mengenai profil jumlah dan distribusi karyawan kami berdasarkan lokasi kerja, tingkat pendidikan, status kepegawaian, dan jenis kelamin, tergambar dalam ilustrasi berikut: <b>Tabel V.16</b>	Standar Partially Fulfilled	96

				
<p>LA2</p> <p>Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.</p>	C	<p>Total karyawan yang berhenti ataupun diberhentikan dari perusahaan selama tahun 2011 adalah sebanyak 156 orang yang tidak lagi bekerja di KPC dengan alasan, di antaranya: mencapai usia pensiun, mengundurkan diri, diberhentikan, alasan kesehatan, dan alasan lainnya. Rincian data tingkat perputaran karyawan selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:</p> <p><b>Tabel V.17</b></p> 	Standar Partially Fulfilled	98
<p>LA3</p> <p>Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.</p>	A	<p>Bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, akan memberikan manfaat pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun KPC, Perolehan manfaat pensiun karyawan ini tidak dialokasikan bagi karyawan dengan status karyawan kontrak. Selain itu, karyawan KPC juga menerima cuti tahunan sebanyak 16 hari kalender dengan mendapatkan uang cuti tahunan (<i>Annual Leave Premium</i>) sebesar 225% dari upah pokok ditambah uang sebesar Rp 750.000,- (PKB, artikel 41). Perusahaan juga memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) sebesar 150% dari gaji pokok ditambah uang sebesar Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan minimal imbelas hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.</p>	Standar Fully Fulfilled	110 11




		Transpor cuti ( <i>Leave Fares</i> ) diberikan kepada karyawan permanen dan tanggungannya yang sah, sedangkan pegawai dengan status kontrak <i>Leave Fares</i> hanya diberikan untuk yang bersangkutan saja.		
LA15 Kembali ke pekerjaan dan tingkat retensi setelah cuti, berdasarkan jenis kelamin.	C	KPC sangat memperhatikan tingkat Fleksibilitas karyawan khususnya untuk hal-hal terkait keseimbangan kerja dengan tanggung jawab keluarga setiap karyawan. Tingkat fleksibilitas yang dimaksud mencakup waktu kerja bagi karyawan tetap, waktu kerja bagi karyawan paruh waktu, dan waktu cuti untuk karyawan pria setelah istrinya melahirkan. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari upaya KPC guna memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki keseimbangan hidup sebagai bagian integral dari kehidupan kerja di KPC. Di samping cuti tahunan, karyawan wanita berhak atas 3 bulan atau 12 minggu cuti bersalin ( <i>maternity leave</i> ), dan 2 hari cuti ayah ( <i>paternity leave</i> ).	Standar Fully Fulfilled	105
<b>k: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen</b>				
LA4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.	C	<p>PKB (Perjanjian Kerja Bersama) mengatur semua hak dan kewajiban seluruh karyawan KPC termasuk jajaran manajemen. Tim PKB periode Juli 2011–Juni 2013 berjumlah 22 orang, terdiri dari 9 orang wakil manajemen dan 13 orang wakil SP/SB.</p> <p>Sesuai dengan amanat undang-undang, perusahaan mengakui keberadaan Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB) termasuk keterlibatan mereka di dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama secara setara sesuai aturan yang berlaku. Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS) juga telah dibentuk sejak 31 Januari 2005 dimana pengurus dan anggotanya terdiri dari 10 orang perwakilan manajemen dan 10 orang perwakilan SP/SB.</p> <p>Karyawan KPC yang terdaftar sebagai anggota Serikat Pekerja/Buruh adalah sebanyak 4.489 orang atau 86,5% dari total jumlah karyawan.</p>	Standar Fully Fulfilled	107 108 109
LA5	C	Bagi karyawan yang mengajukan	Standar	98

<p>Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.</p>		<p>pengunduran diri, maka sesuai UU Ketenagakerjaan No.13 dan PKB yang berlaku, surat pengunduran diri harus disampaikan kepada atasan minimum 1 bulan sebelumnya.</p> <p>Pasal 13.2 PKB mengatur tentang prosedur serta pemberitahuan mengenai perubahan operasional perusahaan, dimana tercantum bahwa setiap rencana perubahan yang berhubungan dengan operasi secara signifikan akan didahului dengan pemberitahuan kepada seluruh karyawan minimal tujuh hari sebelumnya. Sementara hal-hal terkait pemberhentian atau pengurangan tenaga kerja, ditetapkan melalui PKB Pasal 75 tentang pembahasan dan kesepakatan menyangkut pesangon 3 bulan sebelumnya.</p> <p>Segala bentuk perubahan kebijakan atau program kerja dikomunikasikan kepada karyawan sesuai kepentingan dan tujuannya. Komunikasi rutin juga dilakukan baik kepada para atasan, staff admin, maupun kepada seluruh karyawan dalam rangka mensosialisasikan kebijakan atau peraturan perusahaan. Khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan perubahan dalam Perjanjian Kerja Bersama, disosialisasikan kepada seluruh karyawan.</p>	<p>Fully Fulfilled</p>	<p>107 108</p>
<b>Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan</b>				
<p>LA6</p> <p>Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.</p>	<p>A</p>	<p>Peranan dan tanggung jawab KPC terhadap seluruh kontraktor, diwujudkan melalui upaya pemantauan dan memastikan efektivitas kinerja mereka yang juga turut memperhatikan risiko komersial, teknis, lingkungan serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</p> <p>Berbagai Forum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dibentuk sebagai wadah diskusi mengenai K3 yang dilakukan rutin baik di kalangan internal KPC dan juga dengan para kontraktor. Pertemuan dengan karyawan umumnya dilakukan setiap minggu, dipandu oleh pengawas masing-masing, terutama di level divisi dan departemen operasional. Di dalam</p>	<p>Standar Fully Fulfilled</p>	<p>57 115</p>

		<p>Forum K3, para coordinator safety yang bertugas di seluruh divisi atau departemen berperan aktif dalam menyiapkan topik, materi hingga sosialisasi berbagai informasi, prosedur dan peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Dari 24.272 karyawan KPC dan kontraktornya, sebanyak 533 atau 2,2% merupakan koordinator K3 atau petugas K3. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan topik utama yang selalu dibahas dalam berbagai forum pertemuan rutin antara pengawas dan pimpinan.</p> <p>Di tingkat perusahaan, secara berkala Pertemuan Safcon (<i>Safety Contractor</i>) dilaksanakan dengan melibatkan General Manager, manajer dan praktisi K3L KPC serta manajer dan praktisi K3L kontraktor.</p>																												
LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.	C	<p>Selama tahun 2011, terjadi 16 kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan jam kerja (<i>Lost Time Injury-LTI</i>), 6 kecelakaan menimpa karyawan KPC dan 10 kecelakaan menimpa karyawan kontraktor. Penyebab kecelakaan bervariasi, terdiri dari 25% kecelakaan yang terjadi akibat perencanaan kerja yang tidak memadai. Sementara itu, tingkat kekerapan kecelakaan berakibat cedera yang tidak menyebabkan LTI adalah 2,6 per 1 juta jam kerja, dan tercatat 170 kejadian tanpa mengakibatkan LTI. Sejak awal implementasi di tahun 1996 sampai dengan akhir tahun 2011, tren kinerja keselamatan kami menunjukkan hasil sungguh positif, dengan jumlah LTI semakin berkurang sementara jumlah jam kerja dan jumlah karyawan serta kontraktor yang dikelola dari tahun ke tahun semakin meningkat.</p> <p><b>Tabel V.18</b></p>  <table><caption>Tren Kecelakaan Akibat Kegiatan Kerja (LA7)</caption><tr><th>Tahun</th><th>Jumlah Kecelakaan</th></tr><tr><td>1996</td><td>1.000</td></tr><tr><td>1997</td><td>1.200</td></tr><tr><td>1998</td><td>1.500</td></tr><tr><td>1999</td><td>1.800</td></tr><tr><td>2000</td><td>2.000</td></tr><tr><td>2001</td><td>2.200</td></tr><tr><td>2002</td><td>2.500</td></tr><tr><td>2003</td><td>2.800</td></tr><tr><td>2004</td><td>3.000</td></tr><tr><td>2005</td><td>3.200</td></tr><tr><td>2006</td><td>3.500</td></tr><tr><td>2007</td><td>3.800</td></tr></table>	Tahun	Jumlah Kecelakaan	1996	1.000	1997	1.200	1998	1.500	1999	1.800	2000	2.000	2001	2.200	2002	2.500	2003	2.800	2004	3.000	2005	3.200	2006	3.500	2007	3.800	Standar Fully Fulfilled	116 117
Tahun	Jumlah Kecelakaan																													
1996	1.000																													
1997	1.200																													
1998	1.500																													
1999	1.800																													
2000	2.000																													
2001	2.200																													
2002	2.500																													
2003	2.800																													
2004	3.000																													
2005	3.200																													
2006	3.500																													
2007	3.800																													

		Sementara itu dari kesimpulan tim program rehabilitasi kerja yang terdiri dari Chief Medical Officer, perwakilan bagian kesehatan kerja dan divisi Human Resource, selama tahun 2011 tidak ada karyawan KPC yang mengalami penyakit akibat kerja.		
LA8 Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/ bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.	C	<p>Selain program pengembangan kompetensi karyawan, KPC juga memberikan pendidikan, pelatihan, konseling, penyuluhan tindakan pencegahan dan tindakan lanjutan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, sebagai bagian dari upaya preventif KPC untuk melindungi karyawan dari potensi mengalami cedera atau penyakit akibat kerja. Diantaranya dengan melakukan pengawasan potensi bahaya kesehatan di tempat kerja seperti kebisingan, kadar debu, penerangan, ventilasi, tekanan panas, kandungan gas beracun, getaran di alat berat dan program menuju sehat. Selain itu, kami menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan mengenai pengendalian kelelahan yang pesertanya adalah para pekerja <i>shift</i> dan juga para istri dari pekerja <i>shift</i>.</p> <p>Pada tahun 2011, melalui Departemen <i>Occupational Health and Safety</i>, KPC memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai program pemeliharaan pendengaran khususnya bagi karyawan dan kontraktor yang bekerja di area dengan tingkat kebisingan tinggi. KPC juga memberikan penyuluhan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja serta melakukan inspeksi keamanan pangan di kantin-kantin kami maupun kantin sekolah untuk menjaga kualitas makanan.</p>	Standar Fully Fulfilled	100 119 120
LA9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.	A	Bagi KPC, aspek keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan adalah prioritas nomor satu dalam menjalankan aktivitas penambangan kami. Selain diatur di dalam peraturan keselamatan perusahaan secara khusus, perjanjian kerja bersama (PKB) yang merupakan kesepakatan antara manajemen dan perwakilan pekerja secara tegas telah memuat hal-hal	Standar Fully Fulfilled	120

		terkait keselamatan dan kesehatan.		
<b>Aspek: Pelatihan dan Pendidikan</b>				
LA10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.	C	<p>KPC memiliki program-program pelatihan dan pengembangan karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan, menyegarkan keahlian dan pengetahuan karyawan. Selama tahun 2011, KPC menyelenggarakan berbagai program pelatihan kepada karyawan dengan jumlah total 133.313 jam pelatihan dengan rata-rata jumlah jam pelatihan mencapai 35,9 jam untuk setiap karyawan per tahun seperti ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:</p> <p><b>Tabel V.19</b></p> 	Standar Fully Fulfilled	99
LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.	A	KPC melaksanakan program pelatihan selama Masa Persiapan Pensiun (MPP) rutin bagi karyawan dan istrinya untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental dalam menghadapi masa pensiun dan membekali mereka dengan keterampilan maupun pengetahuan dalam mengelola kesehatan dan gizi, hubungan keluarga yang harmonis, konsultasi psikologi dan pengelolaan keuangan. Pelatihan ini juga ditujukan untuk memberikan pengetahuan praktis tentang kewirausahaan, disertai dengan kunjungan lapangan satu hari penuh untuk meninjau, berbagi wawasan dan berbagi pengalaman dengan para pensiunan perusahaan yang sudah merintis usaha atau wirausahawan lain yang dianggap telah berhasil dalam bisnisnya.	Standar Fully Fulfilled	103
LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara	A	Semua karyawan KPC mendapatkan penilaian kinerja setiap tahunnya. Penilaian kinerja karyawan dilakukan setiap akhir kuartal untuk karyawan kontrak, dan setiap akhir tahun untuk karyawan tetap. Hasil dari penilaian kinerja digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan dan keputusan	Standar Fully Fulfilled	103

teratur.		KPC dalam mengelola sumber daya manusia, antara lain untuk menentukan: Pelatihan dan pengembangan Perencanaan karir. Remunerasi dan kebijakan lain yang berhubungan dengan karyawan.		
<b>Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara</b>				
LA13 Komposisi badan pengelola/pengusaha dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.	C	KPC membuka kesempatan seluas-luasnya bagi karyawan wanita untuk berperan dalam pengambilan keputusan dan operasional di KPC. Saat ini tercatat sebanyak 365 orang karyawan wanita bekerja di KPC, mewakili 7% dari total jumlah karyawan kami. Enam orang di antaranya duduk pada jabatan di tingkat <i>senior management</i> .	Standar Partially Fulfilled	102
<b>Aspek: Remunerasi Sama Untuk Pria dan Wanita</b>				
LA14 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dengan laki-laki berdasarkan kategori karyawan, dengan lokasi operasi yang signifikan.	C	Sebagai operator tambang batubara kelas dunia dan sebagai bentuk penghormatan kepada hak asasi manusia, KPC tidak membedakan karyawan dari segi agama, suku, ras, maupun jenis kelamin. KPC membuka peluang berkarir seluas-luasnya dan melakukan proses rekrutmen, evaluasi kinerja, promosi dan remunerasi yang berdasarkan pada kualitas, kompetensi, pengalaman dan kinerja serta pencapaian dari masing-masing individu. Hak atas remunerasi yang diterima oleh karyawan dihitung berdasarkan lama masa kerja, beban kerja, tanggung jawab dan hasil penilaian kinerja.	Standar Fully Fulfilled	100

Dalam aspek pekerjaan, ada dua indikator yang Setengah Terpenuhi, yaitu pada indikator LA 1 dan LA 2. LA 1 keterangannya adalah untuk jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah, kondisi yang urk berdasarkan jenis kelamin. KPC hanya memberikan jumlah tenaga kerja kontrak, jumlah tenaga kerja berdasarkan wilayah, dan jumlah karyawan

berdasarkan jenis kelamin, tetapi KPC tidak memberikan keterangan karyawan berdasarkan jenis pekerjaan dan jumlah karyawan dalam kondisi buruk. Sedangkan pada LA 2, menjelaskan jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin dan wilayah, dalam hal ini KPC hanya menjelaskan jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin dan umur, tetapi tidak ada menjelaskan perputaran karyawan berdasarkan wilayahnya. Jadi indikator LA 1 dan LA 2 tergolong kepada Standar Setengah Terpenuhi (*Standar Partially Fulfilled*).

Begitu juga pada Aspek keberagaman dan kesempatan setara, yang menerangkan komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain., yaitu pada Indikator LA 13. Hanya menjelaskan kesetaraan bagi wanita, tetapi tidak menjelaskan komposisinya dengan jelas seperti yang di sarankan.

Jadi, dari tabel di atas KPC hanya memenuhi 12 indikator (7 indikator inti dan 5 indikator tambahan) dari 15 indikator (10 indikator inti dan 5 indikator tambahan), sedangkan 3 indikator lainnya dari indikator inti adalah standar setengah terpenuhi (*Standar Partially Fulfilled*), yaitu pada aspek pekerjaan dan aspek keberagaman dan kesempatan setara.

#### **V.2.4 Indikator Hak Asasi Manusia**

Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia menentukan bahwa organisasi harus melaporkan sejauh mana hak asasi manusia diperhitungkan dalam investasi dan

praktek pemilihan supplier/kontraktor. Sebagai tambahan, Indikator ini meliputi pelatihan mengenai hak asasi manusia bagi karyawan dan aparat keamanan, sebagaimana juga bagi nondiskriminasi, kebebasan berserikat, tenaga kerja anak, hak adat, serta kerja paksa, dan kerja wajib. Terdiri dari 9 aspek, yaitu aspek praktek investasi dan pengadaan, aspek nondiskriminasi, aspek kebebasan berserikat dan berunding bersama berkumpul, aspek pekerja anak, aspek kerja paksa dan kerja wajib, aspek praktek/tindakan pengamanan, aspek hak penduduk asli, penilaian, dan aspek remediasi. Serta 11 indikator, terdiri dari 9 indikator inti dan 2 indikator tambahan.

**Tabel V.20**  
**Pemenuhan Indikator-indikator Hak Asasi Manusia**


Indikator-indikator Hak Asasi Manusia	C/A	Aplikasi dalam Laporan keberlanjutan	Standar Pemenuhan	Halaman
<b>Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan</b>				
HR1 Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.	C	KPC mendukung dan melaksanakan TataKelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance/GCG</i> ) melalui penerapan Pedoman Perilaku. Pedoman perilaku menjabarkan nilai-nilai utama dan norma perilaku yang menjadi dasar bagi KPC dalam menjalankan usahanya. Pedoman perilaku tersebut terdiri dari empat bidang etika, yaitu etika yang berkaitan dengan karyawan, hubungan lingkungan dan masyarakat, pelanggan, pemasok dan pesaing, serta etika berhubungan dengan pemegang saham, termasuk penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. 100% supplier ataupun kontraktor yang bekerja di Perusahaan telah mengikuti proses seleksi dan wajib untuk mematuhi Pedoman Perilaku KPC.  Selain itu, CMS (Contractor Management System) turut mencantumkan persyaratan yang berhubungan dengan aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia, di antaranya: perjanjian kerja setiap karyawan kontraktor, terdaftarnya karyawan kontraktor dalam keanggotaan jamsostek, pernyataan gaji	Standar Fully Fulfilled	24 57 58 96



		<p>minimum karyawan beserta komponen gaji.</p> <p>KPC telah menerapkan audit terkait aspek sumber daya manusia (SDM) yang mulai dilaksanakan di tahun 2011. Audit SDM yang juga merupakan salah satu klausul dalam CMS, telah dilakukan terhadap seluruh kontraktor KPC dan para pemasok, terutama para <i>significant suppliers</i>, yaitu para pemasok dengan nilai pembelian yang tinggi dan/atau kritikal memiliki kontrak jasa. untuk memastikan penerapan aspek hak asasi manusia seperti pemenuhan UMSK, Jamsostek, lama jam kerja, cuti, pekerja anak dan lain-lain yang disyaratkan oleh undang-undang. Selain dilakukan terhadap seluruh kontraktor, Dan para kontraktor dan pemasok yang bermitra dengan KPC diwajibkan untuk mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan standar keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang berlaku di KPC yang tertuang di dalam setiap klausul perjanjian kontrak kerja sama antara kontraktor atau pemasok dengan KPC.</p>		
<p>HR2</p> <p>Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM</p>	C	<p>KPC telah menerapkan audit terkait aspek sumber daya manusia (SDM) yang mulai dilaksanakan di tahun 2011. Audit SDM yang juga merupakan salah satu klausul dalam CMS, telah dilakukan terhadap seluruh kontraktor untuk memastikan penerapan aspek hak asasi manusia seperti pemenuhan UMSK, Jamsostek, lama jam kerja, cuti, pekerja anak dan lain-lain yang disyaratkan oleh undang-undang. Selain dilakukan terhadap seluruh kontraktor, audit SDM ini juga dilakukan terhadap para pemasok, terutama para <i>significant suppliers</i>, yaitu para pemasok dengan nilai pembelian yang tinggi dan/atau kritikal memiliki kontrak jasa. Para kontraktor dan pemasok yang bermitra dengan KPC diwajibkan untuk mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan standar keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang berlaku di KPC. Hal tersebut tertuang di dalam setiap klausul perjanjian kontrak kerja sama antara kontraktor atau pemasok dengan KPC</p>	<p>Standar</p> <p>Fully</p> <p>Fulfilled</p>	<p>57</p> <p>58</p> <p>106</p>
<p>HR3</p> <p>Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur</p>	C	<p>Secara berjenjang hingga ke level pelaksana, sosialisasi Pedoman Perilaku dan <i>Speak Up system</i> dilakukan oleh Komite Pedoman Perilaku serta masing-masing bisnis unit terkait. Untuk membantu sosialisasi tersebut, Perusahaan banyak menempatkan poster terkait <i>Speak Up system</i> di tempat-tempat strategis sehingga mudah dibaca oleh seluruh karyawan.</p>	<p>Standar</p> <p>Fully</p> <p>Fulfilled</p>	<p>25</p> <p>103</p>

terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.		Di tahun 2011, sosialisasi telah dilakukan kepada seluruh karyawan KPC. Selain itu semua anggota Satuan Pengamanan ( <i>security</i> ) KPC disyaratkan mengikuti Pendidikan Dasar (DIKSAR) Satpam yang diadakan oleh Polda dimana materi serta kurikulum pelatihan telah mencakup aspek hak-hak asasi manusia. Sebanyak 464 orang atau 99,8% dari 465 anggota Satuan Pengamanan di Marga Sukses Sejahtera, Nawakara Perkasa Nusantara dan <i>Global Arrow</i> telah mengikuti Pendidikan Dasar (DIKSAR). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 99%.		
<b>Aspek: Nondiskriminasi</b>				
HR4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.	C	Sebagai operator tambang batubara kelas dunia dan sebagai bentuk penghormatannya kepada hak asasi manusia, KPC tidak membedakan karyawan dari segi agama, suku, ras, maupun jenis kelamin. Perusahaan membuka peluang berkarir seluas-luasnya dan melakukan proses rekrutmen, evaluasi kinerja, promosi dan remunerasi yang berdasarkan pada kualitas, kompetensi, pengalaman dan kinerja serta pencapaian dari masing-masing individu. Hak atas remunerasi yang diterima oleh karyawan dihitung berdasarkan lama masa kerja, beban kerja, tanggung jawab dan hasil penilaian kinerja.	Standar Fully Fulfilled	100
<b>Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul</b>				
HR5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.	C	Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan Perusahaan, maka KPC menetapkan bahwa: Setiap individu Perusahaan dilarang memanfaatkan informasi penting dan rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak terkait lain yang dapat merugikan Perusahaan. Setiap individu Perusahaan yang terkait dalam pengambilan keputusan untuk transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan, dilarang mengikuti seluruh tahapan pengambilan keputusan transaksi tersebut. Antara jajaran Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sehingga menimbulkan peluang terjadinya transaksi benturan kepentingan.  Sesuai dengan amanat undang-undang, KPC mengakui keberadaan Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB) termasuk keterlibatan mereka di dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama secara	Standar Fully Fulfilled	28 108

		setara sesuai aturan yang berlaku. Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS) juga telah dibentuk sejak 31 Januari 2005 dimana pengurus dan anggotanya terdiri dari 10 orang perwakilan manajemen dan 10 orang perwakilan SP/SB.		
<b>Aspek: Pekerja Anak</b>				
HR6 Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.	C	Dalam proses rekrutmen karyawan, KPC senantiasa berpedoman pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku termasuk usia minimum calon karyawan. Sepanjang KPC beroperasi, tidak pernah mempekerjakan karyawan berusia di bawah 18 tahun. Peraturan Perusahaan menegaskan bahwa usia minimal calon karyawan yang dapat diterima sebagai karyawan adalah 18 tahun.	Standar Fully Fulfilled	102
<b>Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib</b>				
HR7 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.	C	Sejak awal beroperasi, KPC tidak pernah melakukan pemaksaan pekerjaan kepada karyawan tertentu. Jadwal kerja yang diterapkan selalu mengacu kepada aturan ketenagakerjaan yang berlaku dan merupakan hasil kesepakatan antara manajemen dengan wakil karyawan termasuk ketika hendak mempekerjakan karyawan di luar jam kerja normalnya. Begitu juga dengan pemberian tugas kepada pekerja selalu mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Karyawan berhak menolak perintah atasan yang melanggar prosedur atau membahayakan keselamatan jiwa.	Standar Fully Fulfilled	103
<b>Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan</b>				
HR8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan	A	Sejak Bulan April 2010 wilayah pengamanan di area operasional KPC telah dibagi menjadi 3 wilayah pengamanan dengan menunjuk tiga Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) sebagai pelaksana pengamanan. Semua anggota Satuan Pengamanan ( <i>security</i> ) KPC disyaratkan mengikuti Pendidikan Dasar (DIKSAR) Satpam	Standar Fully Fulfilled	113

dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi		yang diadakan oleh Polda dimana materi serta kurikulum pelatihan telah mencakup aspek hak-hak asasi manusia. Sebanyak 464 orang atau 99,8% dari 465 anggota Satuan Pengamanan di Marga Sukses Sejahtera, Nawakara Perkasa Nusantara dan <i>Global Arrow</i> telah mengikuti Pendidikan Dasar (DIKSAR). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 99%.		
<b>Aspek: Hak Penduduk Asli</b>				
HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.	A	<p>Selama tahun 2011, total keluhan yang dikelola oleh sistem umpan balik berjumlah delapan keluhan, terdiri dari lima keluhan terkait dengan kriteria lingkungan dan tiga keluhan terkait dengan konflik sosial. Seluruh keluhan tersebut dapat dikelola dan berhasil diselesaikan (berstatus <i>closed</i>) di akhir 2011. Tidak ada insiden ataupun peristiwa yang melibatkan kekerasan yang terkait dengan penanganan keluhan ataupun penyelesaian konflik dengan masyarakat.</p> <p><b>Tabel V.21</b></p> 	Standar Partially Fulfilled	137
<b>Aspek: Penilaian</b>				
HR10 Persentase dan jumlah operasi yang telah tunduk pada ulasan-ulasan hak asasi manusia dan / atau dampak penilaian.	C	<p>CMS (<i>Contractor Management System</i>) turut mencantumkan persyaratan yang berhubungan dengan aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia, di antaranya: perjanjian kerja setiap karyawan kontraktor, terdaptarnya karyawan kontraktor dalam keanggotaan jamsostek, pernyataan gaji minimum karyawan beserta komponen gaji.</p> <p>KPC telah menerapkan audit terkait aspek sumber daya manusia (SDM) yang mulai dilaksanakan di tahun 2011. Audit SDM yang juga merupakan salah satu klausul dalam CMS, telah dilakukan terhadap seluruh kontraktor untuk memastikan penerapan aspek hak asasi manusia seperti pemenuhan UMSK, Jamsostek, lama jam kerja, cuti, pekerja anak dan lain-lain yang disyaratkan oleh undang-undang. Selain dilakukan terhadap seluruh kontraktor, audit SDM ini juga dilakukan terhadap para</p>	Standar Not Fulfilled	57 58

		pemasok, terutama para <i>significant suppliers</i> , yaitu para pemasok dengan nilai pembelian yang tinggi dan/atau kritikal memiliki kontrak jasa.																				
Aspek: Remediasi																						
HR11 Jumlah keluhan yang berkaitan dengan hak asasi manusia diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui jalur formal mekanisme pengaduan.	C	<p>Berdasarkan data tahun 2011, keluhan lingkungan menempati porsi terbesar yaitu lima keluhan (62,2%). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan jumlah keluhan lingkungan di tahun 2010 sebanyak satu keluhan. Keluhan terkait lingkungan tahun 2011, seluruhnya terkait masalah air, dimana warga mengeluhkan bahwa kegiatan operasional KPC telah menyebabkan keruhnya air sungai Sangatta. Keluhan ini telah diinvestigasi lebih lanjut dengan turut melibatkan wakil-wakil masyarakat dan badan lingkungan hidup (BLH) Kutai Timur. Hasil investigasi bersama ini menunjukkan bahwa keruhnya air sungai Sangatta yang dikeluhkan oleh warga bukanlah akibat buangan limbah ataupun kegiatan operasional KPC. KPC telah mengkomunikasikan hal ini kepada warga dan mengundang perwakilan warga masyarakat serta pemerintah daerah setempat dalam kegiatan <i>Mining Tour: KPC Water Management</i>. Di tahun 2011 seluruh keluhan yang diterima dapat diselesaikan dengan status akhir <i>closed</i>.</p> <p><b>Tabel V.22</b></p> <table><caption>Perbandingan Keluhan Berdasarkan Kriteria</caption><tr><th>Kriteria</th><th>2010</th><th>2011</th></tr><tr><td>Hutan</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>Air</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>Pemasok</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Pengaruh Lingkungan</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Hewan</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Kriteria	2010	2011	Hutan	1	0	Air	1	5	Pemasok	0	0	Pengaruh Lingkungan	0	0	Hewan	0	0	Standar Fully Fulfilled	138
Kriteria	2010	2011																				
Hutan	1	0																				
Air	1	5																				
Pemasok	0	0																				
Pengaruh Lingkungan	0	0																				
Hewan	0	0																				

Aspek hak penduduk asli (HR 9) hanya menjelaskan jumlah pelanggaran tetapi tidak menjelaskan cara ataupun langkah penyelesaiannya untuk mengatasinya. Seperti yang disarankan yaitu Jumlah kasus pelanggaran yang

terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil. Jadi hanya tergolong kepada Standar Setengah Terpenuhi.

Pada Aspek penilaian (HR 10) menerangkan Persentase dan jumlah operasi yang telah tunduk pada ulasan-ulasan hak asasi manusia dan/atau dampak penilaian. Tapi dalam hal ini KPC pada tahun 2011 masih baru melaksanakan Audit untuk penilaian tersebut. Jadi KPC belum memenuhi standar atau *Standar Not Fulfilled*.

Dari tabel di atas, dapat dilihat KPC hanya dapat memenuhi memenuhi 9 indikator (8 indikator inti dan 1 indikator tambahan) dari 9 indikator inti dan 2 indikator tambahan, satu nya setengah penuh (*Partially Fulfilled*) dari indikator tambahan, dan satu lagi tidak terpenuhi (*Not Fulfilled*) dari indikator inti, yaitu pada aspek hak penduduk asli dan aspek penilaian.

#### **V.2.5 Indikator Kinerja Masyarakat**

Indikator Kinerja Masyarakat memperhatikan dampak organisasi terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi, dan menjelaskan risiko dari interaksi dengan institusi sosial lainnya yang mereka kelola. Pada khususnya, informasi yang dicari berhubungan dengan risiko yang diasosiasikan dengan suap, korupsi, praktek monopoli dan kolusi. Terdiri dari 5 aspek yaitu aspek komunitas lokal, aspek korupsi, aspek kebijakan publik, aspek kelakuan tidak bersaing, dan aspek kepatuhan. Serta 10 indikator, terdiri dari 8 indikator inti dan 2 indikator tambahan.

**Tabel V.23**  
**Pemenuhan Indikator-indikator Kinerja Masyarakat**

Indikator- Indikator Kinerja Masyarakat	C/ A	Aplikasi dalam Laporan keberlanjutan	Standar Pemenuh an	Halam an
<b>Aspek: Komunitas Lokal</b>				
S01 Persentase operasi dengan diimplementasi kan keterlibatan masyarakat lokal, dampak penilaian, dan program pembangunan.	C	Program pengembangan masyarakat ada 7 (tujuh) bidang program, yaitu: Pengembangan Agribisnis; Peningkatan Kesehatan Masyarakat; Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan; Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM); Peningkatan Infrastruktur; Pelestarian Alam dan Budaya; serta Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah. Karyawan KPC telah turut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti: transfer ilmu dan pengetahuan kepada kelompok penerima manfaat berupa pelatihan dan studi banding, distribusi stimulan dan pendampingan berkala.	Standar	50
		Keterlibatan masyarakat lokal dapat dilihat dari seluruh pemasok barang dan jasa yang terdaftar sampai dengan akhir tahun 2011, 163 mitra adalah pemasok lokal Kutai Timur (Kutim), 246 mitra adalah pemasok lokal Kalimantan Timur (Kaltim), Dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk masyarakat, KPC melibatkan 24 kontraktor lokal dalam 45 proyek pengerjaan.	Fully	53
		Dalam periode tahun 2011, tim tanggap darurat KPC telah mengirim anggotanya untuk membantu korban runtuhnya jembatan Tenggarong, Kutai Kartanegara dan juga telah berpartisipasi dalam IFRC ( <i>International Fire and Rescue Challenge</i> ) ke-14 di Berau Coal dan berhasil merebut juara 1 untuk kategori <i>Fire Fighting</i> , juara 2 untuk kategori <i>Under Water/Diving Rescue</i> , juara 3 untuk kategori <i>Motor Vehicle Accident Rescue</i> dan kategori <i>Rescue From Height</i> . Tim tanggap darurat KPC juga sudah memiliki 1 unit <i>Thermal Imaging Camera</i> yang merupakan satu-satunya alat yang ada di Indonesia, yaitu di KPC. KPC dalam menjalankan kegiatan CSR yang memadukan kepentingan ekonomi ( <i>profit</i> ) dengan kepentingan sosial ( <i>people</i> ) dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan ( <i>planet</i> ) pada operasional bisnisnya, diyakini akan memberikan kontribusi dan nilai tambah positif bagi pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan serta menempatkannya dalam jajaran warga korporasi yang memiliki reputasi dan tata kelola perusahaan yang baik.	Fulfilled	119 123 128 129

SO9 Operasi dengan potensi yang signifikan atau aktual dampak negatif terhadap masyarakat setempat.	C	Proses transportasi, bongkar, maupun loading dalam kegiatan produksi akan menyebabkan debu di sekitar lokasi operasuonal.	Standar Fully Fulfilled	30
SO10 Pencegahan dan mitigasi diimplementasikan dalam operasi dengan signifikan potensial atau aktual dampak negatif pada lokal masyarakat.	C	KPC menerapkan standar keselamatan dan kesehatan terakreditasi agar seluruh proses produksi, pemuatan maupun pengangkutan baik yang menggunakan alat berat maupun <i>conveyor belt</i> tidak mencelakakan ataupun menyebabkan gangguan kesehatan terhadap karyawan di lapangan maupun masyarakat sekitar. Salah satu contohnya adalah, untuk meminimalisir dampak debu selama proses transportasi, bongkar, maupun loading, kami secara rutin melakukan penyemprotan air ke area-area yang membutuhkan.	Standar Fully Fulfilled	30
<b>Aspek: Korupsi</b>				
S02 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.	C	<p>Sepanjang 2011, penilaian risiko kecurangan dilakukan terhadap seluruh divisi, mencakup divisi-divisi yang bertanggung jawab untuk hubungan eksternal, pengelolaan/kompensasi lahan dan pengembangan masyarakat.</p> <p>Dalam hal pengadaan barang dan jasa, KPC rutin mengundang kontraktor dan pemasok yang bertujuan untuk menjaga kredibilitas, keadilan, dan kepercayaan para pemasok barang/jasa, sesuai dengan <i>Standard Operation Procedures</i> (SOP) yang ditentukan oleh dari Divisi ada di Departemen Supply. Namun, bilamana terdapat keperluan yang sangat mendesak dan untuk proyek-proyek yang bernilai di bawah US\$500.000, <i>end user</i> bisa menunjuk langsung pemasok/kontraktor dengan melengkapi <i>waive to tender document</i> dengan persetujuan pimpinan divisi dan Chief Executive Officer. Untuk nilai kontrak di atas US\$500.000, maka harus mendapatkan juga persetujuan dari Presiden Direktur.</p>	Standar Fully Fulfilled	27 29 59
S03 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur anti korupsi.	C	Secara berjenjang hingga ke level pelaksana, sosialisasi Pedoman Perilaku dan <i>Speak Up system</i> dilakukan oleh Komite Pedoman Perilaku serta masing-masing bisnis unit terkait. Untuk membantu sosialisasi tersebut, Perusahaan banyak menempatkan poster terkait <i>Speak Up system</i> di tempat-tempat strategis sehingga mudah dibaca oleh seluruh karyawan. Di tahun 2011, sosialisasi telah dilakukan kepada seluruh karyawan KPC.	Standar Fully Fulfilled	25 29



		Sebagai wujud komitmen Perusahaan terhadap penegakan anti-korupsi, KPC telah menerjemahkannya ke dalam nilai-nilai integritas dan transparansi serta melakukan sosialisasi nilai-nilai ini kepada seluruh karyawan.		
S04 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.	C	Setiap pelanggaran Pedoman Perilaku baik yang melibatkan karyawan maupun manajemen senior akan ditindaklanjuti dengan investigasi atas laporan yang diterima. Sanksi terhadap pelanggar akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku. <i>Speak Up System</i> pelapor juga akan mendapatkan status tindak lanjut dari pelanggaran yang dilaporkannya. Selanjutnya, kinerja <i>Speak Up System</i> dievaluasi dan dilaporkan setiap bulannya kepada Divisi Internal Audit, Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit PT. Bumi Resources Tbk.. seluruh laporan yang kami terima telah ditindaklanjuti seluruhnya.  Berkaitan dengan tindak korupsi, sepanjang tahun 2011, tidak ditemukan adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh karyawan.	Standar Fully Fulfilled	25 27 29
<b>Aspek: Kebijakan Publik</b>				
S05 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.	C	UU no. 5/1979 mengenai Pemerintahan Desa, memandang desa sebagai perpanjangan tangan negara (desa korporatis). Dengan demikian masyarakat sipil tidak tumbuh di dalam wilayah desa sehingga ini melahirkan kepala desa yang dominan dan otokratis tanpa kontrol dari masyarakat. Di Tahun 2011, KPC melalui kajian oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD), memberikan masukan di dalam pembentukan sistem pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan melibatkan <i>stakeholder</i> desa. Di dalam usulan tersebut, diberikan masukan terhadap cara pandang dimana desa sebagai persekutuan masyarakat yang mampu mengatur dirinya sendiri. RUU Pemerintahan Desa ini dijadwalkan akan dibahas di DPR pada tahun 2012.	Standar Fully Fulfilled	140
S06 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan	A	Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan Perusahaan, maka KPC menetapkan bahwa, Setiap individu Perusahaan dilarang memanfaatkan informasi penting dan rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak terkait lain yang dapat merugikan Perusahaan. Setiap individu Perusahaan yang terkait dalam	Standar Not Fulfilled	28

negara di mana perusahaan beroperasi.		pengambilan keputusan untuk transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan, dilarang mengikuti seluruh tahapan pengambilan keputusan transaksi tersebut dan Antara jajaran Komisaris dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sehingga menimbulkan peluang terjadinya transaksi benturan kepentingan.		
<b>Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing</b>				
S07 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.	A	Selama tahun 2011, tidak terjadi insiden korupsi, perilaku anti-persaingan, praktik <i>anti-trust</i> dan monopoli. Selain itu, tidak ada insiden yang melanggar hukum dan peraturan.	Standar Fully Fulfilled	29
<b>Aspek: Kepatuhan</b>				
S08 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.	C	Tidak ada insiden yang melanggar hukum dan peraturan yang menyebabkan KPC harus membayar denda maupun sanksi non-moneter.	Standar Fully Fulfilled	21 29

Aspek kebijakan publik pada SO 6. Menjelaskan Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi. KPC hanya menjelaskan larangan keras untuk orang-orang yang terkait didalam perusahaan, tetapi tiak menjelaskan bagaimana pandangan dan kontribusi mereka terhapa Politik. Dan standar ini tidak sesuai dengan yang disarankan GRI berarti tergolong kepada Standar Tidak Terpenuhi.

Dari tabel di atas, dapat dilihat KPC hanya dapat memenuhi memenuhi 9 indikator (8 indikator inti dan 1 indikator tambahan) dari 10 indikator (8 indikator

inti dan 2 indikator tambahan), satu lagi *Not Fulfilled* (tidak terpenuhi) dari indikator tambahan, pada aspek kebijakan publik (SO6)

### 5.2.2 Indikator Kinerja Tanggung jawab Produk

Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk membahas aspek produk dari organisasi pelapor dan serta jasa yang diberikan yang mempengaruhi pelanggan, terutama, kesehatan dan keselamatan, informasi dan pelabelan, pemasaran, dan privasi. Terdiri dari 5 aspek, yaitu aspek kesehatan dan keamanan pelanggan, aspek pemasangan label bagi produk dan jasa, aspek komunikasi pemasaran, aspek keleluasaan pribadi (*privacy*) pelanggan, dan aspek kepatuhan. Serta 9 indikator, terdiri dari 4 indikator inti dan 5 indikator tambahan.

**Tabel V.24**  
**Pemenuhan Kinerja Tanggung jawab Produk**

Indikator-indikator kinerja Tanggung Jawab Produk	C/A	Aplikasi dalam Laporan keberlanjutan	Standar Pemenuhan	Halaman
<b>Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan</b>				
PR1 Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti	C	KPC berkomitmen untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan di keseluruhan rantai nilai ( <i>value chain</i> ). Ini berarti, bukan hanya kualitas produk akhir dan ketepatan pengiriman kepada pelanggan sajalah yang perlu dijaga, namun harus memastikan bahwa produk batu bara yang diproduksi harus diperoleh dengan cara-cara yang dapat di pertanggungjawabkan. Untuk itu, KPC memiliki dan menerapkan berbagai metode pemantauan di setiap tahapan produksi, mulai dari proses perencanaan, penambangan, penyediaan, penyimpanan, hingga ke proses pengangkutan.  KPC menerapkan standar keselamatan dan kesehatan terakreditasi agar seluruh proses produksi, pemuatan maupun pengangkutan baik yang menggunakan alat berat maupun	Standar Fully Fulfilled	30 31

prosedur tersebut		<p><i>conveyor belt</i> tidak mencelakakan ataupun menyebabkan gangguan kesehatan terhadap karyawan di lapangan maupun masyarakat sekitar. Contohnya untuk meminimalisir dampak debu selama proses transportasi, bongkar, maupun loading, KPC secara rutin melakukan penyemprotan air ke area-area yang membutuhkan.</p> <p>Tim Quality Control terus-menerus memantau jalannya keseluruhan proses operasional selama 24 jam sehari. Hal ini untuk memastikan kualitas produk, termasuk juga untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi dilakukan sesuai standar dan praktik terbaik..</p>		
PR2 Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.	A	Selama tahun pelaporan, tidak ada keluhan ketidakpuasan ataupun laporan pelanggaran kontrak penjualan dalam bentuk apa pun dari pelanggan baik mengenai kualitas produk, ketepatan jadwal pengiriman, keabsahan dokumen informasi produk, maupun pemenuhan kesepakatan kontrak.	Standar Fully Fulfilled	31
<b>Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa</b>				
PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.	C	Selama tahun pelaporan, KPC tidak menerima keluhan ketidakpuasan ataupun laporan pelanggaran kontrak penjualan dalam bentuk apa pun dari pelanggan baik mengenai kualitas produk, ketepatan jadwal pengiriman, keabsahan dokumen informasi produk, maupun pemenuhan kesepakatan kontrak.	Standar Not Fulfilled	31
PR4 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan	A	Selama tahun pelaporan, KPC tidak menerima keluhan ketidakpuasan ataupun laporan pelanggaran kontrak penjualan dalam bentuk apa pun dari pelanggan baik mengenai kualitas produk, ketepatan jadwal pengiriman, keabsahan dokumen informasi produk, maupun pemenuhan kesepakatan kontrak.	Standar Fully Fulfilled	31

informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.				
PR5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.	A	Selama tahun pelaporan, KPC tidak menerima keluhan ketidakpuasan ataupun laporan pelanggaran kontrak penjualan dalam bentuk apa pun dari pelanggan. Beberapa metode komunikasi yang diterapkan adalah melalui <i>email</i> , faksimili, telepon, dan kunjungan ke wilayah operasi. KPC senantiasa berupaya memenuhi setiap klausul yang tercantum pada kontrak penjualan batubara yang sudah disepakati bersama, terutama pada hal-hal terkait kualitas, ketepatan pengiriman, volume muatan dan privasi pelanggan.	Standar Fully Fulfilled	31 33
<b>Aspek: Komunikasi Pemasaran</b>				
PR6 Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.	C	Tim Pemasaran KPC aktif berkomunikasi dan melakukan kunjungan rutin ke pelanggan dengan tujuan untuk membina hubungan baik dengan seluruh pelanggan dan calon pelanggan kami, sekaligus mencari tahu mengenai harapan, ekspektasi dan keluhan ataupun kritik serta saran. Beberapa metode komunikasi yang diterapkan adalah melalui <i>email</i> , faksimili, telepon, dan kunjungan ke wilayah operasi kami. KPC senantiasa berupaya memenuhi setiap klausul yang tercantum pada kontrak penjualan batubara yang sudah disepakati bersama, terutama pada hal-hal terkait kualitas, ketepatan pengiriman, volume muatan dan privasi pelanggan.	Standar Fully Fulfilled	33
PR7 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.	A	Selama periode tahun pelaporan 2011, tidak terjadi pelanggaran, sanksi dan denda finansial terkait komunikasi pemasaran, promosi produk yang tidak sesuai maupun pelanggaran kontrak penjualan.	Standar Fully Fulfilled	33
<b>Aspek: Keleluasaan Pribadi (<i>privacy</i>) Pelanggan</b>				
PR8 Jumlah keseluruhan	A	Hingga akhir 2011, belum pernah terjadi keluhan dari pelanggan sehubungan dengan pelanggaran privasi pelanggan	Standar Fully Fulfilled	35

dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan				
<b>Aspek: Kepatuhan</b>				
PR9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa	C	KPC memiliki mekanisme untuk melindungi privasi para pelanggan, di antaranya melalui penerapan klausul <i>Confidentiality Agreement</i> dalam <i>sales contract master</i> dengan pihak pelanggan. Sampai saat ini tidak pernah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian dan klausul tersebut.	Standar Fully Fulfilled	35

Pada Aspek pemasangan label bagi produk dan jasa. PR 3 menjelaskan Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut. Tetapi perusahaan KPC hanya menjelaskan tidak ada pelanggaran berkaitan dengan produk, dan itu sama sekali tidak memberikan penjelasan sesuai dengan indikator yang disarankan, jadi PR 3 tidak memenuhi standar GRI.

Dari tabel di atas, dapat dilihat KPC hanya dapat memenuhi memenuhi 7 indikator (2 indikator inti dan 5 indikator tambahan) dari 9 indikator (4 indikator inti dan 5 indikator tambahan), satu nya setengah penuh (*Partially Fulfilled*) dan satu lagi tidak terpenuhi (*Not Fulfilled*) dari indikator inti, pada aspek pemasangan label bagi produk jasa.

**Tabel V.25**

**Ringkasan Rata-rata Pemenuhan 2010 PT. KPC Laporan Keberlanjutan**  
**dalam berdasarkan Indikator GRI.**

Aspek	Total Indikator	Partially Fulfilled		Fully Fulfilled		Partiall Core %
		Core	Add	Core	Add	
Ekonomi	9 ( 7 Core, 2 Add )	0	0	7	2	0%
Lingkungan Hidup	30 ( 17 Core, 13 Add)	1	0	16	13	6%
Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak	15 ( 10 Core, 5 Add)	3	0	7	5	30%
Hak Asasi Manusia	11 ( 9 Core, 2 Add )	0	1	8	1	0%
Masyarakat	10 ( 8 Core, 2 Add )	0	0	8	1	13%
Tanggung Jawab Produk	9 ( 4 Core, 5 Add)	0	0	3	5	25 %
<b>Total Indikator Keseluruhan</b>	<b>84 ( 55 Core, 29 Add)</b>					
<b>Total Indikator Fulfilled</b>	<b>81 (53 Core, 28 Add)</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	<b>27</b>	
<b>Average</b>						<b>12%</b>

Berdasarkan tabel V.7, PT. Kaltim Prima Coal,Tbk,. pada kriteria sebagian terpenuhi (*Partially Fulfilled*) terdapat 5 indikator (4 indikator dari 55 indikator inti dan 1 indikator tambahan dari 29 indikator tambahan). Untuk kriteria Terpenuhi sepenuhnya atau yang memenuhi kriteria standar (*fully fulfilled*) terdapat 76 indikator (49 indikator inti dari 55 indikator inti dan 27 indikator tambahan dari 29 indikator tambahan) yang disarankan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Atau secara persentase, sebagian terpenuhi hanya 12% indikator inti, 8% indikator tambahan dan untuk kriteria terpenuhi sepenuhnya adalah 88% indikator inti dan 83% indikator tambahan. Dan ada 3 indikator yang belum terpenuhi (*not fulfilled*) yaitu dari aspek Hak Asasi manusia pada HR 10, aspek Masyarakat pada SO 6, dan aspek Tanggung Jawab Produk pada PR 3.

Hasil dari analisis dan klasifikasi serta perbandingan dengan standar GRI Laporan Berkelanjutan PT. Kaltim Prima Coal telah memenuhi lebih dari 20

indikator, baik itu indikator inti maupun indikator tambahan yang telah ditetapkan sebagai standar minimum oleh GRI dan PT. Kaltim Prima Coal, Tbk., termasuk kedalam kategori Level B (baik), menurut penilaian pihak ketiga (Third Party Checked) berdasarkan standar GRI G3.1 *Sustainability Reporting Guidelines in Particular & Mining and Metals Sector Supplement RG Version 3.1/MMSS Final Version*.

Berdasarkan dari hasil pengukuran di atas juga terlihat bahwa, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia telah dilakukan sebaik mungkin, dengan program-program pengembangan masyarakat, karyawan, dan juga untuk para pemasok, investor serta pemerintah. Untuk KPC kepedulian terhadap masyarakat sekitar areal pertambangan adalah hal yang paling di kembangkan, karena lingkungan merupakan aspek yang sangat signifikan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1      Kesimpulan**

Penelitian ini adalah menganalisis penerapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) berdasarkan Laporan berkelanjutan 2011 dengan standar GRI (*Global Reporting Initiative*) pada PT. Kaltim Prima Coal, Tbk., dengan tujuan untuk menilai perkembangan laporan berkelanjutan PT. KPC dan penerapan CSR yang telah dilakukan melalui standar GRI. Yang mana pada laporan berkelanjutan akan menggambarkan perkembangan pembangunan setiap tahunnya dan juga bagaimana perusahaan mewujudkan kepeduliannya kepada masyarakat sekitar, karyawan, pemasok dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemenuhan dan kepatuhan perusahaan sesuai dengan standar yang disarankan GRI.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. KPC telah melakukan pembangunan berkelanjutan dan pengembangan program CSR untuk masyarakat sekitar areal pertambangan.
2. PT. Kaltim Prima Coal, Tbk., pada kriteria sebagian terpenuhi (*Partially Fulfilled*) terdapat 4 indikator inti dari 55 indikator inti dan 1 indikator tambahan dari 29 indikator tambahan. Untuk kriteria seluruh terpenuhi atau yang memenuhi kriteria standar (*fully fulfilled*) terdapat 49 indikator inti dari 55 indikator inti dan 27 indikator tambahan dari 29 indikator tambahan yang disarankan oleh *Global*

*Reporting Initiative (GRI)* atau secara persentase, sebagian terpenuhi hanya 12% indikator inti, 8% indikator tambahan dan untuk kriteria seluruh terpenuhi adalah 88% indikator inti dan 83% indikator tambahan. Dan ada 3 indikator yang belum terpenuhi (*not fulfilled*) yaitu dari aspek Hak Asasi manusia, aspek Masyarakat, dan aspek Tanggung Jawab Produk

3. PT. KPC telah memenuhi lebih dari 20 indikator kinerja standar minimumnya, baik itu inti ataupun tambahan dan PT. Kaltim prima Coal termasuk dalam kriteria B.
4. Penerapan *Corporate Social Responsibility* telah sesuai dengan aturan dan standar GRI dan lebih meningkat dari tahun sebelumnya yang dapat dilihat dari analisis indikator-indikator kinerja yang disarankan GRI.

## **VI.2      Saran**

1. Sebagai perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, hendak lah selalu lebih menjunjung tinggi aspek kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan serta karyawan perusahaan, jika internal perusahaan sudah bagus, tentu investasi akan meningkat, karena resiko investasi akan ternilai dari loyalitas masyarakat.
2. Lebih mengembangkan program-program untuk masyarakat lokal atau daerah operasional perusahaan.

3. Mempersiapkan karyawan dengan daya saing yang tinggi, sehingga mampu bersaing untuk masa kedepannya.
4. Untuk standar yang belum memenuhi kriteria GRI (*Global Reporting Initiative*) atau *Not Fulfilled* yang dianalisis dan dinilai oleh pihak ketiga (*Third Party Checked*), lebih menganalisis apa-apa yang disarankan oleh GRI dan lebih mencantumkan data ataupun penjelasan yang lebih detail mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan standar GRI dalam laporan berkelanjutan perusahaan (*Sustainability Report*).

### **VI.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya berdasarkan data sekunder Laporan Berkelanjutan PT. Kaltim Prima Coal tahun 2011 yang bersumber dari website. Untuk laporan berkelanjutan tahun terakhir yaitu tahun 2012, belum dipublikasikan oleh perusahaan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini tidaklah Laporan Berkelanjutan tahun terakhir. Penelitian ini berdasarkan pengetahuan penulis dari literatur yang relevan karena peneliti tidak melakukan penelitian lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bateman, Thomas S. dan Scott A. Snell. 2009. *Manajemen, kepemimpinan dan kolaborasi dalam dunia yang kompetitif*. Edisi 7. Buku 1. Jakarta: salemba Empat.
- Purwitasari, Fadila dan Anis Chariri, 2011. *Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory: Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia*. Diakses [http://eprints.undip.ac.id/32102/1/fadilla\\_C2C007035\\_jurnal.pdf](http://eprints.undip.ac.id/32102/1/fadilla_C2C007035_jurnal.pdf). Pada tanggal 15 Juli 2013.
- Firmansyah, Aorta Adli. 2012. *The Analysis Of The Implementation Of Sustainability Reporting In PT. Timah Tbk.*. Malang University Of Brawijaya. Skripsi.
- Global Reporting Initiative (GRI). *Sustainability Reporting*. (Online). Diakses di (<https://www.globalreporting.org/information/sustainabilityreporting/Pages/default.aspx>). Pada tanggal 10 April 2013.
- Griffin. 2004. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, SofyanSyafri. 2003. *Teory akuntansi*. Edisi Revisi. Catatan Keenam. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- ISO 26000 sebagai Pedoman Baru Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). (online). Diaksesdi <http://entergizer.wordpress.com/2012/10/09/iso-26000-sebagai-pedoman-baru-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr/>, padatanggal 20 April 2013.
- L. Daft, Richard. 2006. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Mansur, Syuhada. 2012. *Pelaporan Corporate Social Responsibility perbankan syariah dalam perspektif Syariah Enterprise Theory*. Skripsi Universitas Hasanuddin :Makasar.
- Mardalis.2010. *Metodologi Penelitian SuatuPendekatan Proposal*. Edisi Pertama, Cet. 12. Jakarta: BumiAksara.
- Moleong, Lexy J. 2008. *MetodologiPenelitianKualitatif*. Cetakan Kedua puluh lima. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Monalisa. 2012. *Analysis of 2010 pt indosat sustainability report based on global reporting initiative (gri) indicators PT.Indosat tbk.*. Malang: Brawijaya University. Skripsi.

[Pedoman Laporan Keberlanjutan GRI G3 - Global Reporting Initiative](https://www.globalreporting.org/resource/library/Bahasa-Indonesia-G3-Reporting-Guidelines.pdf). Diakses di <https://www.globalreporting.org/resource/library/Bahasa-Indonesia-G3-Reporting-Guidelines.pdf>. Pada tanggal 10 April 2013.

Robbins Stephen P. dan Mary Coulter, 2010, *Manajemen*. Edisi Kesepuluh. Jilid Satu. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. Erlangga.

Sangadji, Etta Mamang & Sopiah, 2010. *Metodologi penelitian, pendekatan praktis dalam penelitian*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi

Sembiring, Eddy Rismanda, 2005. *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi ke-8, Solo, 15-16 September.

Suharto, Edi (2008), *Corporate Social Responsibility: What is and Benefit for Corporate*. Makalah Yang Disajikan Pada Seminar Dua Hari, Corporate Social Responsibility: Strategy, Management, and Leadership, Hotel Aryaduta. Jakarta 13-14 Februari 2008.

Susanto, A.B. 2009. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategic Management dalam CSR*, Esensi dari Erlangga Group.

Ulva, 2012. *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan (studi kasus PT. International Nickel Indonesia Tbk)*, Diakses di [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2053/SKRIPSI%20\(ANALISIS%20PENGARUH%20CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY%20TERHADAP%20CITRA%20PT.INCO%20TBK\).pdf?sequence=2](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2053/SKRIPSI%20(ANALISIS%20PENGARUH%20CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY%20TERHADAP%20CITRA%20PT.INCO%20TBK).pdf?sequence=2). Pada tanggal 10 April 2013.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. 2005. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.

[www.kpc.co.id](http://www.kpc.co.id). 2010. *Sustainability Report*. (online). Diakses di <http://www.kpc.co.id/pdf/SR2010FinalEng.pdf>. Pada tanggal 10 April 2013.

<http://manajemen.unnes.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/AKUNTANSI-LINGKUNGAN-SEBAGAI-INSTRUMEN-PENGUNGKAPAN->

[TANGGUNG-JAWAB-PERUSAHAAN-TERHADAP-LINGKUNGAN-DI-ERA-GREEN-MARKET.pdf](#). Diakses pada tanggal 27 Oktober 2013.